



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

jogja
istimewa



LAPORAN KINERJA

LKj

TAHUN 2014

Kata Pengantar



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemda DIY Tahun 2014 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2014.

Laporan Kinerja (LKj) Pemda DIY Tahun 2014 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kedua dalam masa RPJMD DIY Tahun 2012-2017. LKj Tahun 2014 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2014 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2012-2017).

LKj Pemda DIY disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj Pemda DIY Tahun 2014 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Pemda DIY. Komitmen dalam penyusunan LKj Pemda DIY, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemda DIY untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Pemda DIY Tahun 2014 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, geografis, sisi historis, demografis, kinerja ekonomi, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Pemda DIY. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Pemda DIY pada tahun 2014, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2014 telah banyak membuahkan hasil pembangunan. Dari tujuh belas indikator kinerja utama,

terdapat lima belas indikator yang telah memenuhi kriteria yang tinggi (dua indikator) dan bahkan sangat tinggi (tiga belas indikator). Kinerja yang tercermin dari capaian atas sejumlah *outcome* yang masuk kategori tinggi atau sangat tinggi tersebut, tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan. Keterpaduan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi koordinasi *pentahelix* yang efektif dan efisien.

Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang sehingga Renaissans Yogyakarta yang diharapkan bisa terwujud. Berkenaan dengan itu, LKj Pemda DIY Tahun 2014 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Yogyakarta, Maret 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGGU BUWONO X

Ikhtisar Eksekutif

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Pemda DIY tahun 2014 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemda DIY.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Gubernur yang telah dicanangkan pada tahun 2014 telah berhasil dicapai.

Dari tujuh belas indikator kinerja utama Gubernur Tahun 2014, menunjukkan bahwa capaian pada 15 IKU sudah masuk pada kategori tinggi dan atau sangat tinggi. Sebanyak 13 IKU masuk dalam kategori sangat tinggi dan 2 IKU memiliki capaian IKU pada kategori tinggi.

Pencapaian 13 IKU dengan kategori sangat tinggi yaitu indikator yang pencapaiannya $\geq 91\%$. Sebanyak 6 IKU diantaranya memiliki kinerja sangat tinggi (91-100) yaitu rata-rata lama sekolah, persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya, angka harapan hidup, pendapatan perkapita pertahun (ADHK) (juta), opini pemeriksaan BPK, persentase peningkatan kualitas lingkungan.

IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2014 yaitu angka melek huruf, persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya, indeks ketimpangan antar wilayah, jumlah wisatawan nusantara, jumlah wisatawan mancanegara, nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, opini pemeriksaan BPK, *load factor* angkutan perkotaan meningkat, persentase peningkatan kualitas lingkungan, kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW kab/kota dan RTRW provinsi meningkat.

Sedangkan 7 indikator kinerja sasaran yang lainnya realisasinya dibawah 100% yaitu derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, pendapatan perkapita pertahun (ADHK) (juta), indeks ketimpangan pendapatan, lama tinggal wisatawan nusantara (hari) dan lama tinggal wisatawan mancanegara (hari).

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemda DIY ke depan. *Pertama*, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan penurunan ketimpangan pendapatan, partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya, hingga meningkatkan lama tinggal wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Peran Pemda DIY diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Ini juga mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi warga miskin dan kelompok marjinal lainnya yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.

Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemda DIY dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah DIY, daerah yang berbatasan dengan DIY maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Beberapa sasaran seperti peningkatan pendapatan, pengurangan ketimpangan dan peningkatan jumlah dan lama tinggal wisatawan menunjukkan

pentingnya kontribusi dan koordinasi dengan dunia usaha dan juga masyarakat. Koordinasi dan sinergi menjadi jawaban untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan berbagai pihak, dalam beragam cara sesuai dengan kompetensi dan tugas fungsi masing-masing, berorientasi kepada pencapaian tujuan yang sama. Persoalan ketimpangan pendapatan misalnya, tidaklah hanya cukup diselesaikan dengan program pemerintah saja, namun juga sangat membutuhkan sinergi dan koordinasi dengan inisiatif masyarakat dan juga dunia usaha. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan serta penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemda DIY, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Di luar IKU, pencapaian kinerja pemerintah daerah juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan pembangunan manusia. Ini mencakup antara lain adalah pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta Indeks Pembangunan Gender (IPG). Tren dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pencapaian IPM dan IPG di DIY menunjukkan kecenderungan yang positif. Mayoritas indikator dari 7 tujuan pembangunan dan 57 indikator telah dicapai pada tahun 2014. Sebagian indikator bahkan sudah tercapai saat ini sebelum tahun 2015 yang menjadi tahun pencapaian tujuan MDGs. Beberapa indikator di bidang pendidikan telah menunjukkan pencapaian yang baik, seperti pencapaian angka melek huruf usia 15-25 tahun, ataupun rasio angka partisipasi murni baik perempuan dan laki-laki di jenjang pendidikan SD dan SLTP. Begitu juga dengan prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi serta gizi buruk, telah mencapai target. Memang masih menyisakan sejumlah persoalan, seperti penurunan angka kemiskinan, indikator terkait kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS, serta indikator untuk penurunan emisi karbon dan kawasan lindung pertanian. Beberapa indikator ini perlu menjadi perhatian dari program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUIF	III
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR TABEL	VIII
DAFTAR GAMBAR	XIII
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 SEJARAH PEMERINTAH DAERAH DIY	3
1.4 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH	5
1.4.1 <i>Batas Administrasi</i>	5
1.4.2 <i>Luas Wilayah</i>	6
1.4.3 <i>Topografi</i>	7
1.5 GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI	9
1.5.1 <i>Jumlah Penduduk</i>	9
1.5.2 <i>Indeks Pembangunan Manusia</i>	10
1.5.3 <i>Penduduk Miskin</i>	11
1.6 ISU STRATEGIS DIY	13
1.7 STRUKTUR PEMDA DIY	14
1.8 KERAGAAN SDM PEMDA DIY	15
1.9 INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA PEMDA DIY	18

BAB 2	PERENCANAAN DAN PEJIAN KINERJA.....	22
2.1	RENCANA STRATEGIS PEMDA DIY	22
2.1.1	<i>Visi dan Misi</i>	22
2.1.2	<i>Tujuan</i>	24
2.1.3	<i>Sasaran</i>	24
2.1.4	<i>Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2012 - 2017</i>	27
2.1.5	<i>Strategi</i>	27
2.1.6	<i>Program untuk Pencapaian Sasaran</i>	30
2.1.7	<i>Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah</i>	31
2.2	PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2014.....	36
2.2.1	<i>Rencana Anggaran Tahun 2014</i>	37
BAB 3	AKUNTABILITAS PEMDA DIY 2014.....	40
3.1	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2014	41
3.2	EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	51
3.3	PENCAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	135
3.3.1	<i>Pencapaian Target MDGs</i>	135
3.4	STATUS PENCAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER	147
3.4.1	<i>Indek Pembangunan Manusia</i>	147
3.4.2	<i>Indeks Pembangunan Gender</i>	150
3.5	REALISASI ANGGARAN.....	154
BAB 4	PENUTUP	159
LAMPIRAN	186

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk DIY Hasil Sensus Penduduk 2010.....	9
Tabel 1.2	Nilai PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2013-2014 (Milliar Rupiah)	12
Tabel 1.3	Komposisi PNS Pemda DIY Menurut Jenjang Pendidikan.....	15
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	25
Tabel 2.2	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2014	30
Tabel 2.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan DIY Tahun 2014.....	34
Tabel 2.4	Penetapan Kinerja Pemda DIY Tahun 2014	36
Tabel 2.5	Rencana Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014.....	37
Tabel 2.6	Alokasi per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2014	38
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	41
Tabel 3.2	Tabel Pencapaian IKU Gubernur Tahun 2014.....	42

Tabel 3.3	Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Gubernur Tahun 2014 Per Triwulan.	45
Tabel 3.4	Kinerja dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2014	49
Tabel 3.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Peran Serta dan Apresiasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkatkan	51
Tabel 3.6	Jumlah Organisasi Kesenian di DIY Tahun 2010-2014	53
Tabel 3.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Melek Huruf Masyarakat Meningkatkan.....	55
Tabel 3.8	Rencana dan Realisasi Capaian Aksesibilitas Pendidikan Meningkatkan .	60
Tabel 3.9	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013	61
Tabel 3.10	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) DIY Menurut Kabupaten/Kota Periode 2009/2010 s/d Periode 2012/2013.....	64
Tabel 3.11	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurut Kabupaten/Kota Periode 2009/2010 s/d Periode 2012/2013.....	67
Tabel 3.12	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di DIY Sampai dengan Periode 2013/2014	72
Tabel 3.13	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di DIY Tahun 2009-2014	73
Tabel 3.14	Model pendidikan berbasis budaya.....	76
Tabel 3.15	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Harapan Hidup Masyarakat Meningkatkan.....	78
Tabel 3.16	Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 Penduduk DIY Tahun 2009-2013	82
Tabel 3.17	Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk Tahun 2009-2013.....	83

Tabel 3.18	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk DIY Tahun 2012-2013	84
Tabel 3.19	Cakupan Jaminan Kesehatan	84
Tabel 3.20	Jumlah Penduduk DIY yang menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Pemerintah Tahun 2014	85
Tabel 3.21	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pendapatan Masyarakat Meningkat.....	87
Tabel 3.22	Nilai PDRB per Kapita DIY, 2010-2014 (Rupiah).....	87
Tabel 3.23	Data Penduduk Miskin dari Tahun 2010-2014	88
Tabel 3.24	Perkembangan Rasio Penduduk Bekerja di DIY Tahun 2008-2013	90
Tabel 3.25	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2011-Agustus 2014	90
Tabel 3.26	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Februari 2011-Agustus 2014.....	91
Tabel 3.27	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	95
Tabel 3.28	Persentase Lokasi Kumuh Yang Telah Ditangani	98
Tabel 3.29	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	100
Tabel 3.30	Tahapan Keluarga Sejahtera DIY Tahun 2010 - 2014	101
Tabel 3.31	Rencana dan Realisasi Pencapaian Sasaran Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat	104
Tabel 3.32	Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara berdasarkan jenis akomodasi yang tahun 2009 -2014.....	105
Tabel 3.33	Rencana dan Realisasi Pencapaian Sasaran Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Meningkat	107

Tabel 3.34	Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara di DIY Berdasarkan Jenis Akomodasi, 2009-2014	109
Tabel 3.35	Produktivitas Hotel Bintang dan Non Bintang 2009-2014.....	110
Tabel 3.36	Perkembangan Jumlah Akomodasi Berdasarkan Jenis Tahun 2009-2014	111
Tabel 3.37	Kawasan Cagar Budaya di DIY.....	112
Tabel 3.38	Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, 2009-2013.....	113
Tabel 3.39	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	115
Tabel 3.40	Hasil Penilaian Akuntabilitas Pemda DIY Tahun 2014, Kemenpan-RB	116
Tabel 3.41	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	122
Tabel 3.42	Opini BPK Atas Laporan keuangan Pemda DIY, Tahun 2009-2013... ..	122
Tabel 3.43	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Layanan Publik Meningkatkan Terutama Pada Penataan Sistem Transportasi dan Akses Masyarakat di Pedesaan.....	125
Tabel 3.44	Panjang Jalan Berdasarkan Kelas dan Kondisi dalam Km	126
Tabel 3.45	Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2014.....	127
Tabel 3.46	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan.....	128
Tabel 3.47	Hasil Pemantauan Kualitas Udara.....	129
Tabel 3.48	Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai	130
Tabel 3.49	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pemanfaatan Ruang Terkendali	133
Tabel 3.50	Target dan Realisasi Pencapaian MDGs di DIY Tahun 2014	137

Tabel 3.51	IPM DIY Menurut Komponen, Tahun 2009-2013	148
Tabel 3.52	IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di DIY, 2013	149
Tabel 3.53	Capaian IPG Menurut Kabupaten/Kota DIY, Tahun 2008-2011	151
Tabel 3.54	Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2013.....	153
Tabel 3.55	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2014.....	155
Tabel 3.56	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	157

Daftar Gambar

Gambar 1. 1	Kraton Yogyakarta.....	3
Gambar 1. 2	Peta Administrasi DIY.....	6
Gambar 1. 3	Luas Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota	7
Gambar 1. 4	Luas Wilayah DIY Menurut Jenis Tanah	8
Gambar 1. 5	Persebaran Jumlah Penduduk DIY Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2014.....	10
Gambar 1. 6	Gambar aktivitas pendukung perekonomian DIY	12
Gambar 1. 7	Struktur Organisasi Pemda DIY	14
Gambar 1. 8	Komposisi SDM Pemda Berdasarkan Gender	15
Gambar 1. 9	Presentase PNS Pemda DIY Menurut Jenjang Pendidikan.....	16
Gambar 1. 10	Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2014	16
Gambar 1. 11	Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural Pemda DIY, 2014....	17
Gambar 1. 12	Skema Sistem Terpadu Akuntabilitas Kinerja.....	18

Gambar 1. 13	Sistem Aplikasi Jogja Plan.....	19
Gambar 1. 14	Sistem pengumpulan data Kinerja	20
Gambar 2.1	Tema Pembangunan DIY Tahun 2014	32
Gambar 3.1	Persentase Pencapaian IKU Gubernur Tahun 2014	44
Gambar 3.2	Tim DIY pada parade lagu daerah di Jakarta.....	52
Gambar 3.3	Kegiatan Belajar Masyarakat.....	55
Gambar 3.4	Persentase Angka Melek Huruf DIY, 2009-2014	56
Gambar 3.5	Tren Angka Melek Huruf di DIY, 2009-2013.....	57
Gambar 3.6	Perbandingan Angka melek Huruf DIY dengan Nasional	57
Gambar 3.7	Jumlah Perpustakaan di DIY per Kabupaten/Kota	59
Gambar 3.8	Pembelajaran Siswa di Luar Kelas	60
Gambar 3.9	Tren Rata Rata lama Sekolah DIY	61
Gambar 3.10	Perbandingan Rata Rata Lama Sekolah DIY dengan Nasional.....	62
Gambar 3.11	Angka Putus Sekolah di DIY Per Jenjang Pendidikan.....	71
Gambar 3.12	Perkembangan Angka Harapan Hidup DIY Tahun 2009-2014.....	78
Gambar 3.13	Tren Usia Harapan Hidup DIY dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup Nasional	79
Gambar 3.14	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di DIY, 1971-2010.....	80
Gambar 3.15	Tren Prevalensi Balita Gizi Kurang di DIY, 2009-2014	80
Gambar 3.16	Kegiatan Posyandu	81
Gambar 3.17	Pelayanan Masyarakat	83
Gambar 3.18	Data Penduduk Miskin dari Tahun 2010-2014.....	88

Gambar 3.19	Persentase Penduduk Miskin, Desa, dan Kota	89
Gambar 3.20	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin DIY dengan Nasional	89
Gambar 3.21	Arah Pembangunan Kewilayahan dan Pengentasan Kemiskinan	92
Gambar 3.22	Sinergi Arah Pembangunan Kewilayahan dan Pengentasan Kemiskinan	93
Gambar 3.23	Indeks Williamson DIY, 2008-2014.....	95
Gambar 3.24	Peletakan simbolis penanganan RTLH di Kabupaten Kulon Progo	96
Gambar 3.25	Peta Pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan.....	99
Gambar 3.26	Indeks Gini DIY, 2007-2016	101
Gambar 3.27	Kunjungan wisatawan mancanegara	103
Gambar 3.28	Tren Jumlah Wisatawan	104
Gambar 3.29	Lama Kunjungan Wisatawan	108
Gambar 3.30	Cagar Budaya Istana Ratu Boko	111
Gambar 3.31	Museum Ullen Sentalu	112
Gambar 3.32	Kerangka Digital Government Services (DGS).....	118
Gambar 3.33	LPSE DIY	119
Gambar 3.34	Web Monev APBD DIY (monevapbd.jogjaprov.go.id).....	120
Gambar 3.35	Kondisi Transportasi di Ruas Jalan Malioboro	124
Gambar 3.36	Load Factor Angkutan Umum Perkotaan di DIY.....	125
Gambar 3.37	Tren Kondisi Jalan nasional di DIY	127
Gambar 3.38	Strategi Peningkatan Kualitas IPM dan MDGs	136
Gambar 3.39	Tren IPM DIY berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2008-2013 ...	149

Gambar 3.40	Perbandingan IPM DIY dengan IPM Nasional Tahun 2005-2013	149
Gambar 3.41	Perkembangan IPG DIY, Tahun 2008-2011	150
Gambar 3.42	Angka Harapan Hidup Per Jenis Kelamin dan Wilayah	151
Gambar 3.43	Angka Melek Huruf Per Jenis Kelamin dan Wilayah.....	152
Gambar 3.44	Rata-rata Lama Sekolah per Wilayah dan Jenis Kelamin	152
Gambar 3.45	Sumbangan Pendapatan Per Jenis Kelamin dan Wilayah	153

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi :

1. *Latar Belakang*
2. *Maksud dan Tujuan*
3. *Sejarah Pemerintah Daerah DIY*
4. *Kondisi Geografis Daerah*
5. *Gambaran Umum Demografi dan Kondisi Ekonomi Daerah*
6. *Isu Strategis*
7. *Struktur Pemda DIY*
8. *Keragaan SDM Pemda DIY*
9. *Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP Dan Pengelolaan Kinerja Pemda DIY*

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemda DIY.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemda DIY. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat pemerintah provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Maksud dan Tujuan

LKj Pemda DIY merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pemda DIY. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 Sejarah Pemerintah Daerah DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta keberadaannya dalam konteks historis dimulai dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755. Berawal dari sini muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian berkembang, hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I.



Gambar 1. 1 Kraton Yogyakarta

Sejak berdirinya, baik Kasultanan maupun Kadipaten adalah pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatannya. Pada masa kolonial Belanda, pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah *zifbesturende*

landschappen. Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 577.

Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau *Kooti* dengan *Koo* sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di bawah *Kooti*, secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

1. Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah);
3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern. Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY. Entitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan

Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui. Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13/2012 Tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012.

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi.

Kewenangan dalam urusan Kestimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi : tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.

1.4 Kondisi Geografis Daerah

1.4.1 Batas Administrasi

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Pulau Jawa bagian tengah, di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian lainnya dibatasi oleh wilayah provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- Utara : Magelang, Boyolali, Klaten.
- Timur : Wonogiri, Sukoharjo,
- Barat : Purworejo



Sumber : Bappeda DIY, 2013

Gambar 1. 2 Peta Administrasi DIY

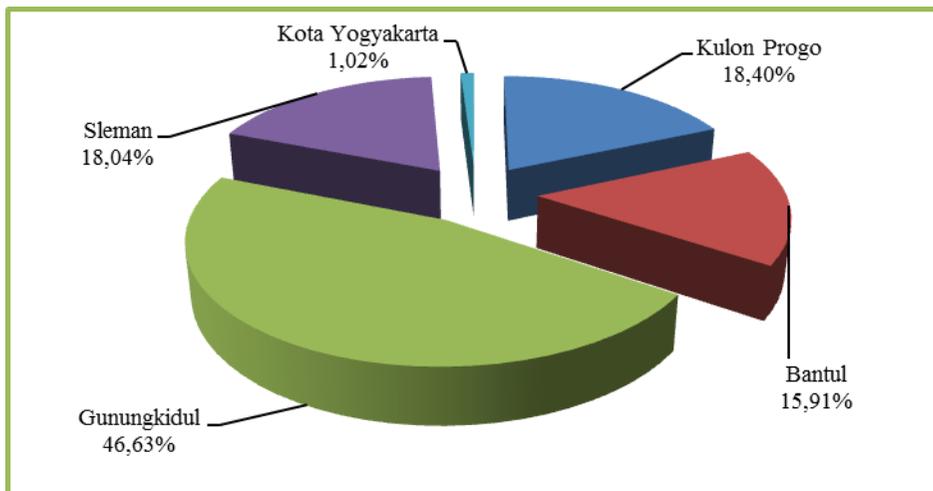
Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan, dengan perincian:

1. Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa;
2. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/desa;
3. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan/desa;
4. Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/desa;
5. Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa.

1.4.2 Luas Wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak diantara 7^o.33'-8^o.12' Lintang Selatan dan 110^o.00'- 110^o.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²). DIY merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri atas:

1. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,02%);
2. Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91%);
3. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,27 km² (18,40%);
4. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km² (46,63%);
5. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04%).



Sumber : DIY Dalam Angka 2014, BPS DIY

Gambar 1. 3 Luas Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota

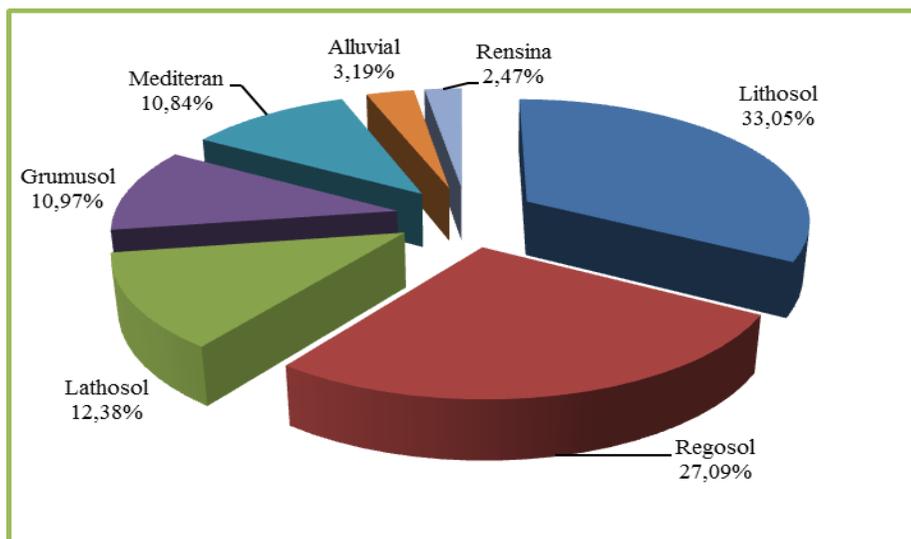
1.4.3 Topografi

Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100—499 m dari permukaan laut, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 meter, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500—999 m, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m. Berdasarkan satuan fisiografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas:

1. Satuan Pegunungan Selatan, seluas $\pm 1.656,25 \text{ km}^2$, ketinggian 150–700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul (Pegunungan Seribu), yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
2. Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas $\pm 582,81 \text{ km}^2$, ketinggian 80–2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul,serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;

3. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas ± 215,62 km², ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas ± 706,25 km², ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.

Dilihat dari jenis tanah, dari 3.185,80 km² luas Daerah Istimewa Yogyakarta, 33,05% merupakan jenis tanah Lithosol, 27,09% merupakan tanah Regosol, 12,38% tanah Lathosol, 10,97% tanah Grumusol, 10,84% tanah Mediteran, 3,19% Alluvial dan 2,47% adalah tanah jenis Rensina.



Sumber : DIY Dalam Angka 2014, BPS DIY

Gambar 1. 4 Luas Wilayah DIY Menurut Jenis Tanah

1.5 Gambaran Umum Demografi

1.5.1 Jumlah Penduduk

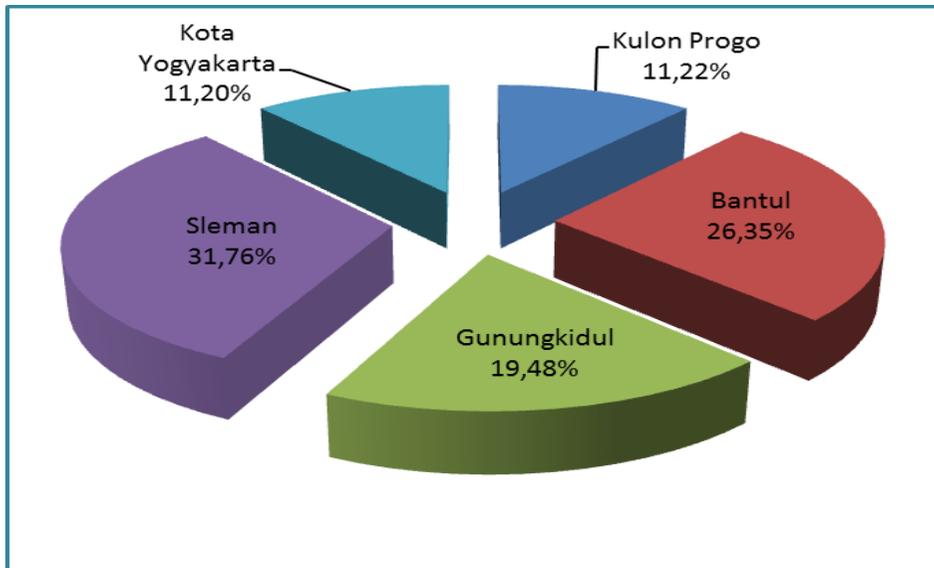
Jumlah penduduk DIY pada tahun 2010 menurut hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 sebanyak 3.457.491 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.708.910 jiwa dan perempuan sebanyak 1.748.581 jiwa. *Sex ratio* penduduk DIY sebesar 97,73.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk DIY Hasil Sensus Penduduk 2010

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
Kota Yogyakarta	189.137	199.490	388.627	94,81
Bantul	454.491	457.012	911.503	99,45
Kulon Progo	190.694	198.175	388.869	96,23
Gunungkidul	326.703	348.679	675.382	93,70
Sleman	547.885	545.225	1.093.110	100,49
DIY	1.708.910	1.748.581	3.457.491	97,73

Sumber: *DIY Dalam Angka 2013, BPS DIY*

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2013 menurut BPS sebanyak **3.594.854** jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak **1.775.872** jiwa dan perempuan sebanyak **1.818.982** jiwa. Persebaran penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota tahun 2013 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 1.114.833 jiwa atau sebesar 31,76%. Wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua yaitu Kabupaten Bantul sebanyak 947.066 jiwa atau sebesar 26,35 %, disusul oleh Kabupaten Gunungkidul pada urutan ketiga dengan jumlah penduduk sebanyak 700.192 jiwa atau sebesar 19,48%. Selanjutnya, wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk 402.709 jiwa atau 11,20% dan Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah penduduk 403.203 jiwa atau sebesar 11,22% .



Sumber: *DIY Dalam Angka 2014*, BPS DIY

Gambar 1. 5 Persebaran Jumlah Penduduk DIY Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2014

1.5.2 Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur kualitas sumber daya manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam pengukurannya mencakup kualitas bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk (pendapatan penduduk). Tren dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan peningkatan kesejahteraan yang ditunjukkan dengan peningkatan IPM. Pada tahun 2009 IPM DIY sebesar 75,23 sedangkan nasional sebesar 71,76. Untuk DIY baik pada tahun 2009 maupun 2010 menduduki posisi keempat nasional. Begitu juga, IPM DIY pada tahun 2013 menunjukkan capaian positif dimana IPM sebanyak 77,37 merupakan salah satu provinsi dengan capaian IPM tertinggi, karena rata-rata IPM nasional adalah sebesar 73,82.

IPM menurut Kabupaten/Kota di DIY tahun 2013 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menduduki peringkat ke-1 dengan angka 80,51. Kabupaten dengan angka IPM yang relatif tinggi yaitu Kabupaten Sleman dengan angka 79,97. Sementara itu, tiga kabupaten lain dengan angka IPM yang relatif masih rendah adalah Kabupaten Bantul (76,01), Kulon Progo (75,95) dan Kabupaten Gunungkidul (71,64).

1.5.3 Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di DIY pada tahun 2014 menurut data BPS sebanyak 532.590 orang atau sebesar 14,55% dari total penduduk DIY. Selama kurun waktu 2010-2014, kemiskinan di DIY baik dari sisi jumlah maupun persentase 2011 jumlah pendudukan miskin DIY tercatat sebanyak 568,05 ribu orang atau 16,14% menurun menjadi sebanyak 532,59 ribu orang atau 14,55 pada periode September 2014. Penurunan selama tiga tahun tersebut (1,59%) masih rendah karena belum mencapai target seperti yang diharapkan. Jumlah penduduk miskin tahun 2014 di wilayah kota/urban sebanyak 324.430 orang atau 13,36%, sedangkan penduduk miskin di wilayah desa/rural sebanyak 208.150 ribu orang atau sebesar 16,88%.

Tingkat kemiskinan DIY masih tergolong tinggi karena masih jauh berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Selama periode 2009-2014, penurunan kemiskinan DIY sebesar 2,68 poin sementara penurunan rata-rata tingkat kemiskinan nasional sebesar 3,19 poin. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan DIY masih rendah.

Faktor yang dapat mempengaruhi penurunan jumlah pendudukan miskin adalah naiknya tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan dipengaruhi oleh tingkat upah atau gaji yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki pekerja. Semakin tinggi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja maka semakin baik daya belinya. Begitu pula semakin baiknya tingkat pendidikan yang dicapai pendudukan maka akan meningkatkan tingkat kualitas tenaga kerja yang dihasilkan sehingga akan memberi peluang lebih besar memperoleh pekerjaan dengan upah atau gaji yang lebih tinggi. Dengan demikian semakin banyak orang yang memperoleh pekerjaan yang layak maka akan dapat meningkatkan tingkat pendapatannya dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang pada akhirnya akan dapat mengurangi kemiskinan di DIY.

Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi suatu daerah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai PDRB di DIY tahun 2014 mencapai Rp70,86 trilyun atas harga berlaku atau sebesar Rp25,82 trilyun atas harga konstan. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp7,168 trilyun (atas harga berlaku) atau sebesar Rp1,255 trilyun (atas harga konstan).

Empat sektor dengan kontribusi terbesar terhadap nilai PDRB DIY tahun 2014 adalah sektor perdagangan, jasa, industri pengolahan dan sektor pertanian.



Gambar 1. 6 Gambar aktivitas pendukung perekonomian DIY

Tabel 1.2 Nilai PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2013-2014 (Milliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2013		2014	
	ADH Berlaku	ADH Konstan	ADH Berlaku	ADH Konstan
Pertanian	8.866,69	3.732,46	9.503,83	3.681,18
Pertambangan dan Penggalian	416,53	167,67	452,40	171,42
Industri Pengolahan	8.771,19	3.142,84	9.662,21	3.271,29
Listrik, Gas dan Air Bersih	796,70	229,64	958,13	242,90
Bangunan	6.908,38	2.459,17	7.578,02	2.600,38
Perdagangan, Hotel-Restoran	13.152,52	5.225,06	14.779,13	5.553,90
Pengangkutan dan Komunikasi	5.399,50	2.744,16	5.981,63	2.882,55
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan.	6.543,15	2.552,44	7.447,28	2.775,21
Jasa-jasa	12.840,03	4.316,21	14.500,80	4.645,25
PDRB DIY	63.694,70	24.569,65	70.863,44	25.824,10

Sumber : BPS DIY 2014

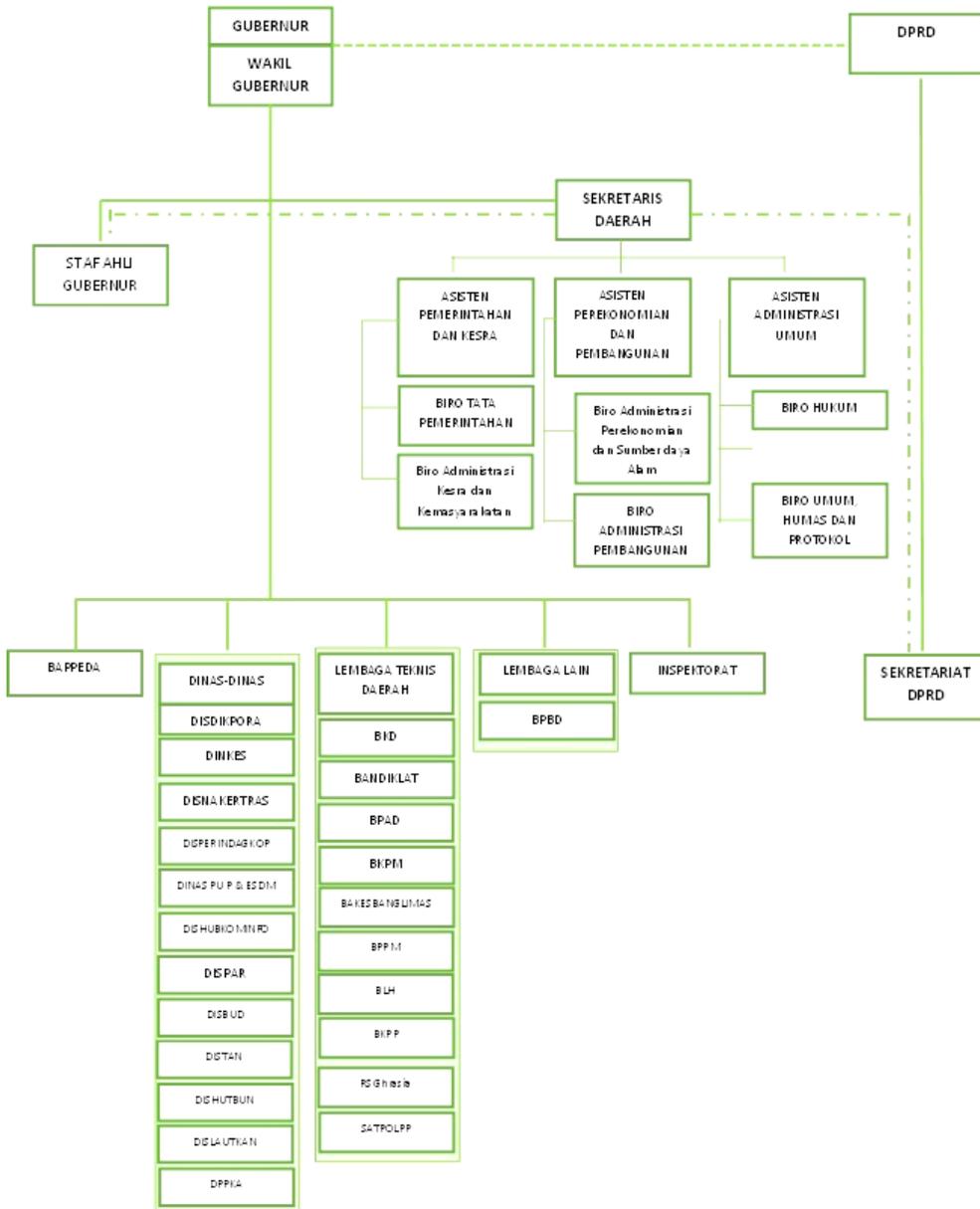
Kontribusi sektor pembentuk PDRB tahun 2014 di DIY tidak mengalami perubahan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2013. Meskipun kontribusi beberapa sektor mengalami perubahan, namun masih didominasi oleh sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, Jasa-jasa, Pertanian dan Industri Pengolahan. Pada tahun 2014 kontribusi sektor Perdagangan Hotel Restoran menempati urutan tertinggi dengan nilai kontribusi sebesar 20,86% kemudian diikuti oleh sektor Jasa 20,46%, sektor Industri Pengolahan 13,63%, sektor Pertanian 13,41%, sektor bangunan 10,69%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 10,51%, sektor pengangkutan dan komunikasi 8,44%, sektor listrik, gas dan air bersih 1,35% dan kontribusi paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai kontribusi 0,64%.

1.6 Isu Strategis DIY

Isu Strategis yang dihadapi Pemda DIY yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2014 adalah :

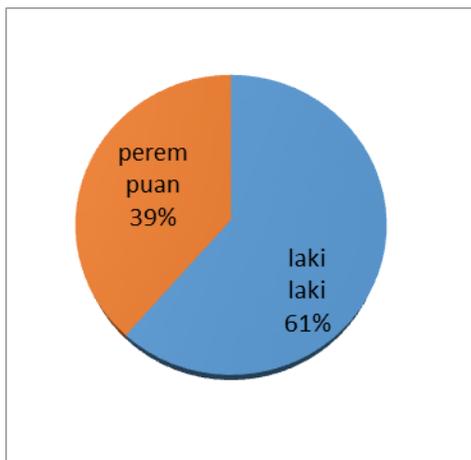
1. Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan kegiatan strategis fasilitas keselamatan jalan dijalur PANSELA.
2. Pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan (Transformasi Program pemberdayaan Masyarakat) dengan kegiatan strategis (1) Bantuan Pemberdayaan Masyarakat bagi Fakir miskin dalam bentuk KUBE dan stimulan UEP di daerah perdesaan; dan (2) pembinaan gizi masyarakat.
3. *Low cost emission car* dengan kegiatan strategis pemasangan ATCS simpang.
4. Peningkatan kesejahteraan petani/nelayan dengan kegiatan strategis (1) Diversifikasi konsumsi pangan lokal; (2) Optimalisasi ketersediaan pangan dalam rangka penanganan desa rawan pangan; (3) peningkatan produksi padi dan jagung dalam mendukung swasembada pangan; (4) Peningkatan produksi perikanan tangkap melalui pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha; (5)Peningkatan produksi ternak dalam mendukung swasembada daging.

1.7 Struktur Pemda DIY



Gambar 1. 7 Struktur Organisasi Pemda DIY

1.8 Keragaan SDM Pemda DIY



Gambar 1. 8 Komposisi SDM Pemda Berdasarkan Gender

Pemda DIY memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Per Desember 2014, jumlah PNS di Pemda DIY adalah sebanyak 7065 orang, dengan perimbangan laki-laki sebanyak 4199 orang (59,4%) dan perempuan sebanyak 2866 orang (40,6%), yang menunjukkan perimbangan gender yang baik sebagaimana nampak dalam gambar berikut ini:

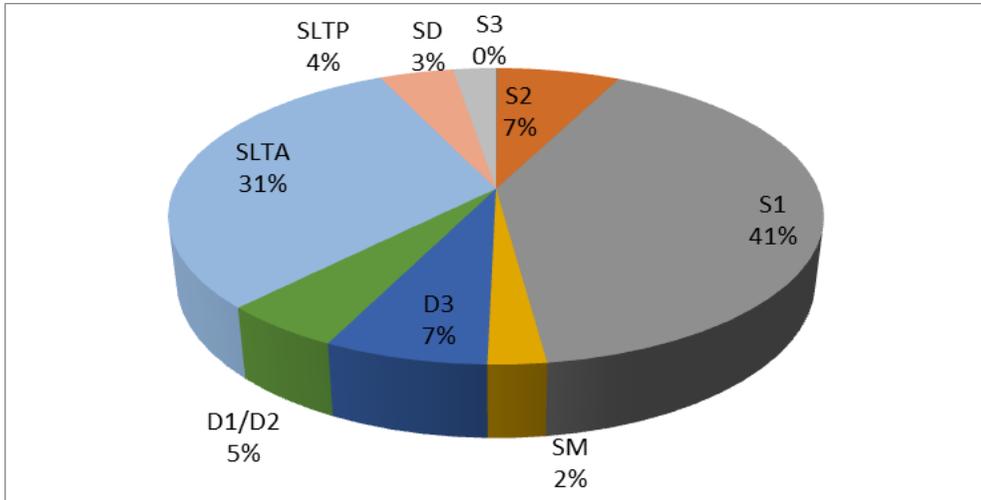
Bila dirunut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S1 sebanyak 2867 orang (41%), kemudian SLTA sebanyak

2183 orang (31%). Selain itu, PNS dengan pendidikan S2 dan D3 juga cukup banyak, yaitu berturut-turut sebanyak 516 orang dan 481 orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Pemda DIY memiliki keragaan sumber daya manusia yang baik. Komposisi per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Komposisi PNS Pemda DIY Menurut Jenjang Pendidikan

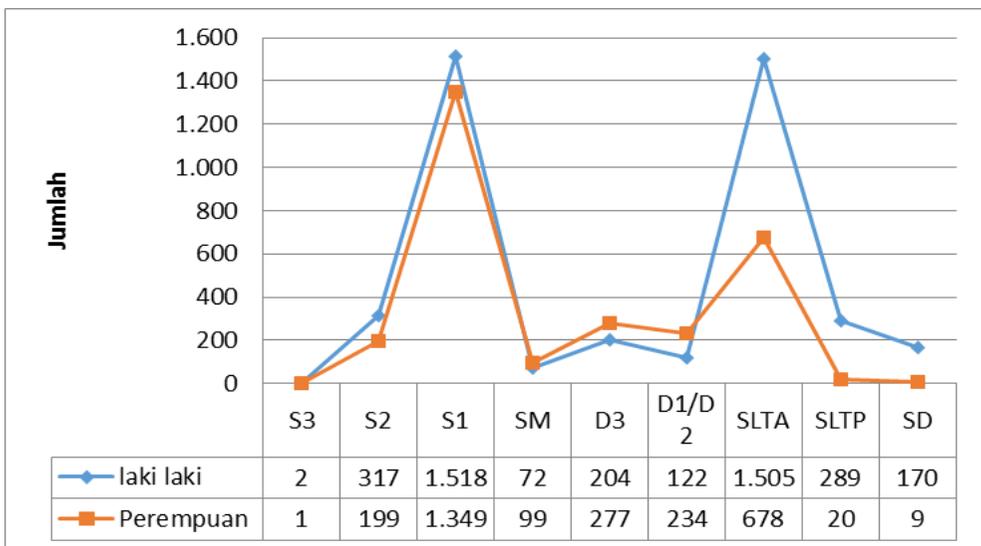
No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S3	3
2.	S2	516
3.	S1	2867
4.	SM	171
5.	D3	481
6.	D2/D1	356
7.	SLTA	2183
8.	SLTP	309
9.	SD	179
Jumlah		7065

Sumber: BKD DIY 2014



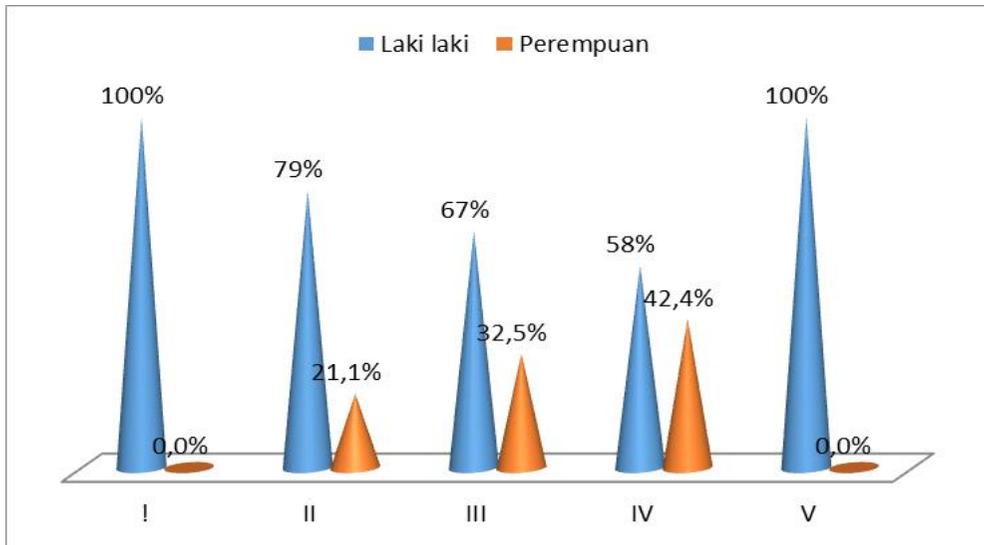
Gambar 1. 9 Presentase PNS Pemda DIY Menurut Jenjang Pendidikan

Apabila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari D3 hingga S3, perimbangan gender nya relatif berimbang. Kesenjangan dalam hal jumlah justru menguat pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah (D2/D1, SLTA, SLTP dan SD).



Gambar 1. 10 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2014

Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. melihat data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin kecil.

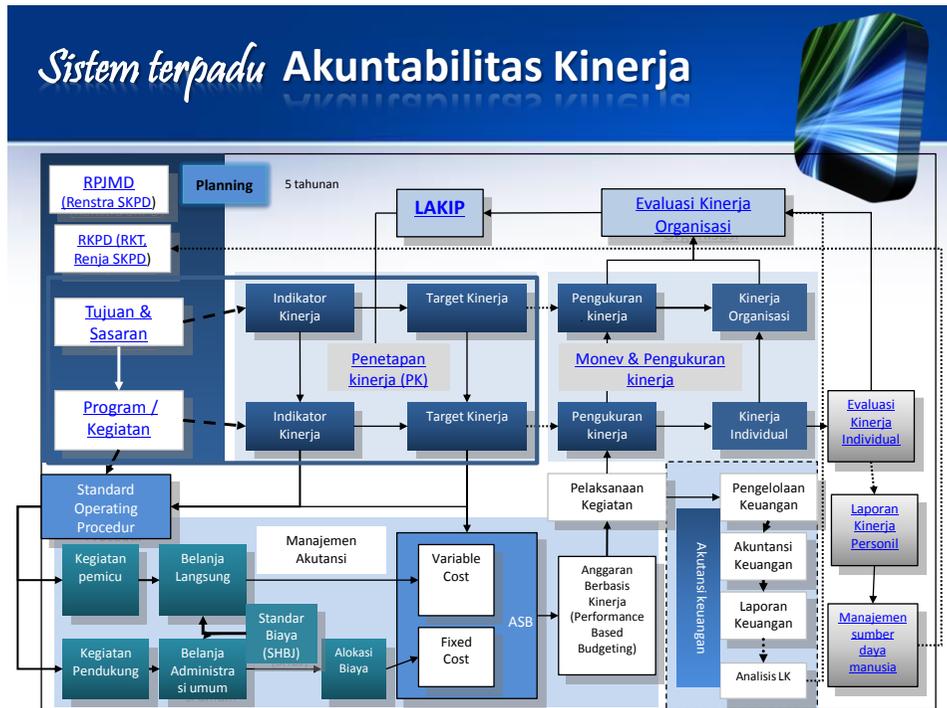


Gambar 1. 11 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural Pemda DIY, 2014

Melihat kecenderungan bahwa kapasitas SDM Pemda seringkali terbebani dengan urusan administrasi dan terbatasnya inovasi, Pemda DIY mengembangkan kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk penguatan kualitas perencanaan pembangunan. Sejak tahun 2013, Pemda DIY telah menjalin kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada dalam melaksanakan program Pendampingan Doktor-doktor Muda sebagai Tenaga Ahli bagi semua SKPD di lingkungan Pemda DIY.

1.9 Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja Pemda DIY

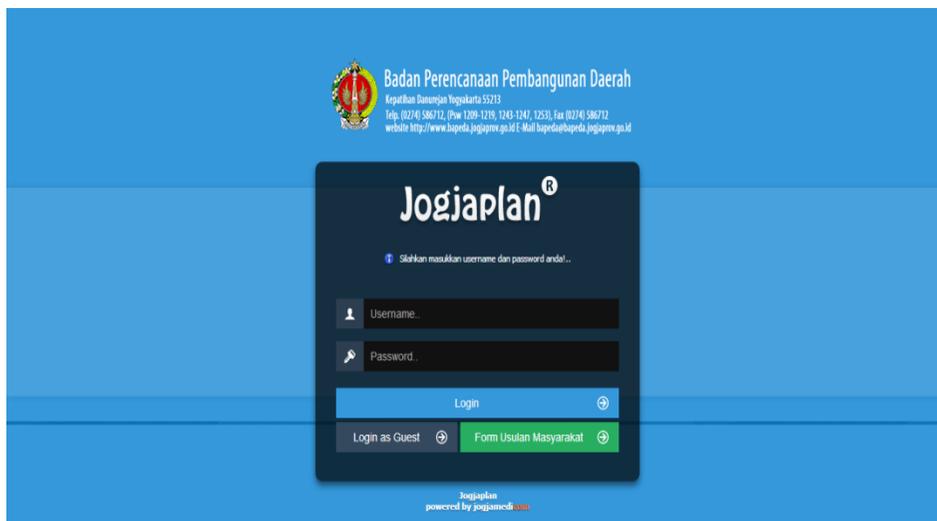
Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Pemda DIY. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah membangun sistem akuntabilitas kinerja terpadu.



Gambar 1. 12 Skema Sistem Terpadu Akuntabilitas Kinerja

Sistem akuntabilitas kinerja terpadu ini untuk memastikan sinkronisasi planning dan implementasi yang terukur dan akuntabel. Pengembangan sistem akuntabilitas terpadu ini diupayakan melalui pengembangan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas perencanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Hal ini meliputi pengembangan *Jogja Plan* untuk perencanaan dan pengembangan sistem aplikasi untuk monitoring dan evaluasi yang mengintegrasikan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), Monev APBD dan E-sakip. Selain itu, Pemda juga melakukan rangkaian inovasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, termasuk pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi aparatur di jajaran Pemda DIY.

Jogja Plan merupakan program aplikasi untuk menjaga konsistensi antara perencanaan pembangunan tahunan yang diwujudkan dalam penentuan rencana program dan kegiatan dengan program dan kegiatan indikatif yang mendukung pencapaian sasaran dalam RPJMD. Sistem aplikasi ini juga dikembangkan untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan dengan memberikan ruang bagi usulan kegiatan oleh masyarakat melalui tautan <http://www.jogjaplan.com/login>.



Gambar 1. 13 Sistem Aplikasi Jogja Plan

Pengembangan *Jogja Plan* juga didukung dengan pengembangan kualitas perencanaan dengan pelibatan tenaga ahli pendamping setiap SKPD dan penyusunan academic paper perencanaan sebagai pelengkap dokumen perencanaan formal pemerintah. Untuk pendampingan tenaga ahli, kerja sama dengan UGM dilakukan untuk program pendampingan doktor muda sesuai kompetensi tenaga ahli dan tupoksi SKPD. Kerja sama ini telah dimulai sejak tahun 2013 yang diwadahi dengan kesepakatan kerjasama no. 5/KSP/IV/2013 tentang penggunaan tenaga kualifikasi doktor UGM dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan oleh SKPD di lingkungan Pemda DIY.



Gambar 1. 14 Sistem pengumpulan data Kinerja

Untuk peningkatan monitoring dan evaluasi pembangunan, Pemda DIY mengembangkan aplikasi Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), Web Monev dan e-SAKIP. Program aplikasi ROPK adalah instrumen yang digunakan oleh SKPD untuk menuangkan rencana detail pelaksanaan kegiatan dalam tata kala waktu dengan memberikan target progres capaian fisik dan keuangan pada tahapan waktunya. Webmonev merupakan aplikasi untuk melaporkan realisasi progres pelaksanaan kegiatan. Data yang dihasilkan dalam ROPK telah diintegrasikan dengan Webmonev dalam bentuk database nama program dan kegiatan serta target fisik dan keuangan. Penggunaan ROPK dan Webmonev dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 73 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah. Selanjutnya, aplikasi e-Sakip merupakan aplikasi yang dibangun untuk melakukan evaluasi atas sejauh mana tingkat pencapaian target kinerja baik di tingkat provinsi maupun di level SKPD. Sistem aplikasi berbasis teknologi informasi ini bisa diakses di <http://monevapbd.jogjaprov.go.id/bpsys/www/auth>. Sistem pelaporan online ini telah diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tatacara Pengendalian Dan Evaluasi.

Inovasi-Inovasi dalam Pengelolaan SDM di Pemda DIY

Inovasi dalam pengelolaan SDM juga merupakan bagian kunci dalam manajemen perubahan di lingkungan Pemda DIY. Salah satunya adalah pengembangan sistem rekrutmen pegawai berbasis kompetensi, pengembangan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), dan raport triwulanan SKPD. Untuk rekrutmen berbasis kompetensi, Pemda DIY telah bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Komponen utama dari sistem rekrutmen ini adalah pengembangan assessment center, rekrutmen terbuka dengan mempromosikan fit proper, dan pejabat pemda dari lingkungan perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemda DIY. Upaya-upaya ini dipandang strategis untuk menjawab persoalan birokrasi yang gemuk dalam hal kuantitas namun seringkali tidak memadai dalam hal kualitas.

Selain perbaikan pada aspek rekrutmen, Pemda DIY juga menerapkan presensi pegawai dengan menggunakan sidik jari, dan pengembangan penilaian kontrak kerja pegawai, bersama dengan sistem insentif dan disinsentif untuk pegawai Pemda DIY melalui skema TPP. Skema TPP ini memasukkan variabel penilaian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan bobot pegawai, disiplin dan penilaian prestasi kerja pegawai melalui penilaian kinerja instansi, kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dan kinerja Subbid/Subbag/Seksi. Pedoman TPP adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2011. Dalam pelaksanaannya peraturan gubernur ini mengalami beberapa kali penyesuaian, dan saat ini, TPP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37.1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

Selain itu, untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pembangunan, Gubernur DIY melakukan pengendalian terhadap seluruh SKPD di lingkungan Pemda DIY melalui pemberian Raport Triwulanan Kepala SKPD. Pemberian rapor diharapkan dapat memberikan dorongan bagi SKPD dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Selanjutnya penetapan ranking PA/KPA dalam setiap rakor pengendalian, merupakan salah satu wujud transparansi serta manifestasi *reward and punishment* dari Gubernur terhadap kinerja PA/KPA di lingkup Pemda DIY.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Rencana Strategis Pemda DIY*
2. *Visi dan Misi*
3. *Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014.*

2.1 Rencana Strategis Pemda DIY

2.1.1 Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis DIY untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program gubernur, RPJMD

berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. Untuk periode 2012-2017, RPMD DIY disahkan melalui Perda No. 6 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis baik SKPD Provinsi maupun Kabupaten Kota, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD tersebut.

Visi :

“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”

Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih berkarakter dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Ini sejalan dengan konsep Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbudaya, di mana interaksi budaya melalui proses inkulturasi dan akulturasi justru mampu memperkuat budaya lokal, menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat dengan kearifan dan keunggulan lokal. Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata dengan menurunnya ketimpangan antar penduduk dan menurunnya ketimpangan antar wilayah. Visi ini juga menggambarkan kemajuan yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial.

Sementara Daerah Istimewa Yogyakarta yang mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (*self-help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat yang sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

Misi:

1. **Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan.** Misi ini mengemban upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mendorong peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.
2. **Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.** Misi ini mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan,

mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif

3. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.** Penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien, melalui sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Misi ini mengemban tujuan peningkatan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
4. **Memantapkan prasarana dan sarana daerah.** Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang.

2.1.2 Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

1. *Misi Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, dengan tujuan:
 - a. Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya;
 - b. Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter;
 - c. Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup;
2. *Misi Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, dengan tujuan:
 - a. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.
 - b. Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.
3. *Misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, dengan tujuan:
 - a. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.
4. *Misi Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, dengan tujuan:
 - a. Mewujudkan pelayanan publik.
 - b. Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

2.1.3 Sasaran

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

1. Misi: *Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, dengan sasaran:
 - a. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.
 - b. Melek huruf masyarakat meningkat.
 - c. Aksesibilitas pendidikan meningkat.
 - d. Daya saing pendidikan meningkat.
 - e. Harapan hidup masyarakat meningkat.
2. Misi: *Menguatkan perekonomian daerah yang didukung semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, dengan sasaran:
 - a. Pendapatan masyarakat meningkat.
 - b. Ketimpangan antar wilayah menurun.
 - c. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.
 - d. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.
 - e. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.
3. Misi: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, dengan sasaran:
 - a. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.
 - b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.
4. Misi: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, dengan sasaran:
 - a. Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.
 - b. Kualitas lingkungan hidup meningkat.
 - c. Pemanfaatan ruang terkendali.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Akhir 2017
1	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	Persen	30%	70%
2	Melek huruf masyarakat meningkat.	Angka Melek huruf.	Persen	91,99	95

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Akhir 2017
3	Aksesibilitas pendidikan meningkat.	Rata-rata lama sekolah.	Tahun	9,6	12
4	Daya saing pendidikan meningkat.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.	Persen	0%	40%
5	Harapan hidup masyarakat meningkat.	Angka Harapan Hidup.	Tahun	73,37	74,18
6	Pendapatan masyarakat meningkat.	Pendapatan perkapita pertahun (ADHK) (Juta).	Juta	7	8,5
7	Ketimpangan antar wilayah menurun.	Indek Ketimpangan Antar Wilayah.	-	0,453	0,4445
8	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.	Indeks Ketimpangan Pendapatan.	-	0,298	0,2878
9	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Jumlah wisatawan nusantara.	Orang	2.113.314	4.561.646
		Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	212.518	272.162
10	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	Hari	2	2,6
		Lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	Hari	2,15	2,69
11	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	-	B	A

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Akhir 2017
12	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.	Opini pemeriksaan BPK.	-	WTP	WTP
13	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.	<i>Load factor</i> angkutan perkotaan meningkat.	Persen	34,57%	42,57%
14	Kualitas lingkungan hidup meningkat.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	Persen	3,14%	15,72%
15	Pemanfaatan ruang terkendali.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.	Persen	50%	90%

2.1.4 Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2012 - 2017

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja.

2.1.5 Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mencapai misi: *Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, yaitu:
 - a. Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan.

- b. Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
 - c. Perluasan akses pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin.
 - d. Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur.
 - e. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara adil dan merata, agar hidup dalam lingkungan sehat, serta berperilaku hidup bersih dan sehat.
2. Strategi untuk mencapai misi: *Menguatkan perekonomian daerah yang didukung semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, yaitu:
- a. Meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga rakyat secara lebih konkret menjadi subyek dan aset aktif pembangunan.
 - b. Membangkitkan daya saing produk unggulan wilayah agar makin kompetitif.
 - c. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata.
 - d. Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat.
 - e. Meningkatkan inovasi, penajaman promosi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta sinergisitas antar pelaku wisata.
3. Strategi untuk mencapai misi: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, yaitu:
- a. Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel.
 - b. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pendapatan daerah.
4. Strategi untuk mencapai misi: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, yaitu:
- a. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengatasi disparitas antar wilayah dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.
 - b. Pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan.

- c. Pemanfaatan ruang mengacu rencana tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2.1.5.1 Arah Kebijakan Daerah

1. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Pertama: *Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya dari 30% menjadi 70%.
 - b. Meningkatkan Angka Melek Huruf dari 91,49% menjadi 95%.
 - c. Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah dari 9,2 menjadi 12, dan peningkatan Daya Saing Pendidikan.
 - d. Meningkatkan persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya dari 0% menjadi 40%
 - e. Meningkatkan Angka Harapan Hidup dari 73,27 menjadi 74,55.
2. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Kedua: *Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pendapatan perkapita pertahun dari Rp6,8 juta menjadi Rp. 8,5 juta.
 - b. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Antar Wilayah dari 0,4574 menjadi 0,4481.
 - c. Mengurangi kesenjangan pendapatan perkapita masyarakat yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Pendapatan dari 0,3022 menjadi 0,2878.
 - d. Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuh kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan nusantara dari 2.013.314 menjadi 2.437.614 dan jumlah wisatawan mancanegara dari 202.518 menjadi 245.198.
 - e. Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuh kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dari 1,9 hari menjadi 2,6 hari dan lama tinggal wisatawan mancanegara dari 2,04 hari menjadi 2,69 hari.

3. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Ketiga: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari B menjadi A.
 - b. Mempertahankan Opini Pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
4. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Keempat: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Penataan Sistem Transportasi DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mencapai *load factor* angkutan perkotaan dari 32,57% menjadi 42,57% dan peningkatan akses di pedesaan.
 - b. Meningkatkan Persentase Kualitas Lingkungan dari 2% menjadi 15,72%.
 - c. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kabupaten/Kota dan RTRW Provinsi dari 45% menjadi 90%.

2.1.6 Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian di jabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program-program prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2014 sebagai berikut

Tabel 2.2 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2014

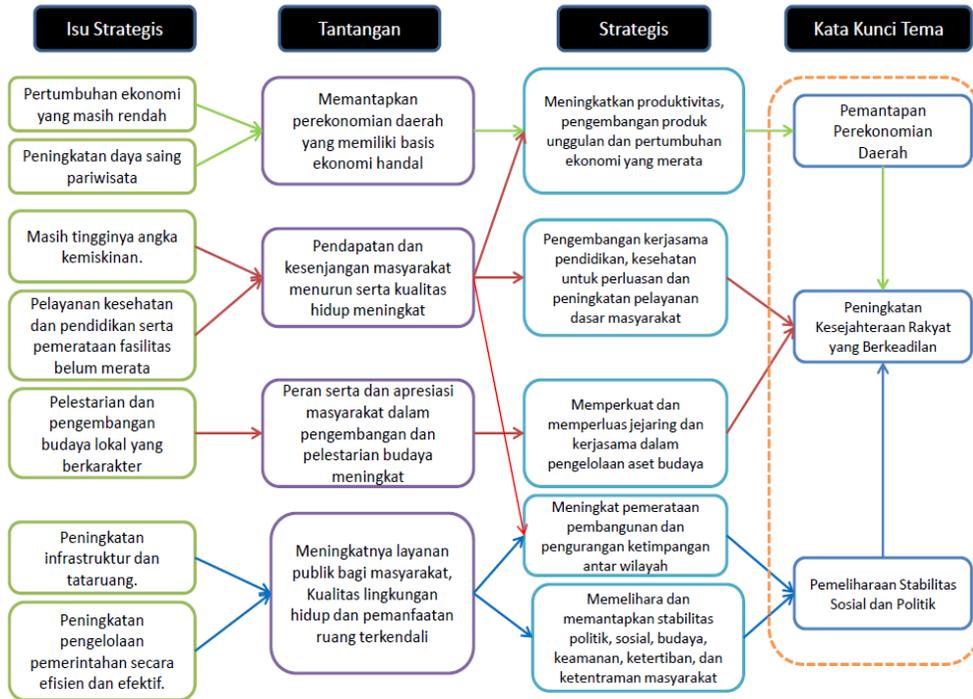
No	Sasaran	Didukung Jumlah Program
1	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	5
2	Melek huruf masyarakat meningkat	4
3	Aksesibilitas pendidikan meningkat.	7
4	Daya Saing Pendidikan meningkat.	8
5	Harapan hidup masyarakat meningkat.	23
6	Pendapatan masyarakat meningkat	34
7	Ketimpangan antar wilayah menurun	11
8	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun	15
9	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	5

No	Sasaran	Didukung Jumlah Program
10	lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	6
11	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	46
12	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	8
13	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	15
14	Kualitas lingkungan hidup meningkat	16
15	Pemanfaatan ruang terkendali	13

2.1.7 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

2.1.7.1 Tema Pembangunan Daerah

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur DIY No. 32 tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), tema pembangunan provinsi DIY tahun 2014 adalah ***"Memantapkan perekonomian daerah dan stabilitas sosial politik menuju Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera"***. Kerangka pikir yang melandasi tema ini tergambar dalam skema berikut ini:



Gambar 2.1 Tema Pembangunan DIY Tahun 2014

Memantapkan perekonomian daerah dimaknai sebagai upaya mendorong kegiatan perekonomian daerah sehingga memiliki basis ekonomi yang bisa diandalkan, tidak mudah goncang (tidak mudah terombang-ambing) akibat perubahan global dan perubahan nasional. Selain itu memantapkan perekonomian daerah juga dimaknai sebagai upaya membangun dan memantapkan dasar SDM yang unggul, mengentaskan kemiskinan, terus menekan angka pengangguran, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah.

Memantapkan stabilitas sosial politik dimaknai sebagai upaya memelihara dan memantapkan stabilitas politik, sosial, budaya, keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat melalui upaya penegakan hukum secara konsisten dan transparan, serta pengembangan kehidupan masyarakat yang religius dan harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang toleran dan terbuka.

Menuju Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera dimaknai sebagai upaya mengarahkan kepada perwujudan visi jangka menengah daerah Tahun 2012-2017. Lebih berkarakter dimaknai

sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral tertentu yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian lebih berkarakter sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena karakter akan terbentuk melalui budaya. Berbudaya dimaknai sebagai kondisi budaya lokal mampu menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkokoh budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (*local wisdom*) dan keunggulan lokal (*local genius*). Berbudaya juga dimaknai sebagai upaya pemberadaban melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi nilai-nilai tradisi dan upaya keras mengenal budaya sendiri, agar berakar kuat pada setiap pribadi, agar terakumulasi dan terbentuk menjadi ketahanan budaya masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses sintesa budaya lokal dengan budaya luar, karena sifat lenturnya budaya lokal, sehingga secara selektif mampu menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan memperkaya khasanah budaya lokal.

Maju dimaknai sebagai masyarakat yang makmur secara ekonomi sehingga perlu dikembangkan pembangunan bidang perekonomian baik yang menyangkut industri, perdagangan, pertanian, dan sektor jasa lainnya yang ditopang dengan pembangunan sarana prasarana ekonomi. Masyarakat yang maju adalah juga masyarakat yang tingkat pengetahuan dan kearifan tinggi yang ditandai dengan tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi pendidikan penduduknya serta jumlah dan kualitas tenaga ahli dan tenaga profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang tinggi. Masyarakat yang maju juga merupakan masyarakat yang derajat kesehatannya tinggi, laju pertumbuhan penduduk kecil, angka harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial baik. Di samping itu, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, terjamin hak-haknya, terjamin keamanan dan ketentramannya, juga merupakan masyarakat yang peran sertanya dalam pembangunan di segala bidang nyata dan efektif. Selain hal-hal tersebut, masyarakat yang maju adalah masyarakat kehidupannya didukung oleh infrastruktur yang baik, lengkap dan memadai. DIY yang Maju juga dimaknai sebagai masyarakat sejahtera secara ekonomis, karena pembangunan perekonomiannya berbasis pada ilmu pengetahuan.

Mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (*self-help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya,

mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Masyarakat Mandiri juga ditandai dengan *civil society* yang kuat, agar mampu menjalankan sebagai jembatan antara rakyat dengan negara. *Civil society* yang mampu mencegah otoritas negara tidak memasuki *domain society* secara berlebihan, dan yang mampu menjalankan peran sebagai suplemen dan komplemen dari negara.

Sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Sedangkan menyongsong Peradaban Baru dimaknai sebagai awal dimulainya harmonisasi hubungan dan tata laku antar-sesama rakyat, antara warga masyarakat dengan lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, serta kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi dan halus, serta adiluhung.

2.1.7.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan DIY Tahun 2014 bersama dengan sasarannya sebagai berikut.

Tabel 2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan DIY Tahun 2014

1.	Reformasi birokrasi dan tata kelola	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
		Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat
2.	Pendidikan	Melek huruf masyarakat meningkat .
		Aksesibilitas pendidikan meningkat
		Daya saing pendidikan meningkat
3.	Kesehatan	Harapan hidup masyarakat meningkat
4.	Penanggulangan kemiskinan	Pendapatan masyarakat meningkat
		Ketimpangan pendapatan masyarakat menurun
5.	Ketahanan pangan	Pendapatan masyarakat meningkat
6.	Infrastruktur	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan

		Pemanfaatan ruang terkendali
7	Iklm infestasi dan usaha	Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara meningkat Lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara meningkat
8	Energi	Layanan publik meningkat terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan
9	Lingkungan hidup dan bencana	Kualitas lingkungan hidup meningkat Pemanfaatan ruang terkendali
10	Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik	Ketimpangan antar wilayah menurun
11	Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi	Peranserta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat

Kerangka pembangunan dalam konteks negara kesatuan mengandung arti terdapatnya kesesuaian antara kerangka pembangunan di tingkat pusat dengan pembangunan di daerah, dalam satu wadah bernama pembangunan nasional. Karenanya, prioritas pembangunan di daerah juga disusun dengan mengacu dan mendukung prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014. Prioritas nasional yang dimaksud adalah:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan Pasca Konflik;
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi, serta 3 Prioritas lainnya yaitu (1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) Bidang Perekonomian dan; (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat

2.2 Penetapan Kinerja (PK) tahun 2014

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2014 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2014, IKU dan APBD. Pemerintah Daerah DIY telah menetapkan PK sebagai berikut.

Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Pemda DIY Tahun 2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	persen	74,57%
2	Melek huruf masyarakat meningkat.	Angka Melek huruf.	persen	92,6
3	Aksesibilitas pendidikan meningkat.	Rata-rata lama sekolah.	tahun	10
4	Daya saing pendidikan meningkat.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.	persen	5%
5	Harapan hidup masyarakat meningkat.	Angka Harapan Hidup.	tahun	74,41
6	Pendapatan masyarakat meningkat.	Pendapatan perkapita pertahun (ADHK) (Juta).	juta	7,4 jt
7	Ketimpangan antar wilayah menurun.	Indek Ketimpangan Antar Wilayah.	-	0,4515
8	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.	Indeks Ketimpangan Pendapatan.	-	0,295
9	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Jumlah wisatawan nusantara.	orang	2.754.981
		Jumlah wisatawan mancanegara.	orang	249.854

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
10	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	Hari	2,15hari
		Lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	Hari	2,25 hari
11	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	-	B+
12	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.	Opini pemeriksaan BPK.	-	WTP
13	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.	<i>Load factor</i> angkutan perkotaan meningkat.	Persen	36,57%
14	Kualitas lingkungan hidup meningkat.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	Persen	6,29%
15	Pemanfaatan ruang terkendali.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.	persen	63,42%

2.2.1 Rencana Anggaran Tahun 2014

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar **Rp3.466.745.462.269,77** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Rencana Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.663.950.552.723,10	48,00
2	Belanja Langsung	1.802.794.909.546,67	52,00
Jumlah		3.466.745.462.269,77	100

Sumber: APBD DIY, 2014

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Alokasi per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	24,627,783,900.00	1.37
2	Melek huruf masyarakat meningkat.	Angka Melek huruf.	27,658,905,075.00	1.53
3	Aksesibilitas pendidikan meningkat.	Rata-rata lama sekolah.	74,311,656,000.00	4.12
4	Daya saing pendidikan meningkat.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.	41,830,612,400.00	2.32
5	Harapan hidup masyarakat meningkat.	Angka Harapan Hidup.	96,403,548,896.00	5.35
6	Pendapatan masyarakat meningkat.	Pendapatan perkapita pertahun (ADHK) (Juta).	63,175,625,350.00	3.50
7	Ketimpangan antar wilayah menurun.	Indek Ketimpangan Antar Wilayah.	276,832,453,551.00	15.36
8	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.	Indeks Ketimpangan Pendapatan.	20,169,346,665.00	1.12
9	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	227,758,867,920.00	12.63

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
10	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	157,717,451,900.00	8.75
11	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	609,675,458,824.67	33.82
12	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.	Opini pemeriksaan BPK.	27,982,038,775.00	1.55
13	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.	<i>Load factor</i> angkutan perkotaan meningkat.	55,880,404,835.00	3.10
14	Kualitas lingkungan hidup meningkat.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	81,402,219,650.00	4.52
15	Pemanfaatan ruang terkendali.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.	17,368,535,805.00	0.96
Total Belanja langsung			1,802,794,909,546.67	100.00

Sumber : APBD DIY, 2014

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp **1.802.794.909.546,67** dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat dengan besaran 33,82%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Ketimpangan Antar Wilayah menurun yaitu sebesar 15,36%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun sebesar 1,12 % dan Pemanfaatan ruang terkendali. sebesar 0,96% dari total anggaran belanja langsung.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja Pemda DIY 2014

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Organisasi*
2. *Pencapaian Kinerja Lainnya*
3. *Realisasi Anggaran*

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemda DIY untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev adalah bagian kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤	Sangat Tinggi	
2.	76 ≤ 90	Tinggi	
3.	66 ≤ 75	Sedang	
4.	51 ≤ 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2014

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan

untuk mengukur kinerja Pemda DIY untuk tahun 2014. Pencapaian IKU Gubernur tahun 2014 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Tabel Pencapaian IKU Gubernur Tahun 2014

No	Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	63,46%	74.57%	65,73	88,15	70%	93,90
2.	Angka Melek huruf.	92,02	92,6	93,68%	101,17	95	98,61
3.	Rata-rata lama sekolah.	9,21	10	9,46	94,60	12	78,83
4.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.	0%	5%	5%	100	40%	12,50
5.	Angka Harapan Hidup.	74	74,41	73,74	99,10	74,18	99,41
6.	Pendapatan perkapita pertahun (ADHK) (Juta).	6,94	7,4	7,10	95,95	8,5	83,53
7.	Indek Ketimpangan Antar Wilayah.	0,4547	0,4515	0,4479	100,80	0,4445	99,25
8.	Indeks Ketimpangan Pendapatan.	0,3187	0,295	0,435	52,54	0,2878	48,85
9.	Jumlah wisatawan nusantara.	2.602.074	2.754.981	3.091.967	112,23	4.561.646	67,78
10.	Jumlah wisatawan mancanegara.	235.888	249.854	254.213	101,74	272.162	93,40
11.	Lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	1,59	2,15	1,58	73,49	2,6	60,77

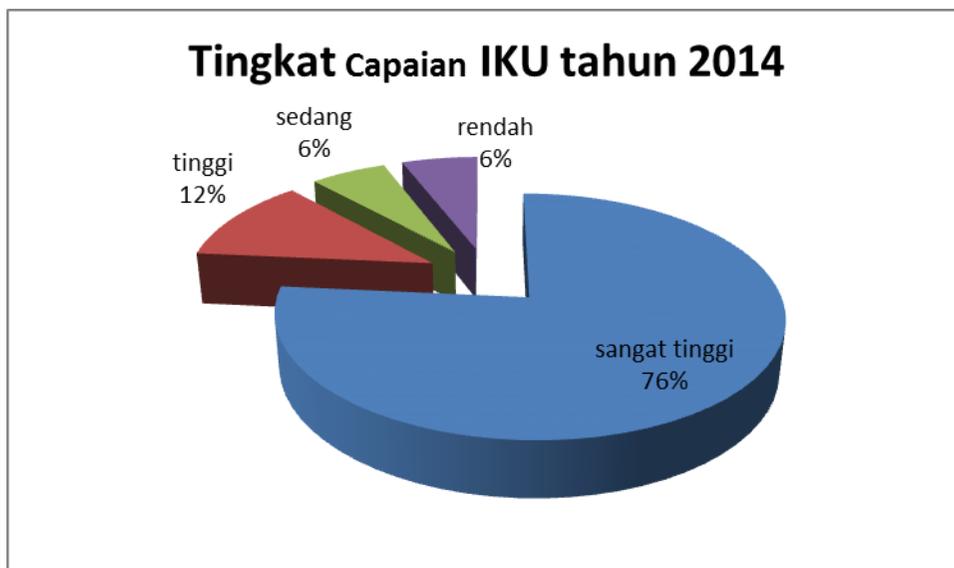
No	Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
12.	Lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	1,90	2,25	1,95	86,67	2,69	72,49
13.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	A	B+	A	133,33	A	100
14.	Opini pemeriksaan BPK.	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
15.	Load factor angkutan perkotaan meningkat.	34,49%	36,57%	37,82%	103,42	42,57%	88,84
16.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	3,14%	6,29%	6,29%	100	15,72%	40,01
17.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.	63,25%	63,42%	64,21%	101,25	90%	71,34%

Catatan:

- untuk sasaran 13 dan 14, merupakan capaian kinerja tahun 2013, karena realisasi kinerja tahun 2014 baru bisa dilihat pada akhir tahun 2015.

Dari 17 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah pada tahun 2014, **10 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih**. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU Pemda DIY yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2014, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi. Sedangkan, 7 indikator kinerja sasaran yang lainnya memiliki capaian 52,54% sampai dengan 99,10%.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 13 indikator menunjukkan capaian **sangat tinggi**, 2 indikator menunjukkan capaian yang **tinggi**, 1 indikator dengan capaian **sedang** dan hanya 1 indikator lainnya yang capaiannya masih **rendah**.



Gambar 3.1 Persentase Pencapaian IKU Gubernur Tahun 2014

Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan antara rencana dan realisasi kinerja untuk seluruh sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Gubernur Tahun 2014 Per Triwulan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya	persen	74,57	Triwulan 1	63	63	100
					Triwulan 2	63	63	100
					Triwulan 3	63	63	100
					Triwulan 4	74,57	65,73	88,15
2	Melek huruf masyarakat meningkat	Angka Melek huruf.	persen	92,6	Triwulan 1	92,02	92,02	100
					Triwulan 2	92,02	92,02	100
					Triwulan 3	92,02	92,02	100
					Triwulan 4	92,6	93,68	101,17
3	Aksesibilitas pendidikan meningkat.	Rata-rata lama sekolah.	persen	10	Triwulan 1	9,21	9,21	100
					Triwulan 2	9,21	9,21	100
					Triwulan 3	9,21	9,21	100
					Triwulan 4	10	9,46	94,6
4	Daya Saing Pendidikan meningkat.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.	persen	5	Triwulan 1	1	0	0
					Triwulan 2	2	0	0
					Triwulan 3	3	0	0
					Triwulan 4	5	5	100
5	Harapan hidup masyarakat meningkat.	Angka Harapan Hidup.	Tahun	74,41	Triwulan 1	74	74	100
					Triwulan 2	74	74	100
					Triwulan 3	74	74	100
					Triwulan 4	74,41	73,74	99,1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Prosentase
6	Pendapatan masyarakat meningkat. (ADHK)	Pendapatan perkapita pertahun.	juta	7,4	Triwulan 1	6,94	6,94	100
					Triwulan 2	6,94	6,94	100
					Triwulan 3	6,94	6,94	100
					Triwulan 4	7,4	7,1	95,95
7	Ketimpangan Antar Wilayah menurun.	Indek Ketimpangan Antar Wilayah.	indeks	0,4515	Triwulan 1	0,4547	0,4547	100
					Triwulan 2	0,4547	0,4547	100
					Triwulan 3	0,4547	0,4547	100
					Triwulan 4	0,4515	0,4479	100,8
8	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.	Indeks Ketimpangan Pendapatan.	indeks	0,295	Triwulan 1	0,3187	0,3187	100
					Triwulan 2	0,3187	0,3187	100
					Triwulan 3	0,3187	0,3187	100
					Triwulan 4	0,295	0,435	52,54
9	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Jumlah wisatawan nusantara	orang	2.754.981	Triwulan 1	524,856	625,888	119,25
					Triwulan 2	656,304	735,689	112,1
					Triwulan 3	758,255	815,634	107,57
					Triwulan 4	815,566	914,756	112,16
	Jumlah wisatawan mancanegara	orang	249,854	Triwulan 1	41,256	52,811	128,01	
				Triwulan 2	57,899	58,964	101,84	
				Triwulan 3	69,153	61,879	89,48	
				Triwulan 4	81,546	80,559	98,79	
10	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Lama tinggal wisatawan nusantara	hari	2,15	Triwulan 1	2	1,7	85
					Triwulan 2	2,1	1,8	85,71
					Triwulan 3	2,15	1,91	88,84
					Triwulan 4	2,15	1,58	73,49

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Prosentase
		Lama tinggal wisatawan mancanegara	hari	2,25	Triwulan 1	2	1,89	94,5
					Triwulan 2	2,1	1,99	94,76
					Triwulan 3	2,15	1,99	92,56
					Triwulan 4	2,25	1,95	86,67
11	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.(1=AA; 2=A; 3=B; 4=CC; 5=C; 6=D)	nilai	3	Triwulan 1	3	0	200
					Triwulan 2	3	0	200
					Triwulan 3	3	2	133,33
					Triwulan 4	3	3	100
12	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.	Opini pemeriksaan BPK. (WTP=1; WDP=2; Disclaimer=3)	opini	1	Triwulan 1	1	1	100
					Triwulan 2	1	1	100
					Triwulan 3	1	1	100
					Triwulan 4	1	1	100
13	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.	Load factor angkutan perkotaan meningkat.	persen	36,57	Triwulan 1	34,49	34,49	100
					Triwulan 2	34,49	34,49	100
					Triwulan 3	34,49	34,49	100
					Triwulan 4	36,57	37,82	103,42
14	Kualitas lingkungan hidup meningkat.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	persen	6,29	Triwulan 1	3,14	3,14	100
					Triwulan 2	1,05	1,05	100
					Triwulan 3	1,05	1,05	100
					Triwulan 4	1,05	1,05	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Prosentase
15	Pemanfaatan Ruang terkendali.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.	persen	63,42	Triwulan 1	1,86	1,79	96,24
					Triwulan 2	18,1	15,26	84,31
					Triwulan 3	53,23	21	39,45
					Triwulan 4	63,42	64,21	101,25

Beberapa IKU yang diuraikan di atas, penetapan target dan pengukuran realisasi triwulan dilakukan dengan menggunakan *proxy indicator* karena karakter indikator yang spesifik, termasuk tentang metode pengukuran indikator. Indikator yang dimaksud dan penjelasan mengapa dipergunakan *proxy indicator* adalah sebagai berikut:

1. Sebagian indikator merupakan indikator pada *level outcome*, dimana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, belum tentu akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja IKU secara langsung, seperti IKU yang pertama.
2. Sebagian indikator mempergunakan data yang dihasilkan oleh pengukuran secara periodik oleh lembaga di luar SKPD di lingkungan Pemda DIY, yang biasanya dilakukan sekali dalam setahun. Indikator yang masuk dalam kategori ini adalah Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Indeks Ketimpangan Wilayah, Indeks Ketimpangan Pendapatan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Opini Pemeriksaan BPK.

Proxy indicator yang dipakai adalah pencapaian sub-indikator yang menjadi penyumbang IKU. Pencapaian kinerja tahun 2014 dibandingkan dengan target kinerjanya, Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015, ditunjukkan tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Kinerja dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2014			2015	
				Target 2014	Capaian 2014	Realisasi	Target (RPJMD)	PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	Persen	74.57%	65,73	88,15	67,28	67,28
2	Melek huruf masyarakat meningkat.	Angka Melek huruf.	Persen	92,6	93,68%	101,17	93,25	93,85
3	Aksesibilitas pendidikan meningkat.	Rata-rata lama sekolah.	Persen	10	9,46	94,60	10,80	10,80
4	Daya Saing Pendidikan meningkat.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	Persen	5%	5%	100	10	10
5	Harapan hidup masyarakat meningkat.	Angka Harapan Hidup.	Tahun	74,41	73,74	99,10	73,54	73,81
6	Pendapatan masyarakat meningkat. (ADHK)	Pendapatan perkapita pertahun.	Juta	7,4	7,10	95,95	7,80	7,80
7	Ketimpangan Antar Wilayah menurun.	Indek Ketimpangan Antar Wilayah.	Persen	0,4515	0,4479	100,80	0,4501	0,4465
8	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.	Indeks Ketimpangan Pendapatan.	Persen	0,295	0,435	52,54	0,2898	0,2898
9	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Jumlah wisatawan nusantara.	Orang	2.754.981	3.091.967	112,23	2.877.493	3.581.860
		Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	249.854	254.213	101,74	261.053	261.053
10	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Lama tinggal wisatawan nusantara.	Hari	2.15	1,58	73,49	2,35	2,35
		Lama tinggal wisatawan mancanegara.	Hari	2,25	1,95	86,67	2,30	2,30
11	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		B+	A	133,33	A (78)	A (78)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2014			2015	
				Target 2014	Capaian 2014	Realisasi	Target (RPJMD)	PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.	Opini pemeriksaan BPK.		WTP	WTP	100	WTP	WTP
13	Layanan public meningkat, terutama pada penataan system transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.	<i>Load factor</i> angkutan perkotaan meningkat.	Persen	36,57%	37,82%	103,42	38,57	38,57
14	Kualitas lingkungan hidup meningkat.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	Persen	6,29%	6,29%	100	9,43	9,43
15	Pemanfaatan Ruang terkendali.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.	Persen	63,42%	64,21%	101,25	64,25	70

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.

1. Sasaran Peran Serta dan Apresiasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat

Semenjak penerapan UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, urusan kebudayaan merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan signifikan. Posisi kebudayaan menjadi semakin kuat karena kebudayaan menjadi payung atau pengarusutamaan pembangunan di segala bidang.

Terkait dengan sasaran di atas, aspek penting dari derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya bisa dilihat antara lain dari jumlah desa budaya yang maju, selain juga keberadaan organisasi budaya yang berkembang dengan baik.

Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Peran Serta dan Apresiasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat

No	Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	63,46%	74.57%	65,73	88,15	70%	93,90

Untuk tahun 2014, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang **tinggi**, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 93.90% dari target pada akhir RPJMD (2017).

Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya memiliki peningkatan capaian dibandingkan tahun 2013. Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh dana keistimewaan. Belum optimalnya capaian indikator tersebut dibandingkan target pada 2014, dipengaruhi oleh keterlambatan penyaluran dana keistimewaan dari pemerintah pusat. Permenkeu yang mengatur alokasi dana keistimewaan tahun 2014 terbit tidak tepat waktu, sehingga pelaksanaan pembinaan desa budaya dan organisasi budaya menjadi kurang optimal.

Pada tahun 2014 ini, telah disusun Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan DIY tahun 2015-2025. Dokumen ini disusun dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan acuan bersama untuk memajukan kebudayaan, baik bagi pemerintah, masyarakat maupun juga dunia usaha. Beberapa point penting dari kemajuan pembangunan kebudayaan adalah pada aspek kelembagaan, dimana direncanakan pada tahun 2015 Dinas Kebudayaan DIY akan menjadi Badan Kebudayaan DIY dengan jumlah dukungan kualitas dan kuantitas personil, serta sistem kelembagaan yang lebih memadai.



Gambar 3.2 Tim DIY pada parade lagu daerah di Jakarta

Maraknya event seni budaya bisa dilihat dari semakin banyaknya event budaya yang dilaksanakan seperti festival, karnaval, gelar budaya, pasar rakyat dan event-event lainnya baik yang bertaraf lokal, nasional maupun internasional. Menarik untuk dicermati bahwa berbagai event ini diselenggarakan baik oleh swasta, masyarakat maupun pemerintah. Beberapa event budaya tersebut antara lain adalah: Pekan Budaya

Tionghoa, Gelar Budaya Jogja, Bienalle, FKY, Gelar Ketoprak, Jogja Fashion Week, Sekaten, Kirab Budaya, Festival Adat Istiadat, Festival Dalang Anak, Festival Film Indie, Festival Desa Budaya, Pagelaran Musik, Festival Budaya Kotagede.

Selain itu, di wilayah DIY terdapat 517 BCB yang sudah mendapatkan SK Penetapan Menteri, Gubernur dan Walikota, dan SK Penghargaan Gubernur dan Walikota.

Pelestarian BCB di tahun 2014 terwujud pada kegiatan pelestarian dan pengelolaan BCB di DIY, revitalisasi situs purbakala, pemugaran dan penataan bangunan-bangunan dan perlengkapannya di Kraton dan Puro Pakualaman. Realisasi indikator “Jumlah Benda Cagar Budaya (BCB) tidak bergerak yang tertangani” di tahun 2014 tercapai 100,81% dari target. Keberhasilan Dinas Kebudayaan dalam memenuhi target dalam pelestarian cagar budaya tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan pendanaan serta peran SDM Kebudayaan yang ada di Dinas Kebudayaan dan kesadaran yang tinggi dari masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. Dengan ketersediaan anggaran yang ada serta adanya pembagian tanggungjawab dalam pengelolaan Cagar Budaya di DIY dengan SKPD di Kab/kota, maka diproyeksikan peningkatan persentase BCB yang tertangani setiap tahunnya meningkat 5% lebih tinggi dari yang direncanakan. Sehingga pada akhir tahun 2017 diharapkan indikator ini dapat terealisasi sebesar 90%.

Pada tahun 2014, kegiatan fasilitasi misi kesenian terdiri dari beberapa kegiatan yang menunjang tercapainya indikator tersebut yang didanai dari Dana Keistimewaan. Pada tahun 2014, antara lain bisa dilihat dari pembangunan dan peresmian rumah joglo di Slovenia, pemberian seperangkat gamelan yang diberi nama “Jali Roso” untuk *National Concert Hall Dublin*, misi kebudayaan ke Denizli International Festival di Turki, dan misi-misi kebudayaan di beberapa negara lain yang sudah memiliki perjanjian kerjasama antara lain Canberra, Suriname, Nanning (China), dan Tokyo.

Interaksi dan pertumbuhan Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan juga bisa dilihat dari banyaknya organisasi kesenian di DIY. Nampak dalam tabel berikut, adalah kecenderungan peningkatan jumlah organisasi kesenian dari tahun ke tahun, terkecuali untuk perusahaan bioskop.

Tabel 3.6 Jumlah Organisasi Kesenian di DIY Tahun 2010-2014

Jenis Data	2010	2011	2012	2013	2014
Organisasi Sinematografi	14	14	14	42	42
Organisasi Seni Pertunjukkan	4.219	4.269	4.269	5.226	5.241
Organisasi Seni Rupa	25	25	25	16	17
Perusahaan Film	10	10	10	20	20
Perusahaan Bioskop	4	4	4	2	3
Perusahaan Persewaan dan Penjualan Film	37	37	37	38	38

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Permasalahan:

- (1) Peninggalan warisan budaya fisik (*tangible*) saat ini terancam keberadaannya. Hal ini menjadi salah satu persoalan yang serius, sehingga diperlukan sinergi dan koordinasi antar berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga benda-benda warisan budaya tersebut.
- (2) Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa;
- (3) Lemahnya ketahanan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, dalam kehidupan masyarakat. Penggerusan nilai-nilai budaya makin terlihat, yang menjadikan adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra serta praktek kehidupan masyarakat telah mengalami banyak pergeseran.
- (4) Keragaman kondisi organisasi budaya, yang memerlukan strategi penguatan organisasi yang berbeda-beda. Keragaman ini merupakan kondisi yang tidak bisa dinafikkan, dimana karakter dan perkembangan masing-masing organisasi adalah unik.

Solusi:

- (1) Percepatan pelaksanaan registrasi, penetapan, dan pelestarian warisan cagar budaya baik bergerak maupun tidak bergerak
- (2) Penguatan jejaring *stakeholders* yang meliputi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, swasta, dan lembaga keuangan dalam hal peningkatan penegakan, pengawasan, dan kesadaran hukum pelestarian budaya
- (3) Menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan aset-aset budaya

2. Sasaran Melek Huruf Masyarakat Meningkat

Penuntasan buta aksara merupakan bagian dari fokus pembangunan untuk peningkatan *human capital*. Hal ini mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit



Gambar 3.3 Kegiatan Belajar Masyarakat

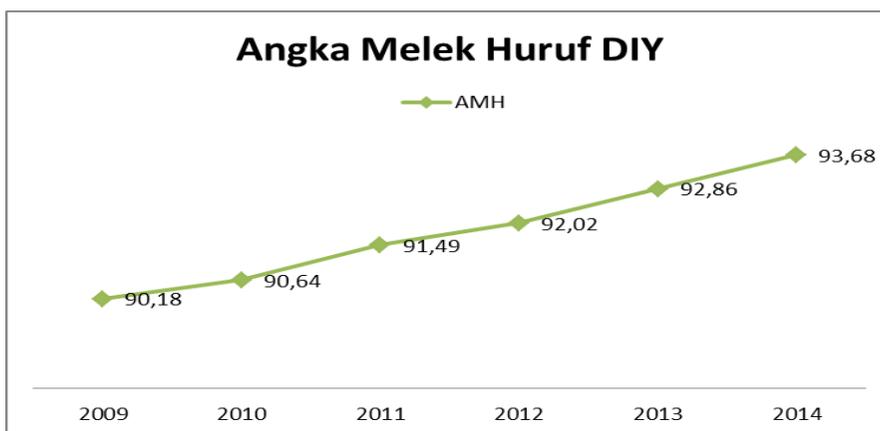
pendidikan terhadap tujuan pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial. Terlebih lagi, dalam RPJMD DIY 2012-2017, penegasan akan pentingnya pendidikan juga bisa ditemukan dalam misi 1 tentang membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan, dimana peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan telah menjadi arah bagi pembangunan di DIY.

Dalam tahun 2014, realisasi pencapaian sasaran angka melek huruf telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini, realisasi kinerja tahun 2014 menunjukkan bahwa angka melek huruf telah melebihi target yang ditetapkan, dengan pencapaian sebanyak 93,68% dari target 92,6%, atau sebanyak 101,17%. Pencapaian ini menunjukkan **kinerja yang sangat tinggi** untuk sasaran kedua ini. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 98,61% dari rencana kinerja tahun 2017.

Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Melek Huruf Masyarakat Meningkat

Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Angka Melek huruf.	92,02	92,6	93,68%	101,17	95	98,61

Bila melihat data historis dalam kurun 2009-2014, angka melek huruf DIY selama kurun waktu 2009-2014 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2009 capaian angka melek huruf DIY tercatat sebesar 90,18% kemudian naik menjadi 90,84% di tahun 2010 dan menjadi 91,49% dan 92,02% di tahun 2013. Sedangkan capaian di tahun 2014 mencapai 93,68%.

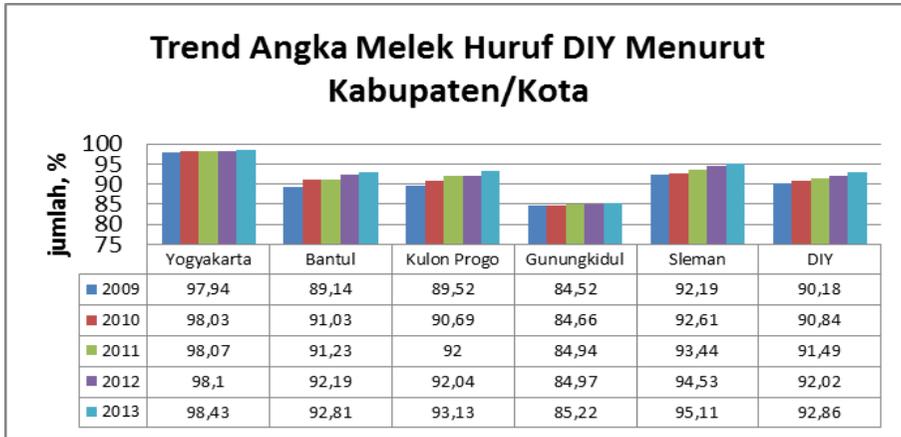


Sumber: *Disdikpora DIY 2014*

Gambar 3.4 Persentase Angka Melek Huruf DIY, 2009-2014

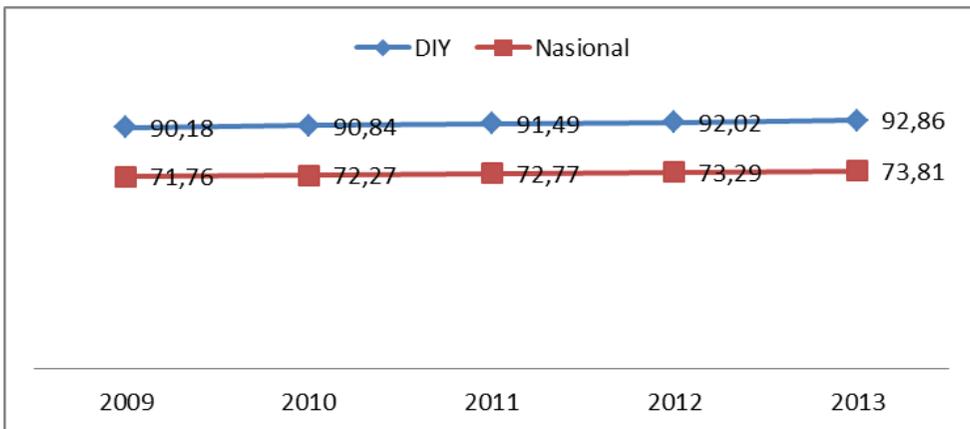
Jika dilihat data per kabupaten/kota, capaian angka melek huruf tahun 2013 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 98,43% sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 85,22%.

Tren pencapaian angka melek huruf di kelima kabupaten/kota dalam tahun 2009 (tahun ke-1) hingga tahun 2013 (tahun ke-5) menunjukkan kecenderungan peningkatan angka melek huruf dari tahun ke tahun. Selengkapnya bisa dilihat dalam grafik berikut ini:



Gambar 3.5 Tren Angka Melek Huruf di DIY, 2009-2013

Bila dibandingkan dengan tingkat capaian nasional maka capaian angka melek huruf DIY masih diatas rata rata nasional.



Gambar 3.6 Perbandingan Angka melek Huruf DIY dengan Nasional

Capaian melek huruf ini juga menggambarkan perbaikan pada sarana pendidikan dan peningkatan pengetahuan masyarakat, seperti perpustakaan. Pada tahun 2014, perpustakaan desa yang mendapatkan bantuan ditargetkan sebesar 70%. Artinya, dari total 438 desa yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan terdapat 306 desa yang mendapatkan bantuan sarana prasarana perpustakaan. Melalui APBD DIY Tahun Anggaran 2014, terdapat 30 desa yang mendapat bantuan sarana prasarana perpustakaan. Namun demikian, hingga akhir tahun 2014 tercatat 380 desa yang telah mendapatkan bantuan sarana prasarana perpustakaan. Dengan demikian, realisasi tahun 2014 mencapai 86,76 % yang

berarti melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 70%. Pelampauan target ini disebabkan adanya dukungan dana Dekonsentrasi dari Perpustakaan Nasional RI.

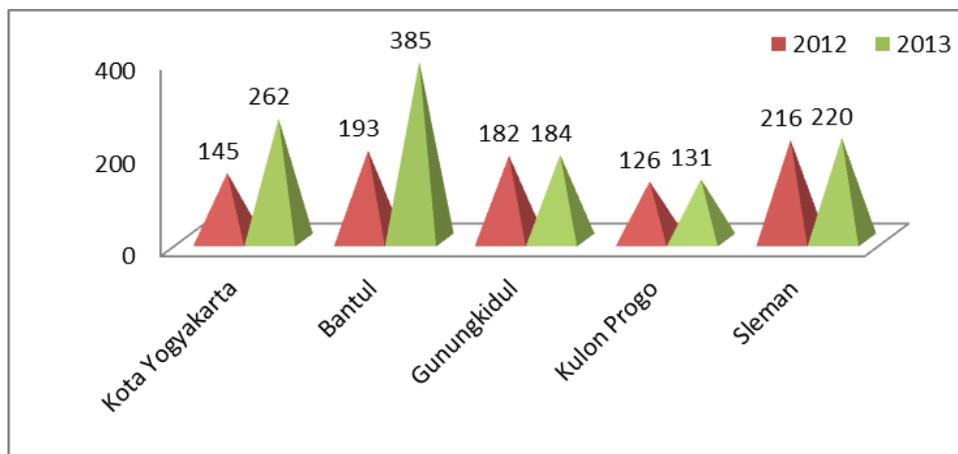
Data lain yang juga relevan adalah jumlah pengunjung perpustakaan. Realisasi hingga akhir Tahun 2014, terdapat 702.270 orang (19.54% dari total jumlah penduduk) yang berkunjung ke perpustakaan, baik di perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY melalui BPAD DIY dan perpustakaan yang terdapat di kabupaten/kota selama satu tahun. Beberapa perbaikan seperti diluncurkannya *Jogja Learning Park* –unit layanan perpustakaan dengan konsep buku, sarana internet dan sarana pendukung lain- juga menyumbang pada peningkatan akses baca dan pada gilirannya, menyumbang pada peningkatan angka melek huruf.

Peningkatan angka melek huruf juga terkait dengan perluasan dan peningkatan pendidikan non formal. Beberapa data terkait dengan pendidikan non formal antara lain adalah sebagai berikut:

- a. PKBM dan TBM berjumlah 558 buah, dengan peserta didik 10.224 dan jumlah tutor 558 orang.
- b. PAUD berjumlah 3.139 buah dengan peserta didik sebanyak 114.991 anak.

Kondisi pencapaian angka melek huruf yang positif menunjukkan hasil dari program/ kegiatan yang telah dilakukan, yang menggambarkan bukan hanya peran dari pemerintah. Capaian ini juga menunjukkan kontribusi penting dari pihak non pemerintah seperti swasta dan organisasi masyarakat yang juga menjadi penyelenggara pendidikan di berbagai jenjang.

Beberapa data berikut menggambarkan bagaimana ketersediaan dan perbaikan-perbaikan telah dicapai dalam upaya peningkatan angka melek huruf. Salah satunya adalah jumlah perpustakaan di wilayah DIY. Di kelima wilayah, jumlah perpustakaan menunjukkan peningkatan pada tahun 2014. Ketersediaan perpustakaan ini bisa menjadi faktor penting untuk meningkatkan tradisi baca di masyarakat.



Sumber : BPAD DIY

Gambar 3.7 Jumlah Perpustakaan di DIY per Kabupaten/Kota

Permasalahan:

1. Banyaknya peserta didik yang masuk kategori miskin atau tidak mampu secara ekonomi. Kemiskinan menjadi salah satu persoalan penting, yang dalam kaitan dengan pendidikan, akan membatasi akses peserta didik terhadap pendidikan
2. Kualitas SDM pendidikan masih memerlukan peningkatan kompetensi dan profesionalitas di bidang pembelajaran. Aspek penting dari tenaga pendidikan bukan hanya sekedar kecukupan jumlah, yang dari tahun ke tahun sudah menunjukkan perkembangan yang positif. Kualitas SDM pendidikan menjadi kunci yang akan menentukan kualitas pendidikan yang dihasilkan.

Solusi:

1. Untuk menjawab persoalan kapasitas ekonomi yang terbatas, skema bantuan pendidikan menjadi salah satu jawabannya. Pengembangan bantuan pendidikan berupa Kartu Cerdas, beasiswa rawan putus sekolah/kembali ke sekolah, pemberian bantuan biaya pendidikan mahasiswa, pemberian Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin untuk pelajar dari keluarga tidak mampu, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) adalah beberapa solusi yang sudah dilakukan dan perlu terus dikembangkan ke depan
2. Peningkatan kualitas SDM di bidang pendidikan antara lain dilakukan dengan:
 - a) Memfasilitasi peningkatan kompetensi dan sertifikasi pendidik;
 - b) Pemberdayaan (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) (MGMP) / (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) (MKKS) / (Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kejuruan) (K3SK).

3. Sasaran Aksesibilitas Pendidikan Meningkatkan

Perluasan akses pendidikan menjadi kunci untuk pemenuhan hak warga negara dalam bidang pendidikan, seperti juga indikator pendidikan lain yang penting seperti angka melek huruf. Hal ini karena berbagai hambatan baik teknis maupun non teknis, menjadikan pemenuhan hak atas pendidikan yang sudah dijamin oleh konstitusi bisa jadi tidak terpenuhi.



Gambar 3.8 Pembelajaran Siswa di Luar Kelas

Sasaran ini menegaskan bahwa pemerintah akan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan untuk

memastikan pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pemda DIY telah menetapkan indikator peningkatan rata-rata lama sekolah sebagai penanda perluasan akses pendidikan. Rata-rata lama sekolah ini menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

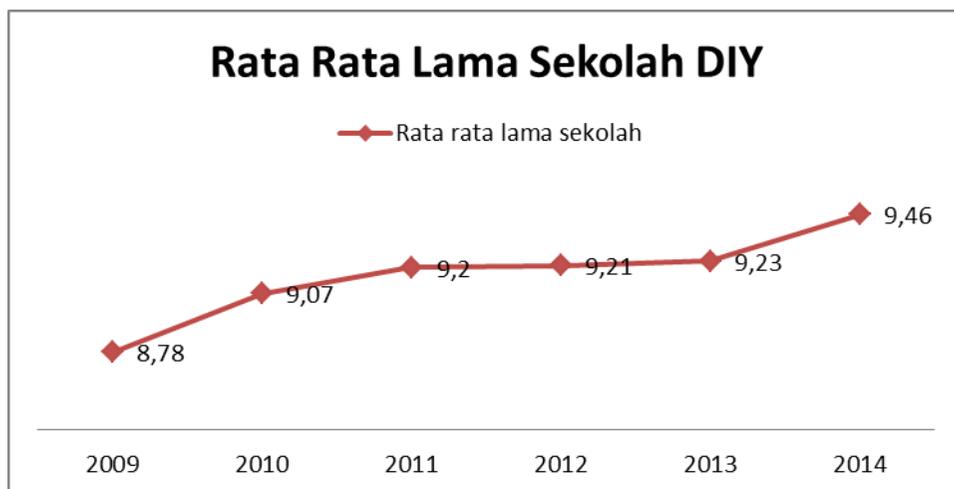
Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran ini menunjukkan bahwa capaian kinerjanya **sangat tinggi**, karena mencapai 94,60% dari target yang dirumuskan. Pada tahun 2014, rata-rata lama sekolah adalah 9,46 tahun, dibandingkan dengan target sebanyak 10 tahun. Pencapaian ini juga telah mencapai 78,83% dari rencana target kinerja pada akhir RPJMD pada tahun 2017 yaitu rata-rata lama sekolah sebesar 12 tahun.

Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Capaian Aksesibilitas Pendidikan Meningkatkan

Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Rata-rata lama sekolah.	9,21	10	9,46	94,60	12	78,83

Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di DIY, selama 2009-2013 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu dari 8,78 tahun di tahun 2009 menjadi 9,23 di tahun 2013 (setara SLTA). Peningkatan rata-rata lama sekolah di DIY ini dapat

dimaknai bahwa penduduk DIY semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Pada tahun 2014, kinerjanya menunjukkan peningkatan dengan menjadi 9,46. Selengkapnya bisa dilihat dalam grafik berikut ini:



Sumber: BPS DIY, 2014

Gambar 3.9 Tren Rata Rata lama Sekolah DIY

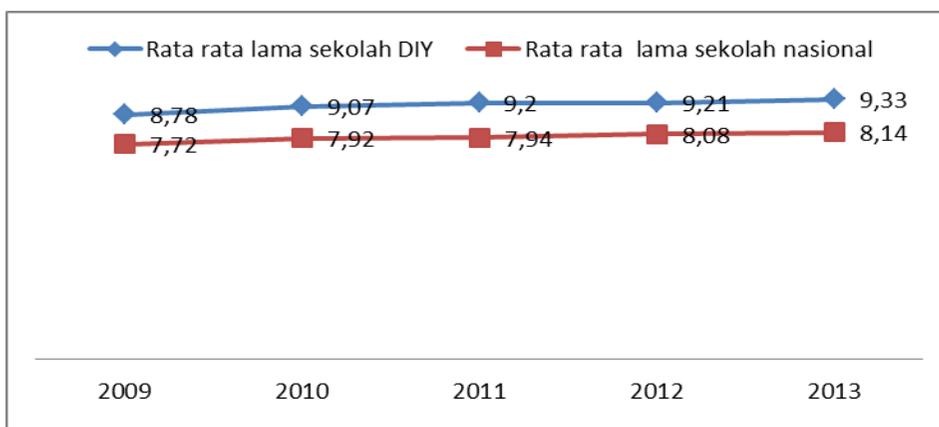
Apabila dilihat data per kabupaten/kota, capaian rata-rata lama sekolah tahun 2013 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 11,56 tahun sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 7,79 tahun. Adanya disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan di DIY. Capaian rata-rata lama sekolah DIY tahun 2009-2013 menurut kabupaten/kota di DIY dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.9 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013

Kab/Kota	Rata-rata lama Sekolah				
	2009	2010	2011	2012	2013
Yogyakarta	11,48	11,48	11,52	11,56	11,56
Bantul	8,64	8,82	8,92	8,95	9,02
Kulon Progo	7,89	8,20	8,37	8,37	8,37
Gunungkidul	7,61	7,65	7,70	7,70	7,79
Sleman	10,18	10,30	10,51	10,52	10,55
DIY	8,78	9,07	9,20	9,21	9,33

Sedangkan apabila dilihat dari data pilah rata-rata lama sekolah menurut jenis kelamin, rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Untuk tahun 2010, rata-rata lama sekolah laki-laki di DIY 9,73 tahun sedangkan rata-rata lama sekolah bagi perempuan 8,45 tahun. Sedangkan untuk tahun 2011, rata-rata lama sekolah laki-laki di DIY 9,78 tahun sedangkan rata-rata lama sekolah bagi perempuan 8,67 tahun. Kesenjangan ini bisa menjadi gambaran bahwa persoalan pemerataan akses yang setara masih menjadi tantangan bagi DIY. Hal ini bisa berkorelasi dengan berbagai faktor sosial seperti pandangan budaya yang masih memprioritaskan pendidikan bagi anak laki-laki dibandingkan anak perempuan karena terkait dengan peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Pengembangan skema kebijakan untuk menjawab persoalan kesenjangan ini perlu menjadi agenda yang lebih kuat di masa depan.

Bila dibandingkan dengan nasional, rata rata lama sekolah DIY selalu berada diatas rata rata lama sekolah tingkat nasional. Bahkan sudah melampaui 9 tahun. Artinya DIY telah berhasil melaksanakan Wajib Belajar 9 tahun. Hal ini dikuatkan dengan kebijakan rintisan wajib belajar 12 tahun yang sedang dikembangkan oleh DIY dan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.



Sumber: BPS DIY

Gambar 3.10 Perbandingan Rata Rata Lama Sekolah DIY dengan Nasional

Akses pendidikan juga bisa digambarkan oleh beberapa data lain seperti Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Selain itu, juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau, seperti data tentang rasio antara jumlah sekolah dengan jumlah penduduk atau sarana dan prasarana pendidikan yang lain. Bagian berikut akan menguraikan situasi untuk beberapa aspek tersebut di atas

a. Angka Partisipasi Kasar

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK DIY tahun 2009/2010 – 2012/2013 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.10 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) DIY Menurut Kabupaten/Kota Periode 2009/2010 s/d Periode 2012/2013

Kab/Kota	Angka Partisipasi Kasar														
	2009/2010			2010/2011			2011/2012			2012/2013			2013/2014		
	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata
APK Tingkat SD															
Yogyakarta	150,12	131,06	140,25	149,32	129,88	139,29	148,87	129,09	138,63	141,59	138,60	140,13	138,53	136,97	137,77
Bantul	112,74	96,62	104,39	113,61	96,52	104,76	114,05	97,14	105,29	108,46	103,21	105,90	108,93	104,08	106,57
Kulon Progo	109,52	103,67	106,64	109,55	104,20	106,92	109,22	103,87	106,58	108,01	103,62	105,87	106,99	102,47	104,79
Gunungkidul	106,38	95,23	100,75	106,10	94,68	100,33	105,77	94,36	100,01	105,67	94,04	99,80	98,18	87,78	92,93
Sleman	142,58	96,98	116,43	117,70	115,22	116,50	118,58	114,37	116,53	119,63	114,93	117,34	119,01	114,50	116,81
DIY	122,74	101,30	111,44	116,78	106,19	111,46	116,97	105,95	111,43	114,89	108,56	111,78	112,74	106,91	109,88
APK Tingkat SLTP															
Yogyakarta	142,45	131,65	136,93	136,90	125,35	131,00	147,01	135,77	141,25	148,73	148,82	148,78	152,19	150,09	151,14
Bantul	106,21	106,47	106,34	106,12	105,68	105,90	110,21	109,09	109,66	103,13	109,78	106,38	104,46	109,40	106,87
Kulon Progo	122,78	113,43	118,07	122,66	113,32	117,95	125,20	115,85	120,49	120,36	128,43	124,28	118,80	126,67	122,62
Gunungkidul	118,86	107,11	112,92	116,92	107,10	111,96	111,55	101,85	106,65	105,04	103,65	104,34	113,05	111,15	112,09
Sleman	128,89	102,28	114,43	115,49	113,34	114,43	114,75	112,57	113,68	112,83	114,65	113,72	113,25	114,46	113,84

Kab/Kota	Angka Partisipasi Kasar														
	2009/2010			2010/2011			2011/2012			2012/2013			2013/2014		
	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata
DIY	121,50	109,69	115,47	117,01	111,67	114,36	118,16	112,80	115,50	113,99	116,90	115,43	116,40	118,36	117,37
APK Tingkat SLTA															
Yogyakarta	137,23	125,66	131,23	134,69	125,72	130,04	134,52	124,81	129,49	122,67	125,82	124,23	121,47	126,16	123,80
Bantul	83,96	80,98	82,45	81,23	82,76	81,98	85,63	86,26	85,94	84,74	85,57	85,15	87,68	89,19	88,43
Kulon Progo	85,13	90,98	87,84	86,41	101,07	93,19	85,63	101,07	92,77	97,59	89,59	93,63	98,43	93,25	95,86
Gunungkidul	72,59	65,39	68,96	75,05	67,77	71,37	74,44	68,06	71,22	72,06	68,83	70,46	74,51	69,66	72,11
Sleman	85,12	68,64	75,72	75,02	78,19	76,61	74,70	78,39	76,56	75,27	79,47	77,35	76,37	76,94	76,66
DIY	91,43	83,04	87,06	87,92	88,32	88,12	88,57	89,00	88,79	87,83	88,24	88,04	89,23	88,92	89,07

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY

Dari periode 2009/2010 sampai dengan periode 2014/2015, beberapa catatan terkait APK adalah:

- Capaian APK SD DIY menunjukkan peningkatan dari 111,44 menjadi 111,46. Namun pada periode 2011/2012 terjadi penurunan dari 111,46-menjadi 109,88 di periode 2013/2014.
- Apabila dilihat dari capaian kabupaten/kota, periode 2012/2013 APK SD seluruh Kabupaten/Kota di DIY kecuali Kabupaten Gunungkidul mencapai di atas 100%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa banyak anak yang sekolah di SD belum memasuki pendidikan SD.
- Begitu pula APK SLTP juga diatas 100%. Karena banyak kita jumpai anak-anak yang usianya belum genap 7 tahun sudah sekolah SD dan imbasnya saat masuk SMP usianya kurang dari 13 tahun. Hal ini menyebabkan APK SD dan SMP diatas 100%. Sementara APK SLTA cenderung lebih rendah, hal ini diduga banyak anak tamatan SLTP yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTA.
- Sedangkan untuk capaian APK SLTP DIY, terjadi penurunan dari periode 2011/2012 sebesar 115,50 menurun menjadi 115,43 di periode 2012/2013. Capaian APK SLTP tertinggi periode 2013/2014 adalah Kota Yogyakarta sebesar 151,14 dan terendah adalah Kabupaten Bantul sebesar 106,87.
- Capaian APK SLTA DIY juga mengalami penurunan dari 88,79 di periode 2011/2012 menurun menjadi 88,04 di periode 2012/2013. Capaian APK SLTA tertinggi periode 2013/2014 adalah Kota Yogyakarta sebesar 123,80 dan terendah Kabupaten Gunungkidul sebesar 72,11.
- Dari aspek gender, APK di DIY menunjukkan fakta yang menarik. Di beberapa jenjang pendidikan, APK laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan APK perempuan. Namun data historis menunjukkan dinamika, dimana untuk beberapa tahun, APK perempuan melebihi APK laki-laki, seperti di jenjang SLTP pada tahun 2012/2013, dan di jenjang SLTP sejak 2010/2011 hingga sekarang. Dinamika ini perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat apakah makna dari situasi ini, seperti terkait dengan putus sekolah bagi anak laki-laki dan perempuan dan apakah faktor yang menyebabkannya.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) DIY tingkat SD, SLTP, dan SLTA periode 2009/2010 sampai dengan periode 2012/2013 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.11 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurut Kabupaten/Kota Periode 2009/2010 s/d Periode 2012/2013

Kab/Kota	Angka Partisipasi Murni														
	2009/2010			2010/2011			2011/2012			2012/2013			2013/2014		
	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata
APM Tingkat SD															
Yogyakarta	130,30	113,41	121,55	130,49	113,29	121,59	131,45	113,66	122,24	124,29	121,49	122,93	122,93	121,14	122,06
Bantul	97,97	84,47	90,98	99,06	84,86	91,71	99,94	85,48	92,45	94,62	90,35	92,54	95,46	90,97	93,27
Kulon Progo	93,52	89,01	91,30	93,33	89,53	91,46	93,05	89,26	91,18	92,24	89,53	90,92	91,84	88,87	90,40
Gunungkidul	93,77	84,29	88,98	93,63	83,90	88,72	93,35	83,65	88,45	93,35	83,65	88,45	85,97	77,73	81,81
Sleman	121,99	83,35	99,83	101,77	99,92	100,87	103,12	99,96	101,58	103,31	99,77	101,59	103,52	99,86	101,74
DIY	106,26	88,03	96,65	101,31	92,54	97,15	102,19	92,93	97,53	100,02	94,97	97,54	98,51	93,69	96,14
APM Tingkat SLTP															
Yogyakarta	102,01	94,22	98,03	85,91	90,65	95,70	111,93	100,10	105,87	109,08	102,88	105,99	109,42	105,11	107,27
Bantul	81,11	80,74	80,93	71,29	72,16	71,71	74,34	74,99	74,65	75,51	76,06	75,78	76,68	77,43	77,05
Kulon Progo	90,33	85,73	88,01	90,24	85,64	87,92	86,85	82,13	84,47	81,94	83,19	82,55	81,68	83,17	82,41
Gunungkidul	80,87	73,72	77,26	81,49	75,06	78,24	77,05	70,95	73,97	74,55	68,46	71,47	83,49	77,24	80,33
Sleman	97,12	77,83	86,64	82,92	80,58	81,77	80,31	78,96	79,65	82,51	81,15	81,85	83,15	82,08	82,62

Kab/Kota	Angka Partisipasi Murni														
	2009/2010			2010/2011			2011/2012			2012/2013			2013/2014		
	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata
DIY	88,88	80,79	84,78	80,85	79,23	81,06	82,78	79,37	81,08	82,21	80,01	81,13	84,61	82,85	83,74
APM Tingkat SLTA															
Yogyakarta	102,69	89,63	95,92	90,49	86,04	88,18	89,94	86,42	88,11	86,83	90,50	88,65	89,42	91,89	90,65
Bantul	63,20	56,48	59,80	55,54	52,02	53,81	64,90	59,72	62,36	66,93	59,07	63,04	66,00	67,03	66,51
Kulon Progo	56,89	55,18	56,10	62,05	65,03	63,43	69,60	71,89	70,66	69,60	64,34	66,99	72,36	66,69	69,55
Gunungkidul	54,85	43,61	49,18	52,47	47,56	49,99	54,48	49,55	51,99	53,45	50,49	51,99	54,38	51,04	52,73
Sleman	54,78	46,89	50,28	53,02	55,09	54,06	52,91	55,15	54,04	52,77	57,39	55,06	54,27	52,79	53,52
DIY	65,44	56,65	60,87	60,94	59,66	60,30	64,31	62,58	63,45	64,13	63,17	63,65	65,36	64,22	64,79

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY

Secara umum dalam lima periode terakhir, situasinya adalah sebagai berikut:

- Terjadi peningkatan APM di DIY untuk tingkat SD dan SMA.
- Menurut kabupaten/kota di DIY capaian APM tingkat SD periode 2013/2014 tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 122,06% dan terendah di Kabupaten Gunungkidul sebesar 81,81%.
- Untuk tingkat SMP, APM mengalami fluktuasi dari tahun 2010/2011 ke periode 2012/2013, setelah turun pada periode 2010/2011 namun kemudian membaik pada periode selanjutnya. Capaian APM tingkat SLTP periode 2013/2014 tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 107,27% dan terendah di Kabupaten Gunungkidul sebesar 80,33%.
- Untuk APM tingkat SLTA DIY, dalam lima periode terakhir mengalami kenaikan, walaupun sempat menurun pada periode 2010/2011. Capaian tertinggi APM tingkat SLTA periode 2013/2014 adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar 90,65% dan terendah di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 52,73%.
- Di semua daerah dan semua jenjang pendidikan, APM laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan APM perempuan. Di jenjang SD, pada tahun 2013/2014, APM laki-laki adalah sebanyak 98,51% sementara perempuan hanya 93,69%. Begitu juga di tingkat SLTP, APM laki-laki adalah sebanyak 84,61% sementara APM perempuan adalah 82,85%. Di tingkat SLTA, angkanya adalah 65,36% untuk laki-laki dan 64,22% untuk anak perempuan. Seperti juga di banyak daerah, isu kesenjangan gender dalam pendidikan menjadi tantangan bagi Pemda DIY.

c. Angka Putus Sekolah

Isu lain yang menjadi tantangan bagi peningkatan akses pendidikan adalah fenomena putus sekolah. Data tentang anak putus sekolah tahun 2014 adalah sebagai berikut

Data tentang anak yang putus sekolah di DIY pada tahun 2013/2014 paling banyak terjadi pada jenjang SLTP/MTs, selanjutnya pustus sekolah SMK ada di urutan kedua dengan 34% disusul tingkat SD. Angka putus sekolah paling rendah terjadi di tingkat SLTA/SMA.

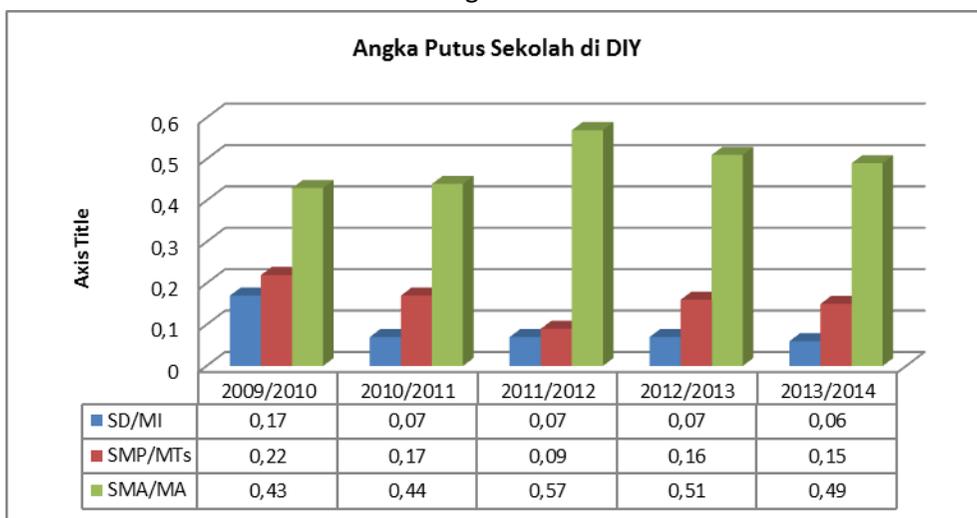
Data putus sekolah dari tahun 2008/2009 hingga 2012/2013 menunjukkan beberapa kecenderungan berikut ini

- Pada jenjang SD/MI, terjadi fluktuasi angka putus sekolah dari 0,06% pada tahun 2008/2009 menjadi 0,17% pada tahun 2009/2010, namun turun lagi menjadi 0,07% pada tahun 2010/2011 hingga dan pada tahun 2013/2014 meningkat tajam menjadi 22,7%
- Pada jenjang SLTP/MTS, fluktuasi juga terjadi karena pada tahun 2009/2010, meningkat menjadi 0,22% dari sebelumnya hanya 0,18%, dan turun lagi

menjadi 0,17% pada tahun 2010/2011, 0,09% pada tahun 2011/2012 dan naik lagi menjadi 0,16% pada tahun 2012/2013.

- Pada jenjang SLTA, trennya menunjukkan pola yang perlu menjadi perhatian serius karena terus naik dari tahun ketahun. Bila pada tahun 2008/2009 adalah sebesar 0,24%, pada tahun 2009/2010 naik menjadi 0,43%, kemudian 0,44% pada tahun 2010/2011, naik kembali menjadi 0,57% pada tahun 2011/2012, namun kemudian turun menjadi 0,51% pada tahun 2012/2013.

Fluktuasi ini bisa dilihat dalam grafik berikut ini:



Sumber: BPS DIY, 2014

Gambar 3.11 Angka Putus Sekolah di DIY Per Jenjang Pendidikan

Beberapa kasus memang terkait dengan faktor ekonomi, seperti banyaknya anak-anak yang terpaksa bekerja untuk mencari nafkah pada usia sekolah. Namun banyak faktor lain yang menjadi penjelas putus sekolah, seperti ketersediaan akses dan fasilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau. Saat ini, kita juga dihadapkan pada fenomena meningkatnya putus sekolah pada anak karena kejadian kehamilan yang tidak dikehendaki pada anak-anak. Kajian yang lebih komprehensif perlu dilakukan untuk menjawab akar persoalan dari angka putus sekolah ini.

d. Ketersediaan Sekolah

Bagian penting dari perluasan akses pendidikan adalah ketersediaan sarana pendidikan yang memadai, seperti gedung sekolah yang layak bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Data dalam tabel 3.12 di bawah ini menunjukkan bahwa untuk jenjang SD/MI, rasio gedung sekolah per 10.000 penduduk telah mengalami peningkatan pada tahun 2010, dari sebelumnya 71/10.000 penduduk menjadi 73/10.000 penduduk. Kondisi ini terjaga hingga tahun 2013. Namun untuk jenjang SLTP, mengalami fluktuasi karena mengalami penurunan pada tahun 2010 dari 37/10.000 penduduk menjadi 36/10.000 penduduk, walaupun sudah meningkat dan menjadi lebih baik pada tahun 2011 (menjadi 38/10.000 penduduk).

Tabel 3.12 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di DIY Sampai dengan Periode 2013/2014

No	Jenjang Pendidikan	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	2.009	2.009	2.017	2.009	2.010
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	281.389	276.343	277.987	275.046	277.023
1.3.	Rasio (Per 10.000)	71	73	73	73	73
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	509	507	507	517	526
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	136.595	139.763	134.311	133.163	136.356
2.3.	Rasio (Per 10.000)	37	36	38	39	39

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY dan Data Pembangunan Daerah 2013

Pada tahun 2014, perluasan akses pendidikan juga terlihat dari perbaikan sarana pendidikan yang ada, seperti nampak dalam data berikut ini:

- a. TK/RA berjumlah 2.274 buah dengan siswa sebanyak 97.276 dan guru 7.759 orang.
- b. SD/MI berjumlah 2.018 buah dengan siswa sebanyak 306.506 dan guru 22.075 orang.
- c. SMP/MTs berjumlah 534 buah dengan siswa sebanyak 159.016 dan guru 13.041 orang.
- d. SMA/MA berjumlah 207 buah dengan siswa sebanyak 63.980 dan guru 6.820 orang.
- e. SMK berjumlah 221 buah dengan siswa sebanyak 80.859 dan guru 8.772 orang.
- f. SLB berjumlah 76 buah dengan siswa sebanyak 4.389 dan guru 1.271 orang

e. Rasio Guru Per Sekolah

Selain keberadaan gedung sekolah yang memadai, ketersediaan guru juga menjadi salah satu faktor penting dalam perluasan akses pendidikan. Rasio guru terhadap murid akan berkorelasi terhadap peningkatan akses dan pemenuhan hak warga atas pendidikan yang layak dan memadai. Tabel berikut menunjukkan bahwa di jenjang pendidikan dasar, rasio guru murid menunjukkan fluktuasi. Pada jenjang SD/MI, pada tahun 2010, terjadi lonjakan yang tinggi dari 76/1000 murid menjadi 89/1000 murid. Namun kemudian, rasionya mengalami penurunan pada tahun 2011 dan menurun lagi pada tahun 2013 menjadi hanya 85/1000 murid. Pada tahun 2013, rasionya adalah 85/1000 murid, atau setiap guru mengajar anak sekitar 12 murid. Namun pada tahun 2014, terjadi fluktuasi karena rasionya menurun menjadi 72,1/1000 murid.

Pada jenjang SLTP, fluktuasi juga ditunjukkan dengan kenaikan pada tahun 2010 dan 2011, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013, dengan rasio 112/1000 murid. Begitu juga ditahun 2014, angkanya menjadi 82,7/1000 murid.

Tabel 3.13 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di DIY Tahun 2009-2014

Jenjang Pendidikan	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
SD/MI					
Jumlah Guru	23.820	23.719	23.222	22.548	22.075

Jenjang Pendidikan	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Jumlah Murid (Pddk Usia 7-12 thn di Sedang Sekolah)	268.466	271.130	268.289	266.337	306.428
Rasio	9	9	9	8	7
SMP/MTs					
Jumlah Guru	12.971	12.684	12.634	12.834	13.033
Jumlah Murid (Pddk Usia 13-15 thn di Sedang Sekolah)	113.185	108.851	108.029	114.186	158.937
Rasio	11	12	12	11	8
SMA/SMK/MA usia 16-18 Tahun					
Jumlah Guru	15.112	15.064	14.748	15.231	15.592
Jumlah Murid	95.500	101.015	101.539	103.862	104.699
Rasio	16	15	15	15	15

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY

Permasalahan:

Sasaran perluasan aksesibilitas pendidikan perlu memperhatikan fluktuasi rasio guru dan murid serta ketersediaan gedung sekolah, karena dampaknya bagi kelancaran dan peningkatan kualitas belajar mengajar.

- a. Fluktuasi angka putus sekolah. Data DIY di berbagai jenjang pendidikan menunjukkan perlunya perhatian untuk menjawab persoalan putus sekolah. Sebagian persoalan ini perlu dijawab dengan upaya sinergis lintas bidang dan juga lintas aktor, seperti menjawab persoalan pekerja anak ataupun putus sekolah karena kejadian kehamilan yang tidak dikehendaki.
- b. Disparitas antar kabupaten/kota, sebagaimana ditunjukkan dalam angka APM dan APK, perlu dijawab dengan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai di berbagai kabupaten/kota.

- c. Masih banyaknya anak berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan penanganan secara terpadu dengan kabupaten/kota. Untuk mengakomodasi anak berkebutuhan khusus tersebut, skema pendidikan seperti fasilitas pendidikan, tenaga pengajar dan juga kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan khusus ini, perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan pendidikan.

Solusi:

- a. Peran strategis yang dipegang oleh pemerintah propinsi adalah mengkoordinasikan program dan capaian kinerja antar kabupaten/ kota, termasuk untuk meminimalkan ketimpangan antar wilayah pada aspek pendidikan.
- b. Persoalan putus sekolah merupakan persoalan yang kompleks, karena bukan hanya terkait dengan urusan pendidikan saja. Karena itu, diperlukan kajian dan pengembangan strategi yang efektif untuk menjawab akar persoalan putus sekolah. Peran pemerintah bukanlah faktor tunggal namun menentukan karena menjadi katalisator dan fasilitator atas peran berbagai pihak baik unsur pemerintah maupun swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. Upaya pengembangan berbagai skema dukungan pendanaan pendidikan, seperti pengembangan Beasiswa Retrieval, Bantuan Siswa Miskin, pemberian bantuan biaya pendidikan mahasiswa, dan pemberian Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin untuk pelajar/mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Mendorong inklusi bagi anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Hal ini bisa dilakukan melalui kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan yang inklusif, seperti penyelenggaraan forum masyarakat peduli pendidikan sebagai sarana sosialisasi layanan anak berkebutuhan khusus. Selain itu, juga diperlukan dukungan pendanaan dengan pemberian bantuan operasional untuk SLB swasta se-DIY. Di luar itu, yang juga penting adalah pengembangan dan praktek pendidikan inklusif yang komprehensif

4. Sasaran Pendidikan Berbasis Budaya

Berkaitan dengan pendidikan karakter yang mengedepankan kemajuan dan kedamaian dalam kemajemukan, pendidikan karakter menjadi salah satu penanda penting bagaimana nilai-nilai ini telah berhasil diinternalisasi dalam proses pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya, sebagai acuan untuk mengetahui sejauh mana satuan pendidikan di DIY telah mengimplementasikan budaya ke dalam sistem dan

materi pembelajaran guna membentuk karakter para peserta didik. Hal ini juga sejalan dengan fokus pada pembangunan kebudayaan, termasuk pendidikan sebagai salah satu pilar kunci pembangunan di DIY.

Sebagai catatan, penting untuk mengingat kembali bahwa sasaran ini merupakan sasaran baru yang dirumuskan target kinerjanya pada tahun 2014. Hal ini merupakan penyesuaian indikator kinerja sesuai RPJMD 2012-2017. Penghitungan sasaran dengan indikator ‘Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya’ baru dilakukan pada tahun 2014 ini. Hal ini bisa dilihat bahwa pada tahun 2013, pencapaian kinerja untuk sasaran ini, menunjukkan capaian sebanyak 0%.

Pencapaian kinerja atas sasaran ini bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.14 Model pendidikan berbasis budaya.

Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.	0%	5%	5%	100	40%	12,50

Pencapaian target kinerja yang menunjukkan capaian sebanyak 100% diatas menunjukkan capaian kinerja yang **sangat tinggi**. Capaian ini juga menyumbang sebanyak 12,5% dari target kinerja pada akhir RPJMD.

Permasalahan:

- a. Masih terbatasnya sekolah yang memiliki rumusan yang jelas tentang karakter berbasis budaya yang akan dibangun, termasuk masih sedikitnya sekolah yang sudah mengembangkan rencana aksi pendidikan karakter. Selain itu, muatan karakter yang akan dibangun juga belum sepenuhnya terwujud dalam aktivitas pembelajaran.
- b. Perangkat pendukung seperti buku bacaan yang bermuatan karakter juga masih sangat terbatas. Begitu juga dengan keterbatasan sarana perpustakaan yang berkualitas di sekolah juga masih terbatas.

- c. Guru menjadi salah satu tulang punggung bagi keberhasilan pengembangan pendidikan karakter. Walaupun data telah menunjukkan perbaikan dalam hal ketersediaan jumlah guru di berbagai tingkat pendidikan, persoalan kualitas dan kompetensi menjadi salah satu catatan yang penting untuk dijawab, terlebih untuk mendorong pendidikan karakter berbasis budaya.

Solusi:

- a. Karakter dalam bingkai kebudayaan perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan teknologi terkini. Termasuk di sini adalah pengembangan bahan ajar dan sarana pendukung berbasis teknologi yang sudah mengintegrasikan muatan karakter budaya di dalamnya
- b. Peningkatan kapasitas bagi guru sebagai salah satu tulang punggung keberhasilan pendidikan berbasis karakter.

5. Sasaran Harapan Hidup Masyarakat Meningkat

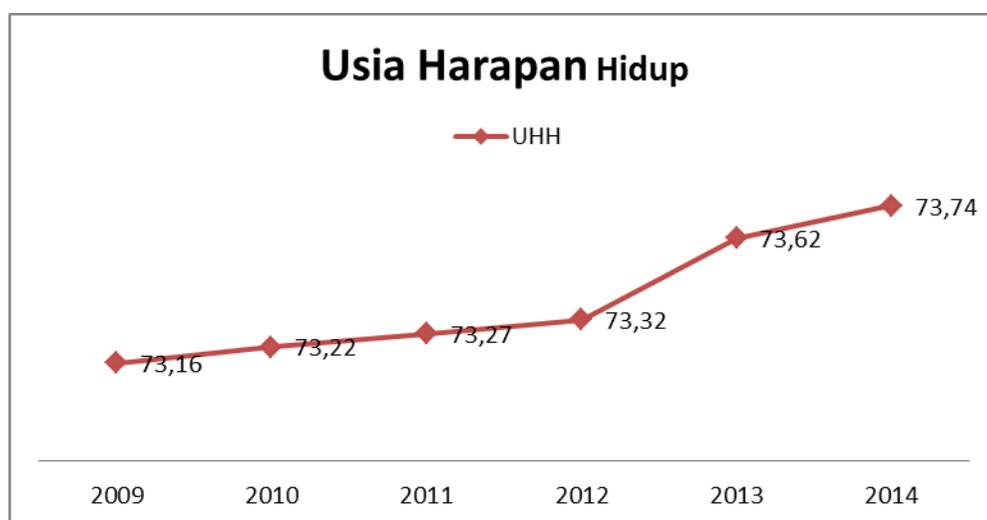
Tingginya pencapaian AHH juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan angka usia harapan hidup dipengaruhi dari beberapa faktor yang dalam hal ini faktor kesehatan lebih berperan penting selain faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, peningkatan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang baik juga akan sangat mempengaruhi.

Sasaran untuk meningkatkan harapan hidup menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2014, dari target 74.41 tahun, realisasi tahun 2014 menunjukkan bahwa angka harapan hidup penduduk DIY mencapai 73,74 tahun atau 99,1% dari target kinerja. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang **sangat tinggi**. Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai 99,41% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD pada tahun 2017, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Tabel 3.15 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Harapan Hidup Masyarakat Meningkat

Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Angka Harapan Hidup	74	74,41	73,74	99,10	74,18	99,41%

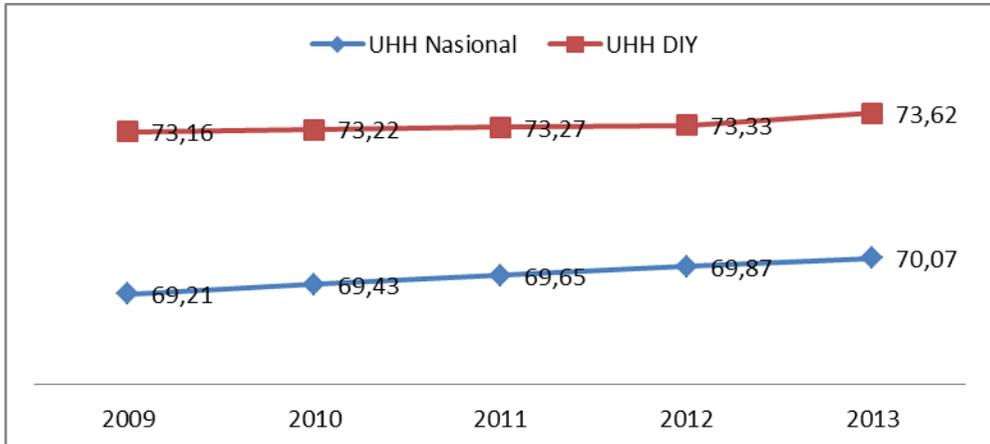
Gambar berikut menunjukkan tren dari tahun ke tahun, dimana trennya menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun 2014, angka harapan hidup di DIY mencapai 73.74* tahun (angka sementara).



Sumber: BPS DIY, 2014

Gambar 3.12 Perkembangan Angka Harapan Hidup DIY Tahun 2009-2014

Selama kurun 30 tahun terakhir, angka harapan hidup penduduk DIY memang telah meningkat secara signifikan. Pada tahun 1971, usia harapan hidup penduduk DIY adalah 53 tahun, kemudian menjadi 62 tahun pada tahun 1980, dan 67 tahun pada tahun 1990. Angkanya terus meningkat menjadi 71 pada tahun 2000 dan 74 pada tahun 2010. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan usia harapan hidup nasional yaitu 69 tahun.



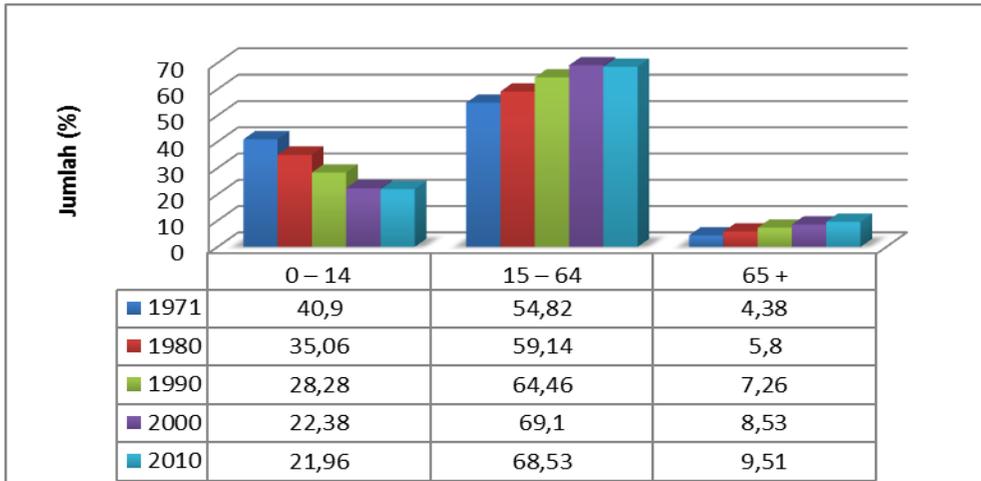
Sumber: BPS, Diolah, 2014

Gambar 3.13 Tren Usia Harapan Hidup DIY dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup Nasional

Secara demografis, peningkatan usia harapan hidup menjadi bagian dari transisi demografi yang sebetulnya telah dimulai sejak tahun 90an, dengan peningkatan proporsi penduduk usia lanjut. Transisi demografi dengan peningkatan angka harapan hidup dan sekaligus peningkatan proporsi penduduk usia lanjut ini, perlu diikuti dengan perubahan kebijakan dan program/ kegiatan yang menjadikan isu-isu terkait kualitas hidup bagi lansia sebagai prioritas pembangunan.

Selain penduduk usia lanjut, proporsi penduduk usia produktif juga semakin meningkat, yang juga dikenal sebagai bonus demografi. Bonus demografi sendiri adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif atau yang berusia 15-65 tahun akan lebih besar dari jumlah usia tidak produktif. Kondisi ini memiliki makna peluang namun sekaligus juga merupakan tantangan. Pertanyaan kuncinya adalah, apakah kelompok usia produktif ini memang benar-benar produktif? Pembangunan manusia dengan bertumpu pada bonus demografi perlu dikembangkan antara lain melalui pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan, dan pemerataan kesempatan kerja. Melalui cara-cara inilah, bonus demografi akan punya makna berarti untuk peningkatan status kesejahteraan rakyat. Tanpa ini, bonus demografi akan sekedar menjadi fenomena pergeseran komposisi penduduk tanpa memiliki banyak makna untuk peningkatan produktivitas bangsa dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

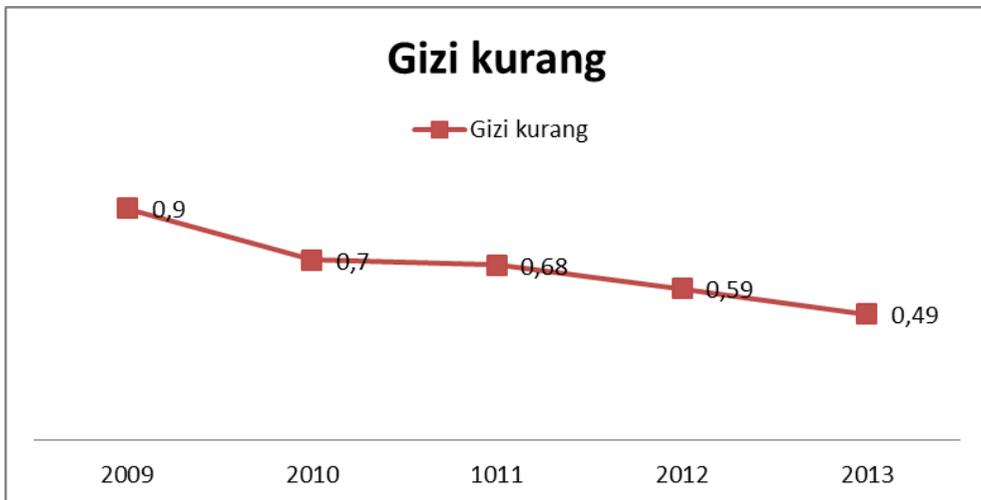
Proporsi penduduk berdasarkan kelompok umur bisa dilihat dalam tabel berikut ini:



Sumber: BPS DIY

Gambar 3.14 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di DIY, 1971-2010

Beberapa tren juga menunjukkan dinamika dalam pencapaian derajat kesehatan masyarakat di DIY. Sebagai contoh adalah tren tentang prevalensi balita gizi kurang di DIY berikut ini:



Sumber: BPS DIY

Gambar 3.15 Tren Prevalensi Balita Gizi Kurang di DIY, 2009-2014

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, angka prevalensi balita gizi kurang telah menunjukkan penurunan. Tren baik ini perlu di jaga di masa depan sebagai capaian penting pembangunan bidang kesehatan.



Gambar 3.16 Kegiatan Posyandu

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas menjadi faktor penting dalam pembangunan kesehatan. Hal ini juga perlu diikuti dengan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi pelayanan kesehatan yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan.

Ketersediaan tenaga dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi sudah di atas target Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014, namun masih di bawah ideal (1 dokter umum melayani 2.500 penduduk). Sedangkan untuk ketersediaan tenaga dokter spesialis di DIY, untuk setiap 1 orang dokter spesialis di DIY melayani 3.074 penduduk. Rasio tersebut sudah jauh di atas target Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014 (9 per 100.000 penduduk). Sedangkan untuk dokter gigi, terdapat 608 dokter yang meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 597 orang. Rasio dokter gigi DIY per 100.000 penduduk sebesar 16,76.

Tabel 3.16 Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 Penduduk DIY Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013*
Jumlah Penduduk	3.426.637	3.501.374	3.543.740	3.585.922	3.627.821
Jumlah Dokter Umum	1.304	773	1.358	1.214	1.378
Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk	38,05	22,08	38,32	33,85	37,98
Jumlah Dokter Spesialis	931	789	1.245	1.354	1.180
Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk	27,17	22,53	35,13	37,76	32,53
Jumlah Dokter Gigi	222	304	385	597	608
Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	6,48	8,68	10,86	16,65	16,76

Sumber : BPS Provinsi DIY dan Dinas Kesehatan DIY, diolah *: Angka Sementara

Ketersediaan akses memadai pada sarana kesehatan juga bagian kunci dalam peningkatan usia harapan hidup. Hasil survey Dinas Kesehatan DIY pada tahun 2008 menunjukkan bahwa lebih dari 80% penduduk DIY lokasi tempat tinggalnya hanya berjarak 1-5 km terhadap puskesmas dan lebih dari 70% penduduk hanya berjarak 1-5 km terhadap rumah sakit dan dokter praktek swasta. Tidak ditemukan penduduk yang memiliki jarak tempuh lebih dari 10 km terhadap sarana pelayanan puskesmas, dokter praktek swasta dan bidan. Hal ini menunjukkan mudahnya akses dalam hal jarak jangkauan penduduk terhadap sarana pelayanan.

Data BPS sebagaimana tercantum dalam DIY Dalam Angka 2014, Jumlah sarana kesehatan yang tersedia di DIY tahun 2013 adalah 72 unit Rumah Sakit, 121 Puskesmas induk, 38 unit Rumah bersalin, 95 unit balai pengobatan dan 1.142 parkatek dokter perorangan dan Puskesmas Pembantu di DIY tahun 2012



Gambar 3.17 Pelayanan Masyarakat

sebanyak 441 unit dengan rasio sebesar 0,122. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 unit Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melayani 8.131 penduduk. Sedangkan untuk proyeksi 2013, jumlah penduduk yang meningkat akan mempengaruhi rasio Puskesmas dan

Puskesmas Pembantu per satuan penduduk. Namun yang perlu menjadi perhatian, rasionya dari tahun ke tahun semakin menurun, dan ini menjadi tantangan ke depan bagi Pemda DIY.

Tabel 3.17 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013*
Jumlah Penduduk	3.426.637	3.501.374	3.543.740	3.585.922	3.627.821
Jumlah Puskesmas	118	120	121	121	121
Jumlah Puskesmas Pembantu	321	321	321	320	320
Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	439	441	442	441	441
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	0,128	0,126	0,125	0,123	0,122

Sumber : BPS Provinsi DIY dan Dinas Kesehatan DIY, diolah *: Angka sementara

Selain Puskesmas, sarana kesehatan lain yang penting adalah rumah sakit. Berdasarkan jenis dan pengelolaanya, rumah sakit di DIY dibagi dalam kategori Rumah Sakit Umum (Pusat, Daerah, Swasta) dan Rumah Sakit Khusus. Tidak ada penambahan jumlah rumah sakit di DIY dari tahun 2011 sampai dengan 2013 yaitu sebanyak 72 rumah sakit. Dengan jumlah penduduk DIY sebanyak 3.627.821 jiwa, rasio rumah sakit per satuan penduduk di DIY tahun 2013 adalah sebesar 0,01985. Dengan kata lain, satu rumah sakit di DIY melayani 51.386 jiwa.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.18 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk DIY Tahun 2012-2013

Uraian	2011	2012	2013*
Jumlah Penduduk	3.543.740	3.585.922	3.627.821
Jumlah Rumah Sakit	71	71	71
Rumah Sakit Umum Pusat	1	1	1
Rumah Sakit Umum Daerah	7	7	7
Rumah Sakit Umum Swasta	52	52	52
Rumah Sakit Khusus	11	11	11
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0200	0,0198	0,0196

Sumber : BPS Provinsi DIY dan Dinas Kesehatan DIY, diolah *: Angka Sementara

Selain itu, data penting yang terkait dengan pencapaian sasaran peningkatan angka harapan hidup adalah cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Di tahun 2013, sebanyak 66,49% penduduk telah memiliki jaminan kesehatan.

Sedangkan, cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat di tahun 2014 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19 Cakupan Jaminan Kesehatan

No	Kab/kota	Askes Komersial	Askes	Askeskin /Jamkesmas
1	Kota	8,351	66,183	68,456
2	Bantul	7,591	92,209	222,987
3	Kulon progo	3,381	45,349	141,893
4	Gunungkidul	2,143	45,318	340,635
5	Sleman	46,671	141,263	168,158
	Jumlah	68,137	390,322	942,129

No	Kab/kota	Jamkesos	Jamkesda	Total
1	Kota	17,452	171,799	377,668
2	Bantul	17,086	89,185	446,133
3	Kulon progo	24,570	132,599	348,914
4	Gunungkidul	60,475	204,394	653,914
5	Sleman	26,503	215,384	637,870
	Jumlah	146,086	813,361	2,464,499

Tabel 3.20 Jumlah Penduduk DIY yang menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Pemerintah Tahun 2014

No.	Jaminan Kesehatan	Jumlah Peserta
1.	JKN BPJS Kesehatan (per 15 Juni 2014)	2.145.042
2.	Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesos (Verifikasi per 28 Agustus 2014)	136.612
3.	CoB (Verifikasi per 28 Agustus 2014)	647.771
4.	Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesda Kab/Kota	248.662

Sumber : Dinas Kesehatan DIY

Permasalahan

- Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat DIY belum baik terutama ditinjau dari perilaku merokok di dalam rumah, kurangnya aktivitas fisik, serta kurangnya asupan buah dan sayur.
- Masih adanya disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota di DIY dilihat dari sarana-prasarana maupun tenaga kesehatan
- Jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu semakin meningkat, namun belum seluruh masyarakat terlindungi secara optimal terhadap beban pembiayaan kesehatan.
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap upaya penanganan kasus gangguan jiwa.

Solusi

- Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui posyandu, desa/kelurahan siaga, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan.
- Penerapan Sistem rujukan sebagai upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan pengembangan sarana prasarana maupun tenaga kesehatan.

- c. Integrasi kepesertaan ke jaminan kesehatan nasional dan penambahan jenis layanan yang dijamin sebagai upaya pengembangan jaminan kesehatan semesta.
- d. Meningkatkan promosi dan advokasi kepada masyarakat agar mampu mendeteksi dan mendampingi kasus gangguan jiwa.

6. Sasaran Pendapatan Masyarakat Meningkat

Peningkatan pendapatan menjadi salah satu penanda keberhasilan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Walaupun pendekatan pembangunan telah mengalami perkembangan yang lebih melihat pentingnya pengembangan kapabilitas manusia, namun aspek ekonomi yang diwakili antara lain oleh pendapatan tetaplah menjadi bagian kunci dalam pembangunan itu sendiri.

Peningkatan pendapatan juga menggambarkan bagaimana manfaat terhadap akses pembangunan telah dirasakan oleh warga negara. Namun demikian, penting untuk diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya banyak capaian pembangunan, peningkatan pendapatan juga bukan hanya merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau negara sendiri. Peran dari pihak non negara, seperti swasta dan masyarakat adalah pilar kunci yang menyumbang pada capaian peningkatan pendapatan.

Dalam IKU Gubernur 2014, peningkatan pendapatan ditargetkan naik dari Rp6,94 juta per kapita per tahun menjadi Rp7 juta per kapita per tahun. Realisasinya mencapai nilai pendapatan sebesar Rp7,1 juta per kapita per tahun, atau sebanyak **95,95%** dari target yang dicanangkan. Ini menunjukkan capaian **kinerja yang sangat tinggi** untuk tahun 2014. Selain itu, bila disandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini telah menyumbang sebanyak 83,53% dari target akhir RPJMD untuk meningkatkan pendapatan sebanyak Rp8.5 juta per kapita per tahun pada tahun 2017.

Ketidaktercapaian indikator ini disebabkan adanya pelambatan pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2014. Pelambatan pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi kinerja perekonomian nasional yang juga melambat. Selain itu imbas kenaikan harga BBM, lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dan kontraksi pada sektor pertanian juga mempengaruhi pelambatan perekonomian DIY sehingga berdampak pada tidak tercapainya target pendapatan perkapita.

Tabel 3.21 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pendapatan Masyarakat Meningkat

Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Pendapatan perkapita pertahun (ADHK) (Juta).	6,94	7	7,10	95,95	8,5	83,53

Data historis juga menunjukkan bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, nilai PDRB per kapita DIY adalah sebesar Rp19.483.414,00 atas dasar harga berlaku, dan Rp7.100.158,00 atas dasar harga konstan. Nilai ini telah menunjukkan peningkatan sebesar 8.36% untuk harga berlaku dan 2,31% untuk harga konstan.

Tabel 3.22 Nilai PDRB per Kapita DIY, 2010-2014 (Rupiah)

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
2010	13.030.767	6.010.224
2011	14.613.135	6.245.315
2012	16.350.082	6.680.202
2013	17.980.000	6.940.000
2014	19.483.414	7.100.158

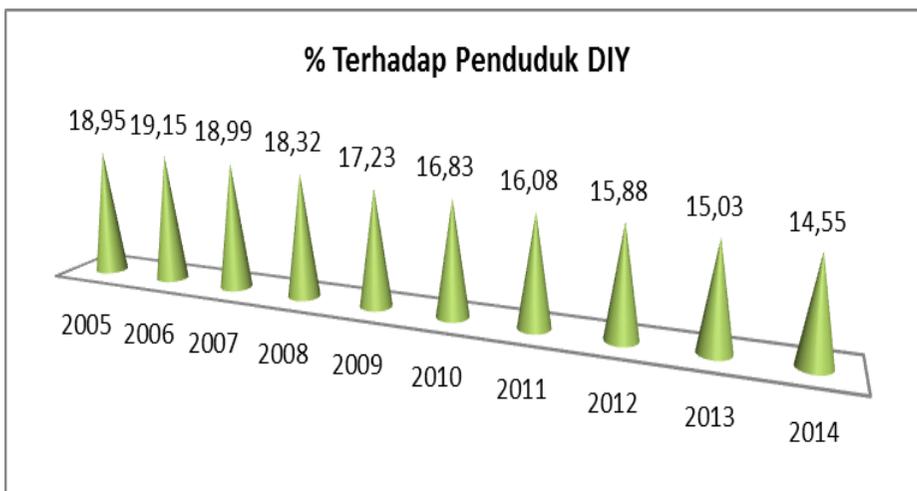
Sumber: BPS DIY

Walaupun sudah mencapai kinerja yang sangat baik, penting untuk melihat bagaimanakah situasi kemiskinan di DIY saat ini. Data menunjukkan bahwa angka penduduk miskin di DIY masih cukup tinggi. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di DIY pada tahun 2014 adalah sebesar 14,55% dari total penduduk DIY atau sebanyak 532,590. Perhatian akan pentingnya upaya pengentasan kemiskinan yang perlu dilakukan adalah karena secara relatif, angka kemiskinan di DIY masih relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Tabel 3.23 Data Penduduk Miskin dari Tahun 2010-2014

Tahun	Kota/Urban		Desa/Rural		Jumlah Total	
	Jumlah (000)	% Thd Penduduk Kota	Jumlah (000)	% Thd Penduduk Desa	Jumlah (000)	% Thd Penduduk DIY
2010	308,36	13,38	268,94	21,95	577,30	16,83
2011	304,34	13,16	256,55	21,82	560,88	16,08
2012	305,34	13,13	259,44	21,76	565,35	15,88
2013	329,65	13,73	212,30	17,62	541,95	15,03
2014	324,43	13,36	208,15	16,88	532,59	14,55

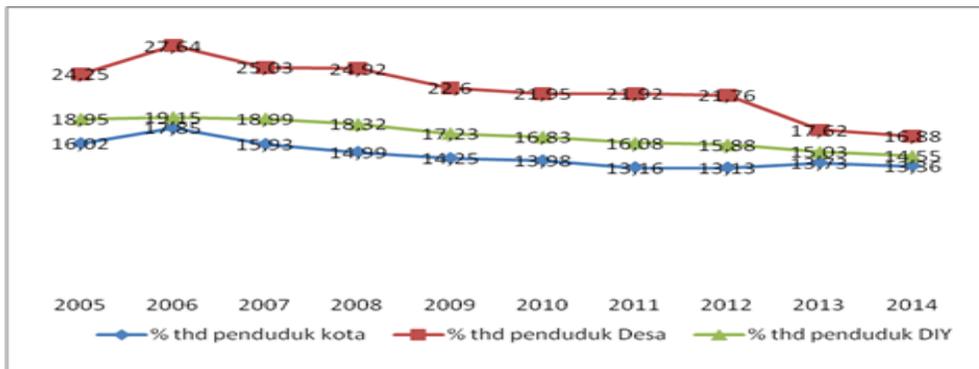
Data tahunan menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan penurunan persentase penduduk miskin di DIY dari tahun ke tahun. Tren yang baik ini perlu dijaga dan diapresiasi ke depan. Hal ini ditunjukkan oleh grafik berikut ini:



Gambar 3.18 Data Penduduk Miskin dari Tahun 2010-2014

Di lihat dari sebarannya, persentase penduduk miskin di kawasan perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di kawasan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk miskin masih berada di wilayah perdesaan. Penjelasananya adalah karena penduduk perdesaan memiliki akses layanan publik yang lebih rendah, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian di mana nilai produk pertanian telah semakin menurun. Sebagai hasilnya, penduduk perdesaan memiliki

pendapatan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Grafik berikut menunjukkan sebaran dan trennya dari tahun ke tahun.



Gambar 3.19 Persentase Penduduk Miskin, Desa, dan Kota

Memang persentase penduduk miskin DIY masih berada diatas rata rata persentase penduduk miskin nasional. Namun demikian, catatan positifnya adalah bahwa dari tahun ke tahun, kesenjangan ini semakin menyempit. Ini berarti bahwa DIY sudah semakin mendekati rata-rata angka kemiskinan nasional. bila pada tahun 2012, selisih persentase penduduk miskin DIY dengan nasional adalah sebesar 4,39%, maka pada tahun 2014 menurun menjadi 3,59%. Grafik berikut memperlihatkan perbandingan persentase penduduk miskin tingkat DIY dan nasional.



Sumber BPS DIY, 2014

Gambar 3.20 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin DIY dengan Nasional

Sasaran peningkatan pendapatan juga terkait dengan kesempatan dan angkatan kerja. Data tahunan menunjukkan bahwa rasio penduduk yang bekerja memiliki

kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, walaupun pernah mengalami penurunan pada tahun 2009 dibandingkan tahun 2008. Pada tahun 2013, data sementara menunjukkan bahwa rasio penduduk yang bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja adalah 96.66%.

Tabel 3.24 Perkembangan Rasio Penduduk Bekerja di DIY Tahun 2008-2013

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Penduduk yang Bekerja	1.892.205	1.895.648	1.775.148	1.798.595	1.867.708	1.847.070
Angkatan Kerja	1.999.734	2.016.694	1.882.296	1.872.912	1.944.858	1.910.959
Rasio Penduduk yang bekerja	94,62	94,00	94,31	96,03	96,03	96,66

Sumber : Dinas Nakertrans DIY *: Angka sementara

Sementara bila dilihat dari lapangan pekerjaan utama, pada Agustus tahun 2014, proporsi terbesar penduduk menumpukan penghidupannya pada sektor perdagangan, hotel dan restoran (sebesar 25,86%), sektor pertanian (25,41%) dan jasa-jasa lainnya (19,14%). Kondisi ini relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Data lengkapnya bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.25 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2011-Agustus 2014

Lapangan Pekerjaan Utama	2011		2012		2013		2014	
	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst
Pertanian	24,31	23,97	25,43	27,82	24,38	28,18	25,42	25,41
Industri Pengolahan	14,17	14,83	15,65	14,97	12,96	13,36	14,91	13,97
Konstruksi	5,61	7,40	5,68	6,92	6,39	5,54	4,84	7,48
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	25,97	26,70	26,37	24,52	26,38	25,87	26,64	25,86
Pengangkutan dan Komunikasi	4,71	3,79	3,72	3,27	3,87	3,48	3,78	3,52
Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	2,18	2,78	2,68	3,06	3,34	2,87	3,37	3,75
Jasa-Jasa	21,76	19,60	20,25	18,58	21,46	19,93	20,75	19,14
Lainnya (Pertambangan, Penggalian, Listrik, Gas dan Air)	1,30	0,93	0,22	0,86	1,22	0,77	0,29	0,86
Total	100							

Selain itu, data terakhir per Agustus 2014 tentang status pekerjaan utama juga menunjukkan bahwa proporsi terbesar dari penduduk di DIY bekerja sebagai buruh/ karyawan/pegawai (sebesar 43,22%), kemudian diikuti oleh proporsi penduduk yang berusaha sendiri dengan dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar (sebesar 16,59%) dan kemudian diikuti oleh proporsi penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga/ tak dibayar (sebesar 14,75%).

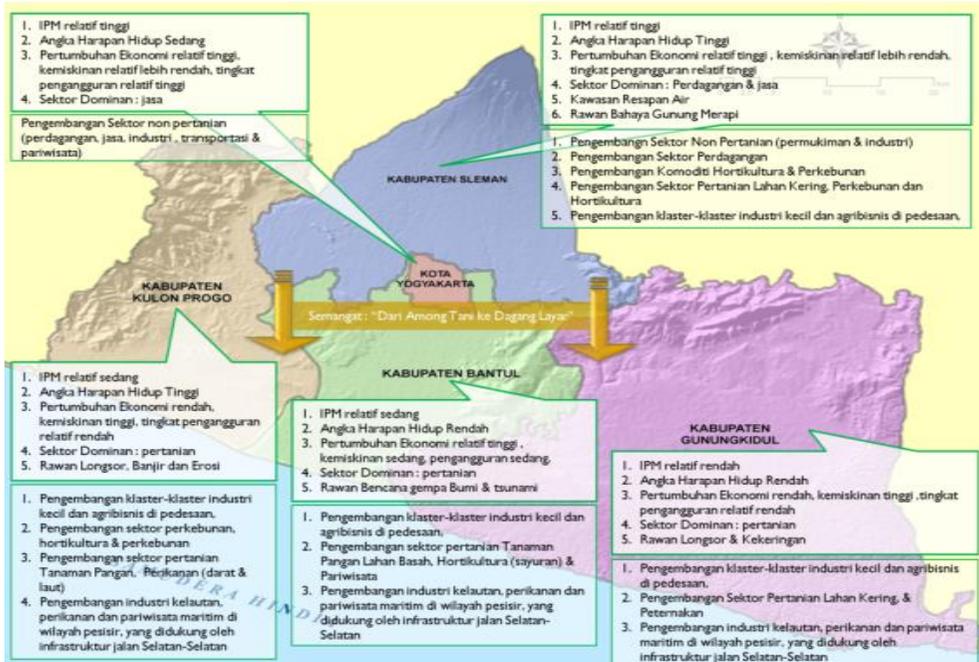
Tabel 3.26 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Februari 2011-Agustus 2014

Status Pekerjaan Utama	2011		2012		2013		2014	
	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst
Berusaha Sendiri	15,29	13,91	13,61	12,52	13,52	12,92	12,14	13,92
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	17,49	19,35	21,32	19,51	20,15	19,83	19,97	16,59
Berusaha dibantu Buruh Tetap	4,27	4,27	3,9	4,35	4,10	4,57	4,10	3,90
Buruh/Karyawan/ Pegawai	39,34	40,12	38,18	38,79	39,75	39,46	41,81	43,22
Pekerja Bebas	8,59	8,40	7,14	8,47	8,74	7,12	5,13	7,62
Pekerja Keluarga/tak Dibayar	15,02	13,95	15,85	16,36	13,73	16,10	16,85	14,75
Total	100							

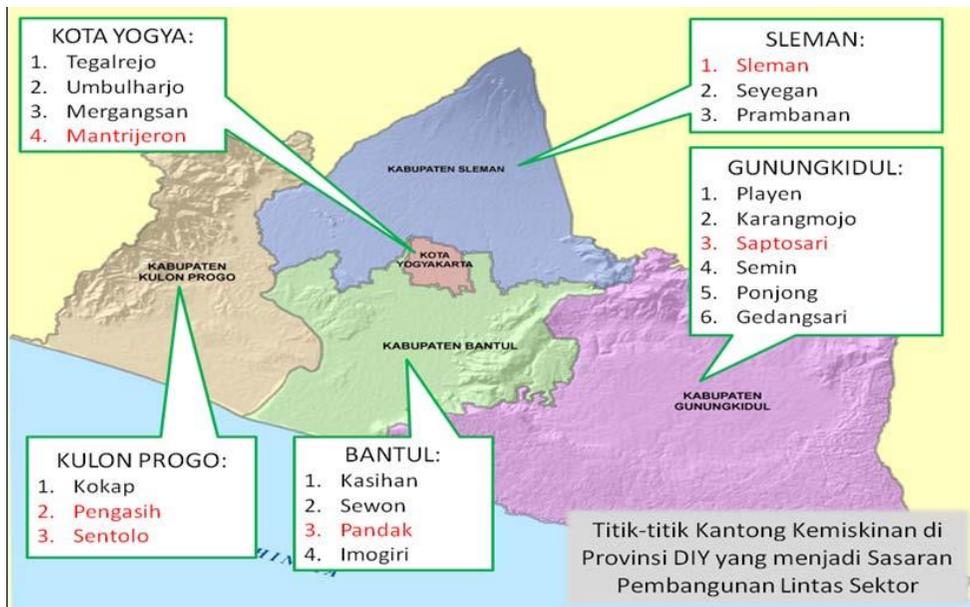
Sumber: Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

Karenanya, upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat juga penting untuk melihat kontribusi sektor unggulan di DIY terhadap perekonomian DIY, dan beberapa kondisi yang sudah diuraikan di atas. Ukuran yang digunakan adalah besarnya kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB DIY. Dikatakan sektor unggulan apabila kontribusinya terhadap nilai PDRB DIY dari waktu ke waktu secara konsisten relatif besar. Di DIY terdapat empat sektor yang mendominasi perekonomian DIY yaitu sektor jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Karenanya, upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat perlu dikembangkan dengan memperhatikan kontribusi sektor unggulan di atas, sehingga akan menjadi lebih efektif, termasuk aspek seperti status pekerjaan utama penduduk yang sudah diuraikan di atas.

Upaya peningkatan pendapatan untuk mendorong pengentasan kemiskinan juga perlu dilakukan dengan memfokuskan program penanggulangan kemiskinan di wilayah yang menjadi kantong kemiskinan. Sinergi program pengentasan kemiskinan termasuk dengan pihak non pemerintah dilakukan untuk menguatkan fokus program pengentasan kemiskinan sebagaimana nampak dalam gambar di bawah ini.



Gambar 3.21 Arah Pembangunan Kewilayahan dan Pengentasan Kemiskinan



Gambar 3.22 Sinergi Arah Pembangunan Kewilayahan dan Pengentasan Kemiskinan

Permasalahan:

- Walaupun angka kemiskinan telah semakin menurun dari tahun ke tahun, namun laju penurunannya juga menunjukkan kecenderungan yang lebih lambat. Ini menunjukkan bahwa target pengurangan angka kemiskinan menjadi semakin tidak mudah untuk dicapai.
- Masih lebih tingginya angka kemiskinan di kawasan pedesaan. Data-data tahunan telah mengkonfirmasi akan situasi ini, yang bisa menunjukkan akses pelayanan publik dan pasar yang masih terbatas untuk masyarakat di kawasan pedesaan.
- Masih belum kuatnya sinergi antara upaya peningkatan pendapatan masyarakat yang dilakukan pemerintah dengan upaya yang dilakukan oleh pihak lain seperti swasta. Walaupun.

Solusi:

- Menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan, termasuk upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Ke depan, strategi ini bisa disinergikan dengan kerangka dan otonomi desa sebagai bagian dari pengesahan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Strategi ini juga perlu disinergikan sebagai bagian tak terpisahkan dari konsep dan kerangka keistimewaan untuk menjadikan desa sebagai pusat budaya, termasuk budaya dalam pengertian yang luas yang juga mencakup sumber kehidupan masyarakat. Konsep desa sebagai pusat budaya dan

- pertumbuhan dan kontribusi sektor jasa dan pariwisata juga bisa dilakukan dengan menumbuhkan desa wisata sebagai bagian dari strategi peningkatan pendapatan masyarakat.
- b. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong akses terhadap layanan publik dan pasar yang lebih baik bagi masyarakat di kawasan pedesaan. Dengan cara ini, upaya menjawab tingginya persentase penduduk miskin di kawasan pedesaan bisa dilakukan dengan lebih efektif dengan manfaat berupa peningkatan pendapatan masyarakat.
 - c. Sinergi program pengentasan kemiskinan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan di DIY, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Dalam kaitan dengan peningkatan pendapatan, sederhana untuk memahami bahwa kontribusi pihak non pemerintah khususnya swasta sangatlah besar. Namun ini tidak menutupi peran kunci pemerintah untuk menjamin akses yang setara dan memberikan perlindungan sosial bagi setiap warga negara untuk memiliki sumber penghidupan yang layak dan bermartabat.
 - d. Strategi peningkatan pendapatan dengan pemanfaatan bonus demografi yang ditandai dengan proporsi penduduk usia produktif yang tinggi. Hal ini bisa disinergikan dengan upaya peningkatan human capital melalui peningkatan status pendidikan dan kesehatan masyarakat. Upaya ini perlu diintegrasikan dengan penciptaan lapangan kerja baru untuk angkatan kerja baru, seperti pengembangan ekonomi kreatif, penguatan teknologi hasil pertanian, ataupun pengembangan sektor usaha jasa yang banyak menyerap tenaga kerja.

7. Sasaran Ketimpangan Antar Wilayah Menurun

Kesenjangan adalah salah satu isu penting dalam pembangunan. Kesenjangan ini bisa berimplikasi lebih jauh karena menunjukkan distribusi akses dan manfaat pembangunan yang tidak merata. Isu kesenjangan bisa menjadi faktor yang menjelaskan mengapa target-target pembangunan bisa tidak terealisasi, karena ada wilayah yang menghadapi kendala yang lebih tinggi untuk dapat mengakselerasi pembangunan. Identifikasi atas isu kesenjangan yang tepat akan menjadi pijakan awal untuk merumuskan strategi yang efektif. Dibutuhkan strategi yang tepat dan sesuai untuk menjawab konteks permasalahan yang berbeda-beda antar wilayah, termasuk mendorong kemampuan akselerasi wilayah yang lebih tertinggal untuk mengejar target pembangunan sejajar dengan wilayah yang lain.

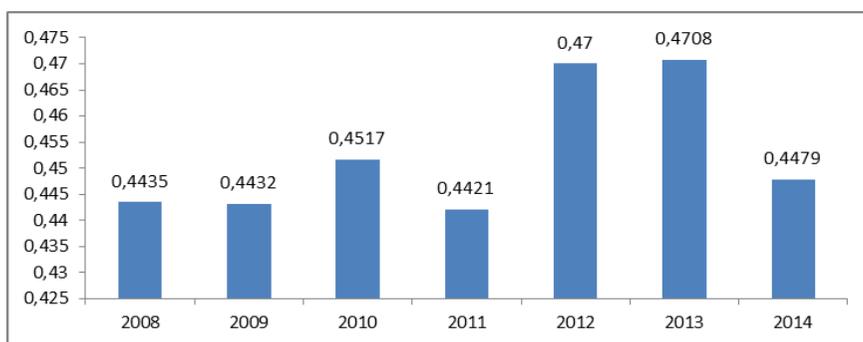
Data capaian IKU untuk penurunan kesenjangan antar wilayah digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.27 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Ketimpangan Antar Wilayah Menurun

Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Indek Ketimpangan Antar Wilayah	0,4547	0,4515	0,4479	100,80	0,4445	99,25

Pada tahun 2014, realisasi indeks ketimpangan wilayah mencapai angka 0,4479 atau 100,80% dibandingkan target yang ditetapkan. Dengan capaian ini, kinerja yang yang dicapai telah masuk **kriteria sangat tinggi**, bila disandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini juga telah menyumbang sebanyak 99,25% dari target 0,4445 pada tahun 2017.

Ketimpangan antar wilayah di DIY ditunjukkan oleh Indeks Williamson, yang mana semakin tinggi angkanya, menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang **juga** semakin lebar. Data pada periode 2013-2014 menunjukkan penurunan Indeks Williamson yaitu dari 0,4708 pada tahun 2013 menjadi 0,4479 tahun 2014. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di DIY semakin berkurang karena ketersediaan sarana aprasarana dasar pada wilayah tertinggal semakin meningkat, sehingga mendukung perbaikan akses masyarakat terhadap pertumbuhan perekonomian wilayah.



Sumber: Analisis PDRB DIY, Bappeda DIY

Gambar 3.23 Indeks Williamson DIY, 2008-2014

Capaian-capaian dari program yang sudah dilaksanakan di atas juga bisa dilihat dari beberapa indikator seperti ketersediaan infrastruktur yang telah membaik di kawasan pedesaan, misalnya sarana jalan, sarana sanitasi, dan pengembangan perumahan yang layak huni.

Disisi lain pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi isu penting pembangunan. Setiap tahun diperkirakan terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru rata-rata sekitar 6.325 unit rumah. Pembangunan/pengembangan unit baru diharapkan akan meningkat sebesar 2,5% per tahun hingga tahun 2020. Berdasarkan data SUSENAS tahun 2007 masih terdapat 91.200 keluarga yang belum memiliki rumah yang layak huni. Dari jumlah tersebut yang tidak layak huni terbagi sebanyak 40% di pedesaan dan 60% di perkotaan. Data Dinas PU-P dan ESDM sampai dengan akhir tahun 2013, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di DIY menurun menjadi 83.063 unit atau setara dengan 7.92% dari jumlah total unit rumah yang ada di DIY. Target kinerja tahun 2014 yang ditetapkan dalam RPJMD DIY adalah menurunkan angka tersebut menjadi 7,5%. Total RTLH yang ditangani pada tahun 2014 adalah 5.299 unit secara kumulatif pengurangan jumlah RTLH sampai dengan akhir tahun 2014 adalah 77.764 unit atau 7.49% dari jumlah total unit rumah di DIY. Angka ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 7.50%.



Gambar 3.24 Peletakan simbolis penanganan RTLH di Kabupaten Kulon Progo

Perwujudan rumah sehat juga dilakukan melalui upaya mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pemenuhan akan rumah secara swadaya, maka Pemerintah DIY setiap tahun memfasilitasi dengan memberikan stimulan bahan bangunan kepada komunitas perumahan. Sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan fasilitasi pemberdayaan bagi 219 komunitas. Melalui APBD tahun 2014 telah dilakukan pemberdayaan bagi 64 komunitas perumahan meliputi 4 komunitas di Yogyakarta, 15 komunitas di Sleman, 14 komunitas di Kulon Progo, 16 komunitas di Bantul, dan 15 komunitas di Gunung Kidul. Sehingga sampai akhir 2014 secara kumulatif telah tertangani sebanyak 283 komunitas perumahan (64,61% dari total komunitas yang ada di DIY).

Pembangunan unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dalam rangka penataan kawasan kumuh di perkotaan telah mencapai 24 unit sampai dengan tahun 2013. Keseluruhan pembangunan Rusunawa bersumber dari APBN sedangkan untuk pembebasan lahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sebaran Rusunawa yang ada di DIY sebagian besar berlokasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Adapun peruntukan penggunaan dari Rusunawa tersebut adalah untuk; masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja, dan pendidikan.

Pada tahun 2014 telah terbangun 46 Rusunawa yang dilakukan Kemenpera dan Kemen PU.

Selain itu juga telah dilakukan upaya penataan kawasan kumuh. Kawasan kumuh adalah kawasan di mana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya. Berdasarkan kajian dari NUSSP Tahun 2009 bahwa kawasan kumuh di DIY sebanyak 69 kawasan yakni di Kabupaten Bantul sebanyak 9, Kabupaten Kulon Progo 10, Kabupaten Gunungkidul 9, Kabupaten Sleman 12 dan Kota Yogyakarta 29 yang terdiri dari 107 titik lokasi kumuh. Pada akhir tahun 2013 telah tertangani sebanyak 35 lokasi kumuh, atau 32,71% dari total 107 kawasan kumuh. Melalui dana APBD DIY Tahun Anggaran 2014 ditangani 6 lokasi kumuh dengan rincian Kabupaten Bantul 1 lokasi, Kabupaten Kulonprogo 2 lokasi, Kabupaten Sleman 1 lokasi, Kabupaten Gunungkidul 1 lokasi dan Kota Yogyakarta 1 lokasi. Capaian penanganan lokasi kumuh sampai akhir tahun 2014 adalah sebanyak 41 lokasi atau setara dengan 38,32% dari total lokasi kumuh di DIY. Capaian ini melebihi target kinerja 2014 yang ditetapkan sebesar 34%.

Tabel 3.28 Persentase Lokasi Kumuh Yang Telah Ditangani

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Persentase lokasi kumuh yang telah ditangani (%)	2,8	5,6	8,4	11,2	14	19,6
Jumlah lokasi kumuh yang telah ditangani	3	3	3	3	3	6
Jumlah lokasi kumuh (titik)	107	107	107	107	107	107

Sumber: Bappeda DIY, 2013, diolah

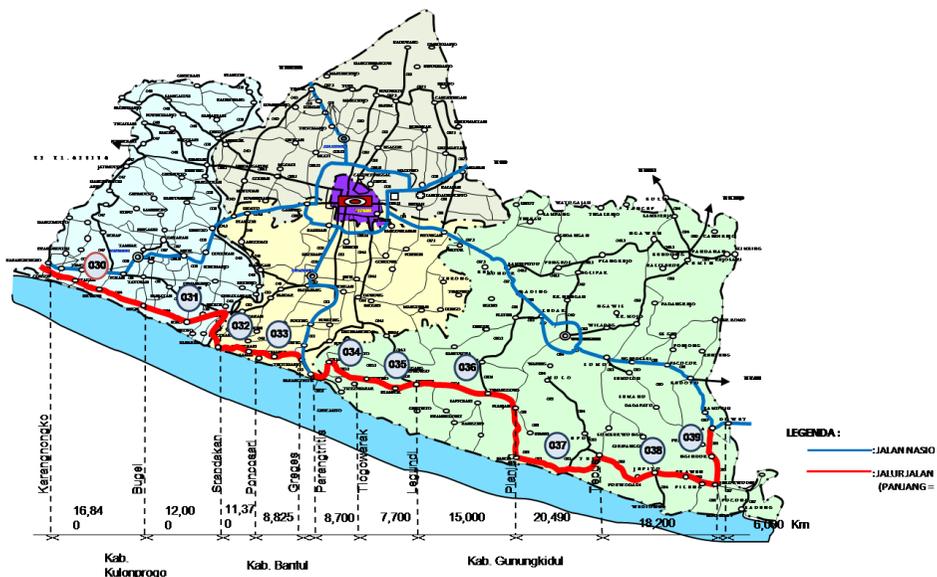
Terkait dengan sarana sanitasi dan cakupan rumah tangga dengan kondisi sanitasi yang layak, data menunjukkan bahwa persentase rumah tangga dengan sanitasi yang layak telah meningkat dari tahun ke tahun. Dengan tolok ukur layak salah satunya adalah telah tersambung dengan sistem terpusat untuk kawasan KPY. Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY dicapai melalui pelaksanaan program-program pendukung penyediaan sarana dan prasarana dasar Pengembangan Pengelolaan Air Limbah. Sampai dengan tahun 2013 cakupan pelayanan IPAL Sewon telah mencapai sekitar 16.191 SR. Adapun hingga tahun 2014 sambungan rumah yang terpasang sejumlah 18.701 atau telah melampaui target tahun 2014 sebesar 15.800 sambungan rumah. Adapun capaian Tahun 2014 terhadap target akhir RPJM pada tahun 2017 telah mencapai 93,51 %.

Pengelolaan persampahan menjadi kunci utama bagi kesehatan lingkungan. Pelayanan minimal pengelolaan persampahan dilakukan melalui pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengelolaan sampah di DIY dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan oleh masyarakat secara mandiri. Untuk pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul dilakukan dengan penyediaan sistem pengelolaan sampah terpadu TPA Piyungan. Hingga saat ini di DIY telah terbangun dua TPA Sanitary Landfill yang berada di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo..

Pada tahun 2013 pencapaian target pengelolaan sampah ramah lingkungan DIY secara kumulatif sebesar 53%. Pada tahun 2014 melalui program Pengelolaan Persampahan telah dibangun Prasarana Dan Sarana Persampahan sejumlah 2 unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R. Melalui dukungan APBN dilakukan pembangunan TPST 3R sejumlah 3 unit, optimalisasi TPST 3R sejumlah 3 Unit dan optimalisasi TPA sanitary landfill di 2 lokasi, sehingga total persentase penerapan

sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan mencapai 57,26%. Capaian ini telah melampaui target 2014 sebesar 55%.

Salah satu upaya mengatasi ketimpangan antar wilayah dilakukan dengan pengembangan wilayah pesisir secara terpadu, mengingat wilayah pesisir DIY merupakan daerah tertinggal dan miskin. Salah satunya adalah strategi pembangunan baru di kawasan Pantai Selatan, yakni kegiatan yang memanfaatkan potensi adanya pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan antara lain rencana pembangunan Bandara Baru, pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta, pembangunan pabrik Pig Iron dan Konsentrat Biji Besi dan pengolahan pasir besi yang mempengaruhi kegiatan dan guna lahan di Kawasan Pantai Selatan. Strategi ini tergambar dalam peta berikut ini.



Gambar 3.25 Peta Pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan

Permasalahan:

- a. Dinamika sosial masyarakat dalam pengembangan kawasan pesisir selatan, terutama adalah menyangkut proses pembebasan lahan dan juga keterkaitannya dengan aktivitas ekonomi produktif masyarakat. Isu utama yang muncul adalah sejauh mana strategi pemerintah—dalam melibatkan investor agar bisa bersinergi dengan masyarakat lokal yang bermata pencaharian dari aktivitas ekonomi tradisional seperti pertanian dalam arti luas.

- b. Posisi strategis pemerintah dalam pengurangan kesenjangan antar wilayah, seperti juga terkait sasaran peningkatan pendapatan, peran pemerintah bukanlah menjadi faktor tunggal dalam upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah. Namun demikian, ini tidak mengurangi peran strategi pemerintah untuk menjadi katalisator dan fasilitator, dengan memberikan dukungan kebijakan, mengembangkan proteksi sosial bagi kelompok marjinal dan mengembangkan pusat pertumbuhan baru.

Solusi:

- a. Pengembangan kawasan dan pembukaan kawasan pertumbuhan baru perlu dilakukan dengan mengedepankan partisipasi dan akuntabilitas pada publik, dan perlindungan terhadap usaha ekonomi lokal. Proses dialog dalam pengembangan kebijakan dan kawasan pertumbuhan baru seringkali membutuhkan waktu dan proses tambahan, namun strategi ini bukan hanya menjadikan tujuan bisa dicapai namun juga meningkatkan legitimasi dan dukungan publik.
- b. Insentif untuk pihak-pihak non pemerintah untuk mendukung pengembangan kawasan pertumbuhan baru. Pihak non pemerintah ini bisa mencakup dunia usaha maupun juga inisiatif yang dikembangkan oleh masyarakat lokal, sehingga pusat-pusat pertumbuhan baru akan bisa semakin didorong dan dikuatkan.

8. Sasaran Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun

Salah satu indikator yang menjadi penanda ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Besarnya Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata.

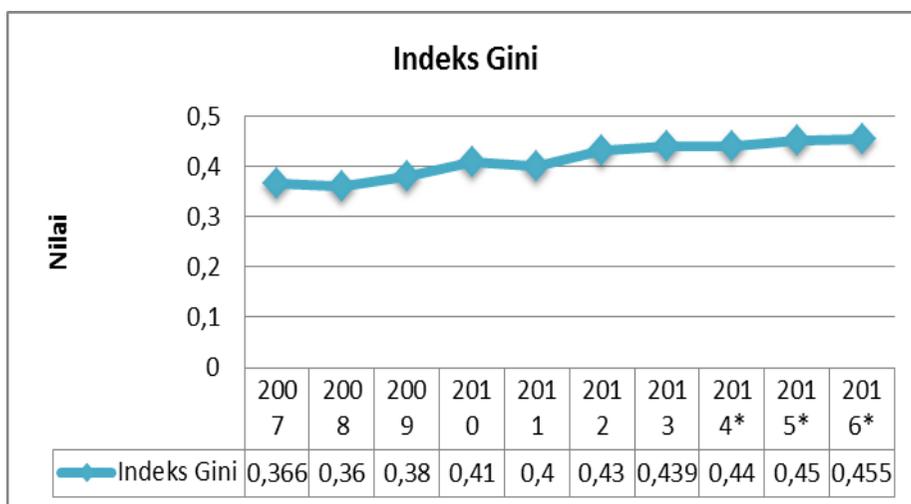
Penurunan ketimpangan pendapatan yang berhasil dicapai tahun 2014 mencapai 52,54 % dari target, atau memiliki capaian **kinerja rendah**. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini baru mencapai 48,85 % dari target indeks ketimpangan pendapatan sebesar 0,2878.

Tabel 3.29 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun

Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Ketimpangan Pendapatan	0,3187	0,298	0,435	52,54	0,2878	48,85

Data yang ada di DIY menunjukkan bahwa indeks gini dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Ini bisa dimaknai bahwa kesenjangan pendapatan di dalam masyarakat juga semakin melebar. Pada tahun 2014, indeks gini adalah 0,44, naik sedikit dari tahun 2013 sebesar 0,43.

Indeks ketimpangan pendapatan menunjukkan capaian yang belum optimal. Hal ini dipengaruhi belum meratanya distribusi pendapatan masyarakat. Pelambatan pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2014 turut mempengaruhi pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpendapatan rendah.



Gambar 3.26 Indeks Gini DIY, 2007-2016

Upaya menjawab persoalan ketimpangan juga didorong oleh pengembangan skema keluarga sejahtera. Data Tabel Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun 2009–2011 menunjukkan bahwa jumlah KK Pra Sejahtera terus mengalami kenaikan, sedangkan Keluarga Sejahtera I cenderung mengalami penurunan. Namun kondisi ini juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera III. Dengan kata lain, upaya yang berfokus pada mereka yang berada pada garis terbawah (Pra sejahtera dan KSI) perlu terus dikuatkan ke depan.

Tabel 3.30 Tahapan Keluarga Sejahtera DIY Tahun 2010 - 2014

No.	Tahapan Keluarga Sejahtera	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Jumlah KK				
1.	Pra S	187.277	225.823	225.823	222.299	267.571

No.	Tahapan Keluarga Sejahtera	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Jumlah KK				
2.	KS I	208.367	200.008	200.008	197.046	176.002
3.	KS II	198.237	146.038	146.038	150.670	158.482
4.	KS III	281.909	302.792	54.575	325.318	324.657
5.	KS III Plus	53.665	54.575	54.575	55.541	53.708
	Jumlah KK	929.455	929.455	929.236	950.875	980.420

Sumber: Perwakilan BKKBN DIY, 2014

Permasalahan:

- a. Kapasitas dan kondisi wilayah yang berbeda membutuhkan strategi dan pendekatan yang berbeda. Perbedaan ini bukan hanya pada aspek persoalan ketimpangan yang ada di masyarakat, namun juga dalam hal kapasitas pemerintah daerah.
- b. Cakupan keluarga dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terlayani oleh pemerintah masih sedikit. Padahal data tentang keluarga pra sejahtera dan sejahtera I justru makin meningkat. Koordinasi dengan pihak non pemerintah, dan pelibatan keluarga dan penyandang masalah kesejahteraan sosial harus dilakukan sebagai bagian dari strategi dan pencapaian sasaran pengurangan kesenjangan pendapatan.

Solusi:

- a. Penguatan peran pemerintah propinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mengkonsolidasikan upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah, termasuk dari sumber-sumber pembiayaan dari pusat (APBN).
- b. Keterlibatan keluarga dan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam program dan kegiatan untuk pengurangan kesenjangan pendapatan. Keterlibatan ini juga perlu disinergikan dengan keberadaan skema perlindungan sosial yang sudah ada di masyarakat, seperti skema arisan sambil mendorong peran pemerintah yang lebih kuat untuk inklusi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam kehidupan sosial masyarakat. Melibatkan mereka sebagai pihak kunci akan jauh lebih efektif dibandingkan memosisikan mereka sebagai sumber masalah.

9. Sasaran Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat

Pengembangan kepariwisataan di DIY mendapatkan prioritas utama, bersama dengan sektor pendidikan dan kebudayaan, dalam Visi Pembangunan DIY Tahun 2025 yang mewujudkan DIY sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, Sejahtera.



Gambar 3.27 Kunjungan wisatawan mancanegara

Capaian IKU tahun 2014 menunjukkan bahwa realisasi kunjungan wisatawan nusantara jauh melebihi target yang dipatok. Pada tahun 2014, realisasi jumlah wisatawan nusantara adalah sebanyak 3.091.967 wisatawan. Angka ini mencapai 112,23% dibandingkan target yang dipasang. Capaian ini juga telah melampaui target akhir RPJMD (103,01%) dari target sebanyak 2.437.614 wisatawan

pada tahun 2017. Dengan capaian ini, kinerja pencapaian IKU tahun 2014 adalah **sangat tinggi**.

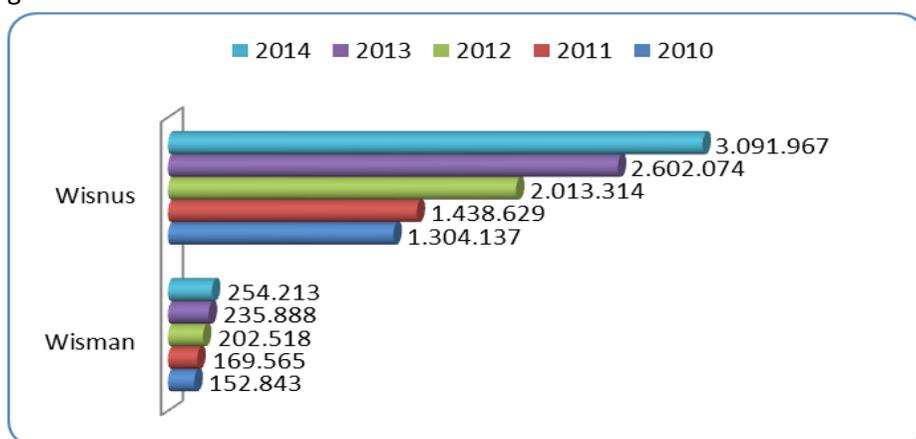
Begitu juga capaian IKU tahun 2014 untuk peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan bahwa realisasi kunjungan wisatawan nusantara jauh melebihi target yang dipatok. Pada tahun 2014, realisasi jumlah wisatawan mancanegara adalah sebanyak 254.213 wisatawan. Angka ini mencapai 101,74% dibandingkan target yang dipasang. Capaian ini juga telah berkontribusi pada akhir RPJMD (91,80%) dari target sebanyak 254.198 wisatawan pada tahun 2017. Dengan capaian ini, kinerja pencapaian IKU tahun 2014 adalah **sangat tinggi**.

Tabel 3.31 Rencana dan Realisasi Pencapaian Sasaran Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat

Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Jumlah wisatawan nusantara	2.602.074	2.754.981	3.091.967	112,23	4.561.646	67,78
Jumlah wisatawan mancanegara	235.888	249.854	254.213	101,74	272.162	93,40

Perkembangan pariwisata ini menunjukkan capaian yang menggembirakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tingkat kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini didukung oleh beragamnya potensi pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta baik potensi alam, budaya, serta berbagai potensi wisata lainnya. Kondisi ini tentunya memberikan nilai tambah dan daya saing yang semakin kuat baik secara nasional maupun internasional.

Tren jumlah wisatawan baik nusantara maupun mancanegara nampak dalam diagram berikut ini:



Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2014

Gambar 3.28 Tren Jumlah Wisatawan

Jumlah wisatawan nusantara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,. Begitu juga dengan jumlah wisatawan mancanegara, trennya menunjukkan kecenderungan positif dengan peningkatan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa DIY semakin diakui sebagai tujuan destinasi wisata baik di tingkat domestik maupun di skala global. Pertumbuhan pariwisata DIY ini juga didorong peningkatan penyelenggaraan *Meetings Incentives Conference Exhibitions* (MICE). Tercatat pada tahun 2014 terdapat penyelenggaraan 12.829 MICE di hotel berbintang DIY. Jumlah ini meningkat 6,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah ketersediaan infrastruktur hotel dan ruang pertemuan lainnya yang semakin meningkat dari sisi kuantitas dan kualitasnya.

Jika dilihat dari pilihan jenis akomodasi yang digunakan, terdapat perbedaan pilihan antara wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Wisatawan Mancanegara cenderung memilih hotel bintang daripada hotel non bintang. Sementara itu jumlah wisatawan nusantara yang menggunakan hotel non bintang jauh lebih tinggi daripada yang menggunakan hotel bintang. Kebutuhan atas kenyamanan serta mutu pelayanan yang tinggi diindikasikan menjadi alasan bagi wisatawan mancanegara untuk memilih hotel bintang. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pelaku industri jasa akomodasi untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanannya.

Tabel 3.32 Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara berdasarkan jenis akomodasi yang tahun 2009 -2014

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Wisatawan Mancanegara	139.492	152.843	169.565	197.751	235.893	254.213
Hotel Bintang	114.066	124.060	133.868	154.979	179.404	199.864
Hotel Non Bintang	25.426	28.783	35.697	42.772	56.489	54.349
Wisatawan Nusantara	1.286.565	1.304.137	1.438.129	2.162.422	2.602.074	3.091.967
Hotel Bintang	645.552	663.189	667.792	990.676	1.026.745	1.194.148
Hotel Non Bintang	641.013	640.948	770.337	1.171.746	1.575.329	1.897.819

Sumber: Dinas Pariwisata DIY,2014

Permasalahan:

- a. Walaupun potensi pariwisata DIY sebetulnya sangat terbuka dan masih mungkin dikembangkan lagi, namun, salah satu hambatan adalah membangun sinergi antara event-event budaya dengan pola distribusi dan kalender musim pariwisata. Terdapat bulan-bulan dimana jumlah

wisatawan meningkat seperti liburan sekolah atau liburan hari raya dan akhir/ awal tahun. Pengelolaan event budaya yang disinergikan dengan momentum seperti ini akan bisa meningkatkan jumlah wisatawan yang lebih banyak lagi

- b. Pentingnya sektor pariwisata juga bisa dilihat dari dukungan dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan nilai, keragaman dan kekayaan budaya yang ada. Namun demikian, upaya-upaya ini masih perlu disinergikan dan mendapatkan dukungan dari pemerintah, seperti dukungan kebijakan dan sarana-prasarana yang akan menjadi *enabling environment* bagi inisiatif masyarakat dalam pengembangan wisata berbasis budaya
- c. Seiring peningkatan kunjungan wisatawan, dinilai tingkat pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata yang profesional belum memadai sesuai dengan jumlah dan karakteristik wisatawan yang semakin beragam

Solusi:

- a. Memperluas pilihan wisata dengan memperbaharui destinasi wisata termasuk destinasi baru yang beragam
- b. Sarana pendukung untuk meningkatkan kepuasan wisatawan, seperti sarana transportasi, ataupun sarana dan prasarana yang lain
- c. Pelembagaan partisipasi masyarakat dan dukungan bagi inisiatif masyarakat dalam pengembangan sarana dan destinasi wisata

10. Sasaran Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Meningkat

Lama tinggal wisatawan menjadi sasaran penting selain meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung. Dengan lama tinggal wisatawan yang lebih panjang, diharapkan akan memberikan kesempatan bagi wisatawan dalam berbelanja atau membeli produk/jasa pendukung yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat dari sektor riil.

Di tahun 2014, lama tinggal wisatawan nusantara ditargetkan sebanyak 2,15 hari per wisatawan nusantara. Target ini dipatok naik sebanyak 35% dibandingkan capaian tahun 2013. Realisasinya pada tahun 2014 menunjukkan capaian sebanyak 1,58 hari per wisatawan atau sebanyak 73,49% dibandingkan target. Capaian ini juga berarti 60,77% dibandingkan target pada akhir RPJMD yaitu sebanyak 2,6 hari. Pencapaian ini juga bermakna **sedang** untuk pencapaian sasaran 11 dalam IKU tahun 2014.

Di tahun 2014, lama tinggal wisatawan mancanegara ditargetkan sebanyak 2.25 hari per wisatawan nusantara. Target ini dipatok naik sebanyak 18,4% dibandingkan capaian tahun 2013. Realisasinya pada tahun 2014 menunjukkan

capaian sebanyak 1,95 hari per wisatawan atau sebanyak 88,67% dibandingkan target. Capaian ini juga berarti 72,49% dibandingkan target pada akhir RPJMD yaitu sebanyak 2,69 hari. Pencapaian ini juga bermaka **kinerja tinggi** untuk pencapaian sasaran 11 dalam IKU tahun 2014.

Tabel 3.33 Rencana dan Realisasi Pencapaian Sasaran Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Meningkat

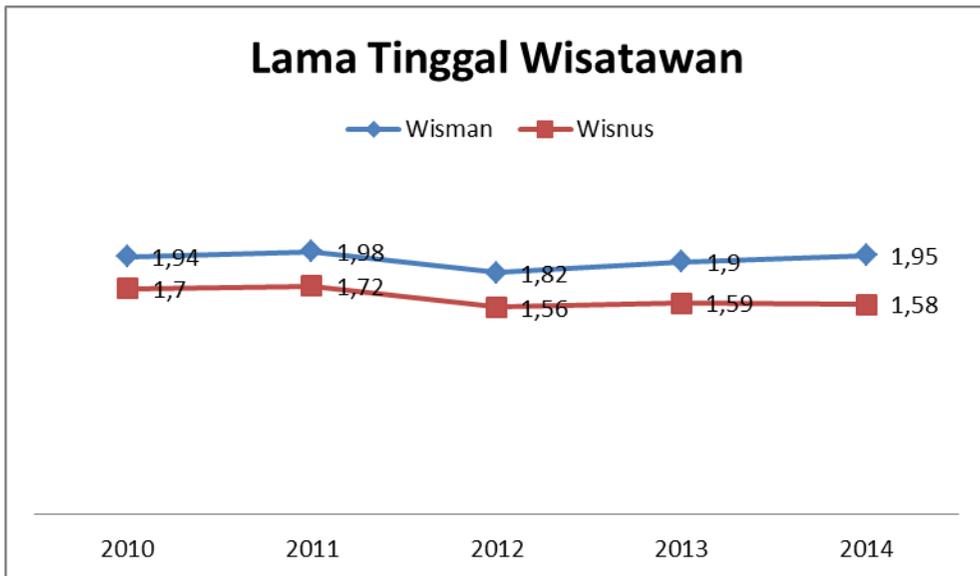
Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	1,59	2.15	1,58	73,49	2,6	60,77
Lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	1,90	2,25	1,95	86,67	2,69	72,49

Untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan, telah dilakukan peningkatan baik destinasi maupun event pariwisata. Pengembangan destinasi wisata dilakukan antara lain melalui kegiatan pembangunan sarana prasana destinasi wisata, peningkatan standarisasi pelaku usaha pariwisata dan pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata menjadi perhatian pembangunan pariwisata DIY mengingat potensi serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Selain itu, melalui program pengembangan kemitraan, dilakukan kegiatan penyelenggaraan event dan fasilitasi penyelenggaraan event untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata di DIY. Strategi penyelenggaraan event dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat atau komunitas.

Infrastruktur jalan yang bagus, sikap ramah tamah dan lingkungan yang nyaman diharapkan mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan sehingga akan meningkat kesejahteraan para pelaku industri wisata di Yogyakarta.

Data historis tentang lama kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara berfluktuasi, walaupun cenderung naik pada tahun 2014. Pada tahun 2014, lama kunjungan wisatawan nusantara adalah 1.58 hari sementara wisatawan mancanegara lebih lama tinggal yaitu 1.95 hari.

Gambar 3.29 Lama Kunjungan Wisatawan



Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2014

Apabila dilihat dari jenis akomodasi yang digunakan, lama tinggal wisatawan baik mancanegara maupun nusantara pengguna hotel bintang lebih tinggi daripada hotel non bintang pada tahun 2014. Lama tinggal wisatawan mancanegara di hotel bintang meningkat dari sebesar 1,95 hari pada tahun 2013 menjadi 2,01 hari. Tahun 2014, lama tinggal wisatawan nusantara yang menggunakan hotel bintang sebesar 1,62 hari, nilai tersebut lebih tinggi dari hotel non bintang yang hanya mencapai 1,56 hari. Lama tinggal wisatawan di hotel non bintang yang lebih rendah diperkirakan karena pengguna jasa akomodasi ini adalah wisatawan backpacker yang lebih ketat dalam hal pengeluaran. Di sisi lain, lama tinggal wisatawan di hotel bintang yang lebih panjang didukung juga dengan pelaksanaan MICE baik dari instansi pemerintah maupun swasta yang cenderung menggunakan hotel bintang karena adanya fasilitas ruang pertemuan atau konferensi.

Tabel 3.34 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara di DIY Berdasarkan Jenis Akomodasi, 2009-2014

Akomodasi	Tahun					
	2009		2010		2011	
	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus
Hotel Non Bintang	1.8	1.8	1.86	1.76	1.82	1.74
Hotel Bintang	2.02	1.63	1.96	1.71	2.02	1.76
Akomodasi	Tahun					
	2012		2013		2014	
	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus
Hotel Non Bintang	1.74	1.59	1.73	1.56	1.74	1.56
Hotel Bintang	1.84	1.57	1.95	1.70	2.01	1.62

Sumber: Dinas Pariwisata DIY

Perkembangan lama tinggal DIY memang masih belum optimal, namun demikian jika diurai lebih dalam lagi, produktivitas hotel baik bintang dan non bintang secara konsisten menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2014, jumlah tamu yang menginap baik wisatawan mancanegara maupun nusantara tumbuh 17,91% dari tahun sebelumnya. Demikian juga dengan jumlah malam tamu (*Guest Night*) yang pada tahun 2014 tumbuh 17,21% dibandingkan dengan tahun 2013. Lama tinggal wisatawan di DIY masih belum optimal namun disini lain dari tabel produktivitas hotel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah kamar yang terjual oleh penyedia jasa akomodasi mengalami pertumbuhan setiap tahun.

Tabel 3.35 Produktivitas Hotel Bintang dan Non Bintang 2009-2014

Hotel/Tamu	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Malam Tamu/Guest Night (Orang hari)						
Wisatawan Mancanegara	275.875	296.482	335.991	359.622	447.870	496.686
Hotel Bintang	229.990	242.994	271.043	285.093	349.910	401.858
Hotel Non Bintang	45.885	53.488	64.948	74.529	97.960	94.828
Wisatawan Nusantara	2.242.760	2.213.015	2.477.905	3.379.614	4.148.493	4.890.885
Hotel Bintang	1.090.850	1.082.243	1.139.055	1.517.128	1.698.150	1.932.973
Hotel Non Bintang	1.151.910	1.130.772	1.338.850	1.862.486	2.450.343	2.957.912
Jumlah Tamu/Guest Arrival (Orang)						
Wisatawan Mancanegara	139.492	152.843	169.565	197.751	235.893	254.213
Hotel Bintang	114.066	124.060	133.868	154.979	179.404	199.864
Hotel Non Bintang	25.426	28.783	35.697	42.772	56.489	54.349
Wisatawan Nusantara	1.286.565	1.304.137	1.438.129	2.162.422	2.602.074	3.091.967
Hotel Bintang	645.552	663.189	667.792	990.676	1.026.745	1.194.148
Hotel Non Bintang	641.013	640.948	770.337	1.171.746	1.575.329	1.897.819
Lama Tinggal						
Wisatawan Mancanegara	1,98	1,94	1,98	1,82	1,90	1,95
Wisatawan Nusantara	1,74	1,70	1,72	1,56	1,59	1,58

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2014

Pada sisi penawaran terjadi peningkatan jumlah jasa akomodasi baik hotel bintang maupun non bintang meningkat sebesar 8,4% pada tahun 2014. Tercatat jumlah total jasa akomodasi sebesar 575 dengan komposisi terbesar adalah hotel non bintang yaitu sekitar 91%. Peningkatan hotel dengan kualifikasi bintang dari sejumlah 51 pada tahun 2013 menjadi 54 pada tahun 2014 menunjukkan bahwa pelaku industri perhotelan di DIY mampu mempertahankan persyaratan mutu pelayanan untuk hotel bintang. Sementara itu, pertumbuhan jumlah akomodasi hotel non bintang menandakan tumbuhnya hotel-hotel baru di DIY. Pertumbuhan jumlah jasa akomodasi tersebut harus diikuti dengan kebijakan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan.

Tabel 3.36 Perkembangan Jumlah Akomodasi Berdasarkan Jenis Tahun 2009-2014

Jenis Akomodasi	Tahun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Hotel Bintang Lima	4	4	4	4	6	6
Hotel Bintang empat	8	8	8	9	9	11
Hotel Bintang Tiga	6	5	8	14	15	16
Hotel Bintang Dua	4	5	7	8	10	12
Hotel Bintang Satu	13	10	10	10	11	9
Hotel Non Bintang	385	385	415	447	479	521
Total	420	417	452	492	530	575

Sumber: Dinas Pariwisata DIY



Gambar 3.30 Cagar Budaya Istana Ratu Boko

Seperti juga upaya peningkatan jumlah wisatawan, salah satu daya tarik untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan adalah pengelolaan dan promosi terkait tentang bangunan cagar budaya. Bangunan Cagar Budaya merupakan satu kesatuan filosofis dan sejarah yang dalam pelestariannya perlu dipertimbangkan sehingga ada keseimbangan arkeologis, historis dan kekhasan masing-masing kawasan cagar budaya. Kekayaan BCB di DIY menduduki peringkat ketiga nasional setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kawasan Cagar Budaya di DIY ada 13 Kawasan, dan yang sudah

ditetapkan dengan SK Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya di DIY yaitu Kraton, Puro Pakualaman, Malioboro, Kotabaru, Kotagede, Imogiri, yang lain menjadi kewenangan pusat (Prambanan dan Ratu Boko) dan kabupaten (Ambarketawang, Ambarbinangun, Parangtritis, Sokoliman).

Terdapat sebanyak 13 kawasan cagar budaya di wilayah DIY yang tersebar di Kab. Bantul sebanyak 2 kawasan cagar budaya, di Kab. Gunungkidul sebanyak 1 kawasan cagar budaya, di Kab. Sleman sebanyak 3 kawasan cagar budaya, di Kota Yogyakarta sebanyak 6 kawasan cagar budaya. Museum yang tersebar di DIY ada

sekitar 38 museum yang tersebar di Kab Bantul sebanyak 5, Kab. Gunungkidul sebanyak 1, Kab. Sleman sebanyak 12, dan Kota Yogyakarta sebanyak 20, yang sudah masuk Barahmus ada 32 Museum. Keseluruhan koleksi yang ada di 38 museum tersebut sekitar 68.217 buah benda cagar budaya. Dari 38 museum tersebut, museum Ullen Sentalu dan museum Sonobudoyo diproyeksikan menjadi museum internasional. Museum merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pemahaman dan penanaman nilai-nilai budaya luhur kepada masyarakat. Melalui museum masyarakat dapat memahami nilai-nilai luhur sejarah bangsa di masa lalu yang dapat diterapkan di masa sekarang.

Kelestarian cagar budaya di DIY dilindungi oleh Pemerintah Pusat melalui UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Pemerintah Daerah memperkuat melalui Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. BCB dan situs yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki posisi tiga nasional. Sampai pada tahun 2012 benda cagar budaya terdapat 715 buah, yang ditetapkan sudah mencapai 521 buah. Jumlah kawasan cagar budaya ada 16 buah, baru 6 buah yang ditetapkan melalui SK Gubernur. Juru Pelihara BCB dan situs di DIY ada 4 orang. BCB dan situs ada yang menyebar di Kawasan-kawasan Cagar Budaya, ada yang parsial di berbagai tempat, dan ada pula yang tersimpan di museum.



Gambar 3.31 Museum Ullen Sentalu

Tabel 3.37 Kawasan Cagar Budaya di DIY

No	Kawasan Cagar Budaya	SK Penetapan
1	Kraton	SK Gubernur 2011
2	Puro Pakualaman	SK Gubernur 2011
3	Kotagede	SK Gubernur 2011
4	Imogiri	SK Gubernur 2011
5	Kotabaru	SK Gubernur 2011
6	Malioboro	SK Gubernur 2011
7	Ambarketawang	SK Bupati
8	Ambarbinangun	SK Bupati

No	Kawasan Cagar Budaya	SK Penetapan
9	Pleret	Situs, dalam proses penetapan
10	Sokoliman	Situs, dalam proses penetapan
11	Prambanan	SK Menteri
12	Ratu Boko	SK Menteri
13	Parangtritis	Situs, dalam proses penetapan

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Tabel 3.38 Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, 2009-2013

Jenis Data	2009	2010	2011	2012	2013
Benda Cagar Budaya yang ditetapkan	511	511	515	521	521
Kawasan Cagar Budaya	12	13	13	16	16
Situs	96	96	96	96	96
Monumen Sejarah Perjuangan	44	44	44	44	44
Museum	34	34	38	42	42

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Permasalahan:

- a. Dalam aspek destinasi pariwisata, sudah dilakukan pengembangan berbagai daya tarik wisata baru dan pemeliharaan berbagai daya tarik wisata yang sudah ada namun belum optimal
- b. Dalam hal kemitraan pariwisata, jejaring, kerjasama dan koordinasi yang sinergis (keterpaduan) antar pelaku pariwisata (stakeholder) terutama pemberdayaan/keterlibatan masyarakat di sekitar daya tarik wisata masih dirasakan kurang intensif
- c. Pemeliharaan bangunan cagar budaya masih belum terkelola dengan baik. Ini bisa dilihat dalam kemunculan bangunan baru di dalam kawasan Cagar Budaya yang walaupun bisa menjadi faktor positif karena merupakan fasilitas pelengkap, juga bisa bersifat negatif jika kemunculannya tidak terkendali. Juga persoalan penegakan regulasi seringkali yang masih perlu dikuatkan ketika terjadi persoalan dengan pengembangan fasilitas pendukung di kawasan cagar budaya
- d. Keunikan, keindahan, kelangkaan BCB acapkali menjadi daya tarik bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindak pengrusakan dan pencurian, bahkan BCB yang tersimpan dalam museum pun terancam keselamatannya. BCB di DIY pun tidak luput dari ancaman itu. Perusakan BCB baik sengaja maupun tidak sengaja banyak terjadi.

Solusi:

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan event-event kepariwisataan dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata dan lama tinggal wisatawan dengan strategi melibatkan komunitas/masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dengan memperhatikan lokasi, waktu, kualitas event dan strategi pemasaran yang tepat.
- b. Meningkatkan kualitas daya tarik wisata baru melalui pengembangan sarana prasarana pariwisata, meningkatkan peran serta pelaku industri pariwisata maupun kelompok/masyarakat pengelola dan pengembangan paket-paket wisata yang lebih kreatif dan inovatif.
- c. Mengintensifkan jejaring, kerjasama dan koordinasi yang sinergis (keterpaduan) antar pelaku pariwisata (stakeholder) baik antar pelaku di dalam maupun luar DIY terutama dengan meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat di sekitar obyek / daya tarik wisata
- d. Meningkatkan kegiatan pelatihan, sertifikasi dan pengawasan mutu SDM pariwisata
- e. Sebagai salah satu destinasi wisata internasional, upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan mancanegara adalah menjadikan Yogyakarta menjadi wilayah yang ramah dan terbuka, serta daya dukung seperti sarana dan prasarana wisata yang nyaman dan memadai. Sarana transportasi, perhotelan dan restoran, hingga informasi destinasi wisata yang bisa diakses oleh wisatawan mancanegara dengan beragam kebangsaan, akan menjadikan lama tinggal wisatawan bisa ditingkatkan.
- f. Bagi wisatawan mancanegara, bangunan cagar budaya menjadi salah satu daya tarik utama yang bersama dengan event-event budaya akan bisa meningkatkan lama tinggal wisatawan mancanegara. Untuk menjadikan bangunan cagar budaya menjadi lebih terawat, pengembangan pariwisata perlu dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat dan strategi pengentasan kemiskinan ataupun peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan strategi ini, pelibatan dan kontribusi masyarakat akan menjadi maksimal karena dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Pelibatan masyarakat ini juga bisa meminimalkan persoalan-persoalan seperti penegakan regulasi dan pengrusakan bangunan cagar budaya.

11. Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggung-jawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam RPJMD DIY 2012-2017, perhatian DIY akan pentingnya akuntabilitas, bisa dilihat dalam rumusan misi ke-3 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan juga pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain. Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang bagi berbagai pihak.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan adalah nilai A untuk akuntabilitas kinerja pemerintah, yang telah berhasil dicapai (133,33%), atau bernilai **kinerja sangat tinggi**. Dengan pencapaian ini, bahkan menyumbang 100% terhadap target akhir RPJMD yaitu mencapai nilai A pada tahun 2017. Sebagai catatan, kinerja ini adalah realisasi kinerja pemerintah daerah tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kemenpan tahun 2014, karena proses penilaian akuntabilitas kinerja tahun 2014 sedang dalam proses ketika laporan ini disusun.

Tabel 3.39 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A	B+	A	133,33	A	100

Menurut penilaian Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, beberapa hal penting dari penilaian akuntabilitas Pemda DIY adalah sebagai berikut:

- a. Pemda DIY meraih nilai 76,36 atau mencapai predikat A. Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:
 - o Perencanaan Kinerja meraih nilai 26,95
 - o Pengukuran Kinerja meraih nilai 14,90
 - o Pelaporan Kinerja meraih nilai 11,91
 - o Evaluasi Kinerja meraih nilai 7,60
 - o Capaian Kinerja meraih nilai 15,00
- b. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja di lingkungan Pemda DIY yang dievaluasi.
- c. Pemda DIY telah membangun akuntabilitas kinerja pada tingkat pemerintah provinsi dan SKPD dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang meliputi perencanaan, kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja
- d. Secara umum, evaluasi atas kinerja Pemda DIY adalah baik, namun ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk perbaikan ke depan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.40 Hasil Penilaian Akuntabilitas Pemda DIY Tahun 2014, Kemenpan-RB

Aspek	Tantangan dan Rekomendasi
Perencanaan Kinerja	Target kinerja tahunan dalam penetapan kinerja dan monitoring dan evaluasi (monev) capaian kinerja secara berkala pada sebagian SKPD implementasinya masih belum optimal, yaitu target kinerja tahunan belum diturunkan ke target kinerja triwulanan, analisis capaian kinerja triwulanan masih kurang lengkap khususnya terkait dengan rencana perbaikan atas hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja
	Pemanfaatan monev berkala atas capaian penetapan kinerja belum dimanfaatkan optimal untuk mengarahkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD
Pengukuran Kinerja	Sistem pengumpulan data kinerja yang dibangun SKPD sebagian belum dapat menghasilkan data kinerja yang cepat dan akurat
	Pemanfaatan pengukuran hasil kinerja secara berkala dan tahunan atas capaian IKU belum dimanfaatkan secara optimal oleh SKPD untuk umpan balik perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan
Pelaporan Kinerja	Lakip sebagian SKPD belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya dan dengan target kinerja jangka menengah

Aspek	Tantangan dan Rekomendasi
	Pemanfaatan informasi kinerja dalam LAKIP untuk perbaikan perencanaan kinerja secara berkelanjutan belum dilakukan secara optimal
Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja belum fokus dilakukan pada keberhasilan pencapaian target kinerja program tetapi masih terfokus pada penyerapan anggaran dan fisik kegiatan. Juga belum mengidentifikasi rekomendasi-rekomendasi untuk peningkatan kinerja program yang dilaksanakan
Capaian Kinerja	Pencapaian kinerja dinilai dari aspek pencapaian target, dan keandalan data kinerja, serta keselarasan kinerja <i>output</i> dengan kinerja <i>outcome</i> . Capaian kinerja bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial dan ekonomi sudah baik, juga kinerjanya lainnya. Belum optimalnya ketercapaian <i>outcome</i> disebabkan masih ada sasaran yang tidak berorientasi hasil dan indikator kinerja yang tepat

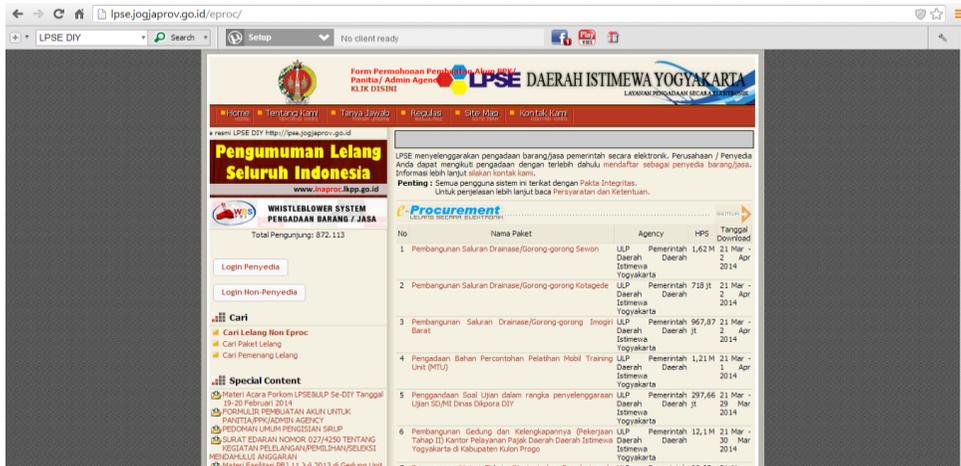
Secara Nasional dari 33 provinsi, hanya ada 2 provinsi yang mendapat nilai A yaitu DIY dan Jawa Timur., sementara 82 penyelenggara pemerintahan yang dinilai tingkat provinsi dan kementerian/lembaga, juga hanya ada 2 instansi yang mendapat nilai A dan, DIY merupakan 1 dari 2 Instansi pemerintah yang mendapat nilai A tersebut.

Beberapa hal telah dilakukan oleh Pemda DIY untuk mendorong akuntabilitas juga bisa dilihat dari upaya menindaklanjuti Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Pemda DIY melalui Peraturan Gubernur Nomer 42 tahun 2006 telah menetapkan *Blueprint Jogja Cyber Province* yang dititikberatkan pada program *Digital Government Services (DGS)* sebagai panduan strategis implementasi dan pengembangan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.



Gambar 3.32 Kerangka *Digital Government Services (DGS)*

Dalam dokumen DGS yang telah diperbaharui, pada tahun 2013 direncanakan ada 10 program yang menjadi unggulan dalam pelaksanaan DGS dan telah tercapai. Seluruh program layanan sudah dikembangkan dengan pelayanan secara *on-line*. Beberapa program pendukung pelaksanaan DGS di Pemerintah Daerah DIY untuk pelayanan masyarakat dan pelayanan internal pemerintahan antara lain Portal Pemda DIY jogjaprov.go.id, LPSE (Pengadaan Barang Secara Elektronik), CPNS *On-line* (Penerimaan CPNS Secara Online), SIPKD (Sistem Informasi Penganggaran Keuangan Daerah), Web Monev, Jogja Plan, SIM Pegawai, SIM Perijinan Terpadu Pemda DIY, Sistem Informasi Jembatan Timbang, Sistem Informasi Perijinan *online*, dan lain sebagainya.



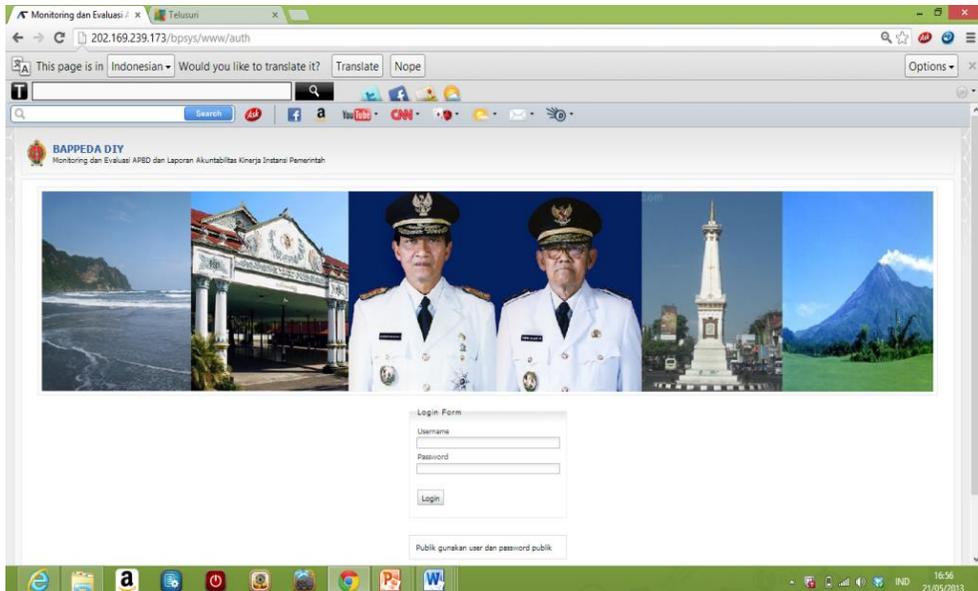
Gambar 3.33 LPSE DIY

Dengan konsep *e-government* tersebut, peran dan keterlibatan masyarakat dalam berinteraksi melalui jaringan elektronik akan lebih terberdayakan. Masyarakat dapat ikut terlibat dan berperan aktif dalam mendukung dan memberikan partisipasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, informasi dan layanan kepada masyarakat dapat lebih mudah diakses dan digunakan. Konsep inilah yang dinamakan layanan teknologi berbasis *Citizen Centris*.

Pembangunan infrastruktur jaringan komputer di Pemerintah Daerah DIY telah dimulai sejak tahun 2002 dan telah mengalami pengembangan sampai saat ini. Pembangunan jaringan komputer tersebut memungkinkan terkoneksi tiap-tiap SKPD dalam jaringan internet/intranet, sehingga tranformasi data dan informasi antar unit kerja dapat berjalan semakin lancar. Sampai dengan akhir tahun 2013, jaringan infrastruktur komputer Pemerintah Daerah DIY telah menghubungkan 104 titik lokasi di lingkup Pemerintah Daerah DIY dengan rincian :

- Menggunakan jaringan kabel *fiber optic* sejumlah 19 titik
- Menggunakan jaringan kabel HFC sejumlah 35 titik
- Menggunakan jaringan *wireless* sebanyak 50 titik

Dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan ini, partisipasi masyarakat juga didorong melalui pengembangan aplikasi dan ruang keterlibatan publik dalam sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan. Masyarakat bisa mengakses informasi-informasi untuk pengendalian pelaksanaan pembangunan dengan masuk ke tautan monevapbd.jogjaprov.go.id. Dengan menggunakan *username* dan *password* 'publik', masyarakat bisa mendapatkan informasi memadai tentang bagaimana pelaksanaan dan kinerja pembangunan di DIY untuk kurun waktu tertentu. Berikut adalah tampilan awal untuk akses publik tersebut:



Gambar 3.34 Web Monev APBD DIY (monevapbd.jogjaprovo.go.id)

Dalam menu sistem integrasi ROPK, Monev APBD dan E-Sakip misalnya, masyarakat bisa mengakses informasi-informasi yang disajikan dalam menu monev APBD, e-sakip (sesuai Permenpan RB Nomer 29 tahun 2010), monev hibah dan Bansos, arsip monev APBD (yang bisa dipilih tahunnya), dan buku petunjuk serta buku petunjuk ROPK.

Permasalahan:

- a. Persoalan dengan pengembangan sarana-sarana untuk membuka transparansi dan akuntabilitas adalah sejauh mana sarana-sarana dan sistem informasi berbasis teknologi informasi sudah dimanfaatkan oleh masyarakat
- b. Juga muncul pertanyaan, apakah skem yang tersedia sebagai sarana pengembangan akuntabilitas untuk menjangkau masyarakat yang tidak melek teknologi. Strategi ini juga penting karena proporsi masyarakat yang belum melek teknologi jumlahnya lebih banyak
- c. Juga penting untuk menggali, sejauh mana aplikasi dan data berbasis teknologi informasi ini telah dipakai sebagai pijakan perbaikan perencanaan tahun/ periode setelahnya

Solusi:

- a. Pemanfaatan informasi dan hasil analisis pengendalian untuk perbaikan kualitas perencanaan pada periode berikutnya
- b. Penyebarluasan informasi dan prosedur untuk penerapan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk menjamin hak masyarakat dalam kebijakan publik.

12. Sasaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sejalan dengan misi mendorong tata kelola pemerintahan yang baik yang menjadi misi ke-3 dalam RPJMD 2012-2017. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja yang sudah diuraikan dalam sasaran ke-11 sebelumnya.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan pada UU No. 15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk sasaran ke-12 ini, realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada tahun 2013, target kinerjanya adalah pemeriksanaan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan hasilnya mencapai target ini. Dengan status pencpaaian opini yang terbaik ini, maka kinerja sasaran ke-12 adalah **sangat tinggi**. Pencapaian ini, apabila dipertahankan, capaian ini juga sudah memenuhi target pada akhir tahun RPJMD pada tahun 2017 yaitu opini WTP. Sebagai catatan, sebagaimana realisasi untuk nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan di sasaran ke-11, realisasi ini juga merupakan capaian kinerja Pemda DIY untuk tahun 2013 yang dikeluarkan BPK pada tahun 2014. Untuk hasil pemeriksaan atas kinerja tahun 2014, masih dalam proses ketika laporan ini disusun.

Tabel 3.41 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan

Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Opini pemeriksaan BPK	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100

Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan. Hal ini meliputi penilaian atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan dalam dibuat oleh Pemda DIY. Juga penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh. Opini BPK atas laporan keuangan Pemda DIY tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.42 Opini BPK Atas Laporan keuangan Pemda DIY, Tahun 2009-2013

Tahun	Opini BPK	Keterangan
2009	WDP	Aset belum dapat diyakini kewajarannya
2010	WTP	Paragraf penjas berupa aset dinas PUESDM yang belum diserahkan
2011	WTP	Paragraf penjas pencatatan dana bergulir belum sesuai SAP dan belum diberlakukannya penyusutan asset
2012	WTP	Tanpa paragraf penjas
2013	WTP	Tanpa paragraf penjas

Sebagai bagian penting dari proses pemeriksaan, aspek pengendalian internal juga menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Melalui penyalarsan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan / kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Berkaitan dengan hal tersebut, sampai dengan bulan Desember 2013 telah dilakukan pemeriksaan reguler sebanyak 173 obyek pemeriksaan dan pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2012 terhadap 34 SKPD di lingkungan Pemerintah DIY. Hasil dari pemeriksaan tahun 2013 terdapat 480 temuan dengan 875 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sejumlah 667 rekomendasi (76%). Adapun 208 rekomendasi (24%) belum ditindak lanjuti dan merupakan temuan pemeriksaan bulan November dan Desember 2013 dan saat ini baru dalam proses tindak lanjutnya.

Permasalahan:

- a. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (internal dan eksternal) tidak dapat direalisasikan sesuai dengan target dikarenakan beberapa hasil temuan yang harus ditindaklanjuti dapat dikoordinasikan sehingga tidak diperlukan penyelesaian tindak lanjut

Solusi:

- a. Penguatan pengawasan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif untuk mendorong penguatan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemda DIY
- b. Meningkatkan koordinasi dalam pembinaan SAKIP.
- c. Meningkatkan intensitas koordinasi percepatan TLHP.
- d. Meningkatkan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP maupun BPK secara periodik untuk memacu penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

13. Sasaran Layanan Publik Meningkat, Terutama Pada Penataan Sistem Transportasi Dan Akses Masyarakat Di Pedesaan.

Arah kebijakan yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan penataan sistem transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mencapai *load factor* angkutan perkotaan dari 32,57% menjadi 42,57% dan peningkatan akses di pedesaan. Untuk mendukung arah kebijakan ini telah ditetapkan 3 indikator kinerja (*outcome*) sebagai indikator capaian, yaitu:

- a. Penerapan manajemen lalu lintas berbasis kawasan
- b. *Load factor* Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta
- c. Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Perkotaan Yogyakarta

Selain ke-tiga indikator tersebut diatas, untuk mengarahkan arah kebijakan pembangunan di tahun pertama RPJMD 2012-2017, atau di pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2013, telah ditetapkan pula 6 indikator kinerja untuk mendukung capaian arahan pembangunan daerah yang menjadi urusan perhubungan. Sehingga, secara keseluruhan, terdapat 9 indikator kinerja yang ditetapkan sebagai indikator capaian pembangunan daerah untuk urusan perhubungan.

Dalam realisasi tahun 2014, pencapaian IKU menunjukkan telah berhasil dicapainya 103,42% dari target kinerja atau memiliki pencapaian **sangat tinggi**. Dari *load factor* yang ditargetkan sebanyak 36,57%, realisasinya menunjukkan capaian sebanyak 37,82%. Pencapaian ini juga berarti mencapai 88,84% dari target akhir RPJMD pada tahun 2017. Dengan persentase capaian yang telah sesuai rencana dan bahkan melebihi dari target, maka pencapaian indikator pada target akhir RPJMD tahun 2017 akan dapat tercapai.

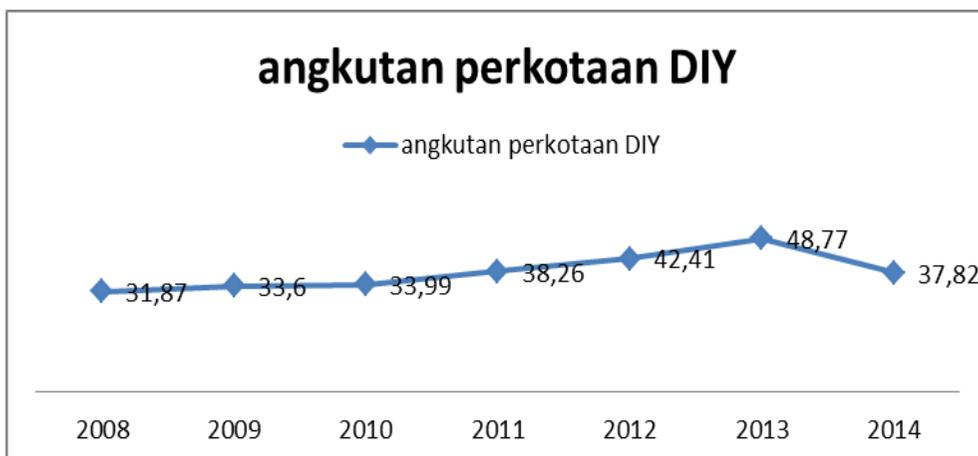


Gambar 3.35 Kondisi Transportasi di Ruas Jalan Malioboro

Tabel 3.43 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Layanan Publik Meningkatkan Terutama Pada Penataan Sistem Transportasi dan Akses Masyarakat di Pedesaan

Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
<i>Load factor</i> angkutan perkotaan meningkat	34,49%	36,57%	37,82%	103,42	42,57%	88,84

Data *load factor* berikut menggambarkan tren yang menurun di tahun 2014 namun realisasinya lebih tinggi dibandingkan target. *Load factor* angkutan umum juga akan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas jalan yang ada.



Gambar 3.36 *Load Factor* Angkutan Umum Perkotaan di DIY

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi, & Informatika DIY

Berdasarkan data tahunan, untuk data panjang jalan berdasarkan kelas, terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada jalan nasional yaitu dari 168,61 km pada tahun 2010 menjadi 223,16 km pada tahun 2011. Sebaliknya, untuk panjang jalan provinsi malah menurun pada tahun 2012 dan juga jalan kabupaten pada tahun 2013.

Tabel 3.44 Panjang Jalan Berdasarkan Kelas dan Kondisi dalam Km

Panjang Jalan Berdasarkan Kelas dan Kondisi	Tahun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Panjang Jalan Berdasarkan Kelas						
Jalan Nasional	168.61	168.61	223.16	223.16	223.16	223.13
Jalan Propinsi	690.25	690.25	690.25	619.34	619.34	619.34
Jalan Kabupaten	4040.8	4040.8	4040.8	4040.8	3.656.23	3.656.23
Panjang Jalan Berdasarkan kondisi						
Jalan Baik	1.733..83	1.812.75	1.815.91	2.010.35	2.215.17	341.66
Jalan Sedang	1.763.87	1.656.83	1495.10	1.353.47	1.369.71	336.43
Jalan Rusak Sedang	891.52	816.96	764.48	739.50	741.60	132.89
Jalan Rusak Berat	145.00	243.95	257.40	243.16	243.16	31.53
Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	35.04	36.32	38.56	42.45	54.98	-

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2014

Sementara melihat kualitasnya, jalan dengan kualitas baik menunjukkan peningkatan jumlah dari tahun ke tahun, sementara panjang jalan dengan kualitas sedang mengalami penurunan. Begitu juga panjang jalan dengan kualitas rusak sedang, juga mengalami penurunan. Untuk jalan dengan kondisi rusak berat, kecenderungannya juga meningkat walaupun berfluktuasi. Untuk jalan kabupaten dalam kondisi yang baik, jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun.

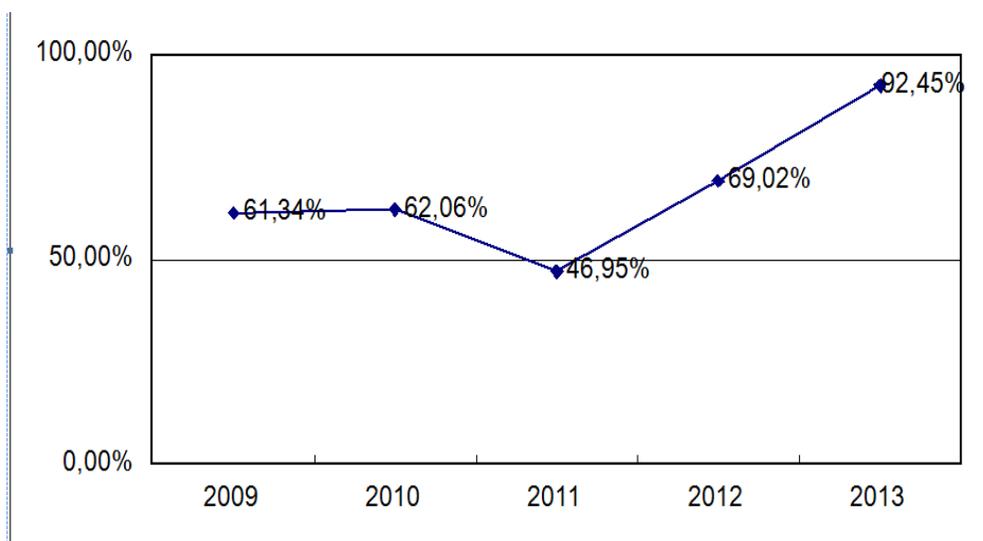
Pada tahun 2014, beberapa perkembangan terkait dengan kondisi jalan provinsi tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3.45 Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2014

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		Km	%		Km	%
1	Mantap	456,43	73,70	Baik	188,59	30,45
				Sedang	267,84	43,25
2	Tidak Mantap	162,91	26,30	Rusak Ringan	132,35	21,37
				Rusak Berat	30,56	4,93
JUMLAH		619,34	100,00	Jumlah	619,34	100,00

Sumber: DPU-ESDM 2015

Sementara itu, kondisi jalan nasional di DIY dari tahun ke tahun memperlihatkan kualitas yang semakin baik sebagaimana tampak dalam gambar berikut



Sumber: Dinas PU ESDM, 2014

Gambar 3.37 Tren Kondisi Jalan nasional di DIY

Data diatas memperlihatkan bahwa untuk dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan atas persentase jalan nasional dalam kondisi baik. Tahun 2011 tercatat capaiannya adalah 46,95% dan meningkat sebesar 22,07% menjadi 69,02% di tahun 2012. Kemudian capaian tahun 2012 tersebut mengalami peningkatan di tahun 2013 sebesar 23,43%.

Permasalahan

- Banyaknya kegiatan yang sifatnya lintas sektoral maupun lintas kewenangan, bahkan juga kewenangan yang menjadi “domain” dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Banyaknya angkutan perkotaan reguler *non buy the service* yang tidak melayani masyarakat baik dari sisi jam layanan yang tidak menentu maupun rute layanan yang dibiarkan kosong menyebabkan *load factor* angkutan perkotaan yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan;
- Banyaknya masyarakat yang masih enggan untuk menggunakan angkutan umum, menjadikan pergerakan lalu lintas di Perkotaan Yogyakarta masih didominasi oleh kendaraan pribadi.

Solusi

- Melakukan penguatan koordinasi antar daerah dan pusat dan menjadikan target sasaran yang harus dicapai dalam capaian kinerja adalah target bersama;
- Me-redesign* rute layanan angkutan umum perkotaan dan menjadikan angkutan umum perkotaan menjadi layanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah;
- Pengembangan angkutan umum yang nyaman dan masyarakat tentang pentingnya penggunaan angkutan umum. Juga penerapan kebijakan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi di jalan dengan berkolaborasi antar Pemerintah Kota dan Kabupaten.

14. Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat

Sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup yang ditargetkan dalam IKU Gubernur 2014 telah menunjukkan capaian yang positif. Dari target sebanyak 6,29%, capaian tahun 2014 menunjukkan realisasi dalam jumlah yang sama (100%). Capaian ini juga menjadikan target capaian pada akhir tahun RPJMD terealisasi sebesar 40,01% dari target tahun 2017. Dengan pencapaian ini, kinerja DIY untuk sasaran ke 14 pada tahun 2014 adalah memenuhi **kriteria sangat tinggi**.

Tabel 3.46 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat

Indikator Kinerja	2013	2014			Capaian 2014 Terhadap 2017	Target 2017 (%)
		Target	Realisasi	Realisasi %		
Prosentase peningkatan kualitas lingkungan	3,14%	6,29%	6,29%	100	15,72%	40,01

Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan merupakan upaya yang perlu terus dilakukan karena merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu *pro poor, pro growth, pro environment* dan *pro gender*. Indikator yang digunakan dalam pembangunan lingkungan hidup di DIY adalah persentase peningkatan kualitas lingkungan, sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD DIY 2012 – 2017. Untuk penghitungannya digunakan indikator peningkatan kualitas udara ambien dan peningkatan kualitas air sungai. Untuk kualitas udara ambien berdasarkan hasil pengukuran pada 5 kabupaten/kota, dengan parameter kunci yang digunakan hidro karbon (HC) dan karbon monoksida (CO). Untuk kualitas air sungai berdasarkan pada pengukuran pada 11 sungai yang mengalir di DIY, dengan parameter kunci yang digunakan *Biological Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD).

Berdasarkan hasil uji yang sudah dilakukan di DIY untuk parameter udara didapat nilai bahwa untuk CO sebesar $716,15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan HC sebesar $117,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Secara lebih jelasnya hasil pengukuran kualitas udara terhadap zat pencemar yang memberikan kontribusi terhadap indikator peningkatan kualitas lingkungan di DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.47 Hasil Pemantauan Kualitas Udara

No.	Parameter Pencemaran Udara	Baku Mutu yang Ditargetkan	Satuan	Kondisi Eksisting Tahun 2014	Keterangan
1.	CO	10.000	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$1.042,43\mu\text{g}/\text{m}^3$	Mencapai Target
2.	HC	135	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$72,99 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Mencapai Target

Untuk kondisi kualitas air sungai di DIY pada Tahun 2014 berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan didapat hasil realiasi zat pencemar adalah sebesar $8,02 \text{ mg}/\text{luntuk}$ parameter BOD dan $18,21 \text{ mg}/\text{luntuk}$ parameter COD. Secara lebih jelasnya hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.48 Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai

No.	Parameter Pencemaran Air Sungai	Baku Mutu yang Ditargetkan	Satuan	Kondisi Eksisting Tahun 2014	Keterangan
1.	BOD	9	mg/l	8,02mg/l	Mencapai Target
2.	COD	45	mg/l	18,21mg/l	Mencapai Target

Data diatas—menunjukkan bahwa peningkatan capaian terhadap indikator prosentase peningkatan kualitas lingkungan hidup di DIY pada Tahun 2014 tercapai.

Untuk indikator persentase pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, mendasarkan data inventarisasi dari kabupaten/kota pada tahun 2014 secara akumulatif realisasinya sebesar 28,09%. Target kinerja untuk indikator ini pada 2014 sebesar 23,33%. Jadi realisasi 5,76% lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada tahun 2014. Adapun sebaran luasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :

- Kota Yogyakarta sebesar 31,65% (seluas 1.028,79 Ha),
- Kabupaten Bantul sebesar 13,65% (seluas 1.695,5 Ha),
- Kabupaten Kulon Progo sebesar 19,51% (seluas 982,90 Ha)
- Kabupaten Gunungkidul sebesar 30,00% (seluas 2.982,31 Ha),
- Kabupaten Sleman sebesar 45,58% (seluas 12.804,49 Ha),

Pada tahun 2014 jumlah tanaman RTH yang ditanam di 5 kabupaten/kota sebanyak 7.520 batang tanaman keras dengan luasan lahan kurang lebih 8,36 Ha. Untuk mendukung pencapaian indikator peningkatan persentase pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau di Kawasan Perkotaan upaya yang dilaksanakan adalah pembagian bibit tanaman penghijauan perkotaan kepada kabupaten/kota, fasilitasi pembangunan RTH serta mendorong dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk terus dapat mengembangkan RTH. Target capaian untuk indikator ini pada akhir tahun 2017 adalah sebesar 58,33% sehingga capaian relatif tahun 2014 terhadap target RPJMD sebesar 49,87%.

Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja luas lahan yang terkonservasi untuk tahun 2014 adalah 18 Ha. Realisasi pelaksanaan sampai dengan tahun 2014 melebihi target dengan capaian 32,50 Ha yang merupakan akumulasi capaian tahun 2013 sebesar 17 Ha (dari target 9 Ha), dengan penambahan luas lahan terkonservasi seluas 15,50 Ha pada tahun 2014. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017 untuk indikator luas lahan yang terkonservasi capaian sampai dengan tahun 2014 sebesar 77,22% atau seluas 32,5 Ha dari target seluas 45 Ha.

Upaya pencapaian jumlah luas lahan terkonservasi tahun 2014 dilaksanakan dengan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Adapun pelaksanaan konservasi lahan pada tahun 2014 tersebar di berbagai lokasi sebagai berikut :

- 1) Desa Pilangrejo, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, seluas 4,0 Ha
- 2) Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, seluas 4 Ha
- 3) Desa Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, 3,5 Ha
- 4) Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, seluas 3,0 Ha
- 5) Desa Purwodadi, kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, seluas 1,0 Ha

Meskipun demikian beberapa permasalahan terkait peningkatan aktivitas sumber pencemar domestik dan industri di DIY masih membutuhkan perhatian, mengingat masih banyaknya aktivitas hunian pada tepi sungai sebagai salah satu kontributor terhadap sumber pencemar air sungai di DIY.

Permasalahan:

- a. Peningkatan aktifitas transportasi akibat peningkatan aktivitas perekonomian dan bisnis memang terus diupayakan penataannya dan, kondisi ini juga menyebabkan meningkatnya pencemaran udara terutama parameter CO, NO₂, HC dan partikulat pada titik-titik tertentu di wilayah perkotaan.
- b. Adanya anggapan dari sebagian para pelaku usaha (penanggungjawab usaha dan atau kegiatan) serta masyarakat bahwa untuk melakukan pengolahan limbah cair (IPLC) dari proses produksi memerlukan biaya yang mahal sehingga menghambat investasi dalam pengembangan usaha. Hal ini merupakan tantangan dalam upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air sungai, khususnya parameter BOD (kondisi saat ini masih fluktuatif kualitasnya).
- c. Masih terbatasnya jumlah kelompok masyarakat yang peduli lingkungan serta terbatasnya pemahaman terhadap pentingnya menjaga kualitas kesehatan lingkungan, sehingga menyebabkan replikasi percontohan/demplot pengelolaan lingkungan (biogas, IPLC, Komposter) belum bisa berjalan secara baik. Kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, terutama kandungan bakteri koli dalam air sungai dan air tanah masih tinggi.
- d. Belum adanya kesadaran perusahaan dalam pengelolaan lingkungan terbukti masih banyak perusahaan yang belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang menjadi kewajiban perusahaan, sehingga kecenderungan adanya pelanggaran dari perusahaan dalam melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan dan menimbulkan masalah/dampak terhadap lingkungan.

Solusi:

- a. Mendorong kepada kabupaten/kota untuk membuat peraturan sebagai tindak lanjut tentang pengendalian pencemaran udara dengan mewajibkan setiap sumber bergerak (kendaraan bermotor) untuk melakukan uji emisi, kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan upaya perbaikan sistem transportasi dan mendorong pengembangan/pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) maupun jalur hijau.
- b. Melakukan upaya koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan melalui rapat koordinasi, sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha (penanggungjawab usaha/kegiatan) serta menjalin kerjasama yang kondusif sesuai dengan kapaitas dan kewenangannya.
- c. Mendorong kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan edukasi dan fasilitasi pembangunan IPLC komunal bagi masyarakat yang menjadi kewajibannya sesuai dengan regulasi yang berlaku (Perda Limbah Domestik)
- d. Pembinaan yang intensif terhadap perusahaan agar kewajiban-kewajibannya dilaksanakan dengan baik sehingga potensi dampak bisa dikendalikan. Pembinaan dalam pelaksanaan kewajiban yang tertuang dalam dokumen RKL-RPL dan juga pelaporannya.
- e. Mendorong Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk lebih tegas terhadap kegiatan usaha yang melakukan pelanggaran tata ruang. Dalam memberikan izin Kabupaten/Kota perlu lebih berhati-hati dan para penanggungjawab usaha/kegiatan diwajibkan untuk menyusun dokumen lingkungan terlebih dahulu sebelum memulai membangun/konstruksi untuk kegiatan/usahanya.

15. Sasaran Pemanfaatan Ruang Terkendali

Undang–Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka Pemerintah Daerah DIY juga telah melakukan Penataan Ruang yang didasarkan pada kondisi dan potensi wilayah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010.

Sesuai dengan kewenangan dalam pengaturan penataan ruang, rencana tata ruang yang harus disusun sebagai tindak lanjut regulasi penataan ruang yang lebih atas dengan kaidah berjenjang dan komplementer, adalah rencana detail tata ruang pada kawasan strategis provinsi. Rencana detail tata ruang tersebut sebagai instrumen pedoman operasional untuk pemberian perijinan pemanfaatan ruang, terutama bagi Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian pemanfaatan

ruang pada kawasan perkotaan Yogyakarta yang merupakan kawasan strategis nasional, dan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung bawahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pemerintah provinsi mempunyai fungsi dan peran memberikan arahan dan pembinaan kepada Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam bentuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang serta arahan kebijakan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui pembinaan ini diharapkan adanya peningkatan dalam kesesuaian pemanfaatan ruang baik oleh masyarakat maupun Kabupaten/Kota terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Dari target kinerja untuk sasaran pemanfaatan ruang, pencapaian untuk tahun 2014 menunjukkan hasil yang positif. Dari target kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW kab/ kota dan RTRW provinsi yang meningkat capaiannya adalah sebanyak 64,21%. Indikator ini diukur dari perbandingan luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibandingkan dengan luas total wilayah pemanfaatan ruang. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini berarti 71,34% dari target kinerja akhir RPJMD sebanyak 90%.

Capaian ini menjadikan kinerja untuk IKU ke-17 untuk DIY tahun 2014 ini masuk dalam **kriteria sangat tinggi**.

Tabel 3.49 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pemanfaatan Ruang Terkendali

Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.	63,25%	63,42%	64,21%	101,25	90%	71,34%

Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi bisa dilihat dalam beberapa data berikut ini:

- Luas Total wilayah pemanfaatan ruang DIY sebesar : 318.580 Ha. Pada tahun 2013
- Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang diperoleh hasil kesesuaian pemanfaatan ruang DIY Tahun 2014 dengan pola ruang RTRW DIY seluas 204.572,30 Ha, atau sebesar 64,21 %
- Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 meningkat sebesar 0,28%, sedangkan apabila dibandingkan dengan target RPJMD 2014 pencapaiannya sebesar 107,02%. Target akhir RPJMD 2017 sebesar 64,75% sehingga capaian 2014 dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2017 sebesar 99,17% mencapai 63,93%. Angka ini didapatkan dari hasil audit pemanfaatan ruang menggunakan Permen PU No. 1/PRT/M/2014.

Permasalahan

- a. Sampai saat ini ketersediaan produk perencanaan terkait tata ruang sudah sesuai target, namun masih perlu didukung ketersediaan regulasi yang lebih detail yang perlu ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang.
- b. Masih kurangnya PPNS Tata Ruang di Kabupaten/Kota sebagai perangkat pelaksana pengendalian pemanfaatan ruang, serta pelaksana sosialisasi ketaatan terhadap rencana tata ruang kepada masyarakat.

Solusi

- a. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota terkait tindak lanjut penyusunan kebijakan yang lebih operasional (RDTR & PZ) sebagai turunan dari RTRW DIY untuk dapat dijadikan dasarimplementasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Meningkatkan kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam pembinaan ke Kabupaten/Kota agar menyiapkan aparat (personil sebagai PPNS) untuk membantu pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang serta untuk melakukan sosialisasi ketaatan terhadap rencana tata ruang kepada masyarakat.

3.3 Pencapaian Kinerja Lainnya

3.3.1 Pencapaian Target MDGs

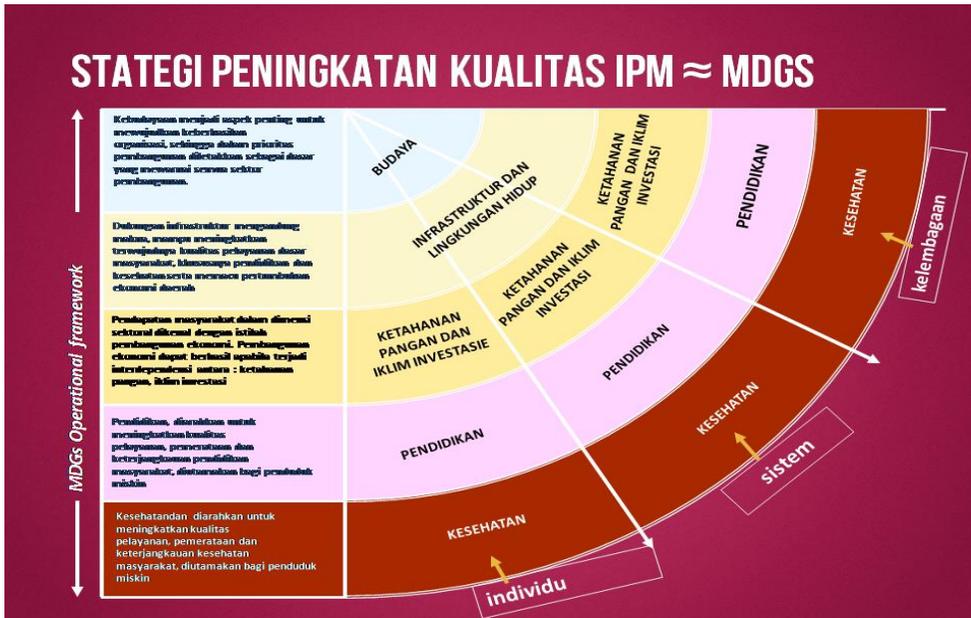
Selain penetapan kinerja berupa IKU sebagaimana telah diutarakan di muka, Pemda DIY juga telah menetapkan strategi untuk pencapaian kinerja lainnya, khususnya untuk pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki komitmen kuat dalam upaya mewujudkan tercapainya target MDGs pada Tahun 2015. Integrasi tujuan-tujuan MDGs tersebut dapat dicermati dalam berbagai program prioritas pembangunan yang terdapat pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Aksi Daerah MDGs disusun sebagai bagian dari upaya mempercepat pencapaian target MDGs selaras dengan amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 telah menyusun Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah dan telah diperkuat dalam pelaksanaannya dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 36.2/TIM/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGs yang substansinya adalah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencapaian Target MDGs.

Begitu juga dengan strategi untuk pencapaian target IPM dan IPG. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda DIY juga dalam kerangka untuk meningkatkan IPM dan IPG sebagai salah satu ukuran pembangunan yang berfokus pada pengembangan *human capabilities*. Strategi yang menggabungkan intervensi pada aspek individu, sistem dan kelembagaannya mendorong pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara, laki-laki dan perempuan.

Strategi untuk pencapaian baik target MDGs maupun IPM-IPG nampak dalam gambar berikut ini :



Gambar 3.38 Strategi Peningkatan Kualitas IPM dan MDGs

Secara umum, capaian MDGs di DIY menunjukkan hasil yang positif. Mayoritas indikator dari 7 tujuan pembangunan dan 57 indikator telah dicapai pada tahun 2014. Sebagian indikator bahkan sudah tercapai saat ini sebelum tahun 2015 yang menjadi tahun pencapaian tujuan MDGs. Beberapa indikator di bidang pendidikan telah menunjukkan pencapaian yang baik, seperti pencapaian angka melek huruf usia 15-25 tahun, ataupun rasio angka partisipasi murni baik perempuan dan laki-laki di jenjang pendidikan SD dan SLTP. Begitu juga dengan prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi serta gizi buruk, telah mencapai target.

Namun demikian, beberapa indikator memerlukan perhatian khusus dan kerja keras supaya bisa dicapai pada tahun 2015. Hal ini terjadi pada beberapa indikator seperti penurunan angka kemiskinan, indikator terkait kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS, serta indikator untuk penurunan emisi karbon dan kawasan lindung perairan. Beberapa indikator ini perlu menjadi perhatian dari program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Tabel 3.50 Target dan Realisasi Pencapaian MDGs di DIY Tahun 2014

No	Indikator	Capaian 2014	Target MDGs 2015	Status	Sumber
Tujuan 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN					
Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015					
1.1	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	14,55	10,30%	▼	=garis kemiskinan
1.1a	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional			▼	
1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,19	2,50%	●	
1.4	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	2,12	2,20 %	▶	
1.5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	66,59	Meningka (Angka menurun, tapi targetnya ttp meningka)	▶	BPS, Sakernas Agustus 2012
1.7	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	28,89	Menurun	▶	BPS, Sakernas Agustus 2012
1.8	Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi	8,55%	< 10%	●	

No	Indikator	Capaian 2014	Target MDGs 2015	Status	Sumber
1.8a	Prevalensi balita gizi buruk	0,49%	< 1%	●	
1.8b	Prevalensi balita gizi kurang	8,06%	11,9%	●	
1.9	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum:				
	1400 Kkal/kapita/hari	18,66	8,50%	▶	BPS, Susenas Triwulan III Tahun 2012
	2000 Kkal/kapita/hari	72,5	35,32%	▶	BPS, Susenas Triwulan III Tahun 2012
TUJUAN 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA					
Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar					
2.1	Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar	96.81	100	▶	BPS
2.2.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	94,08	100	▶	Disdikpora DIY
2.3	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	99.70	100	▶	BPS, Susenas Triwulan III Tahun 2012
TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015					
3.1	Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan				

No	Indikator	Capaian 2014	Target MDGs 2015	Status	Sumber
	dasar, menengah dan tinggi				
	-Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	95,11	100	▶	Disdikpora ahun 2044
	-Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	97,92	100	▶	BPS, Susenas Triwulan III Tahun 2012
	-Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	98,25	100	▶	
	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	112,61	100	▶	BPS, Susenas Triwulan III Tahun 2012
3.1a	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	99,91	100%	▶	
3.2	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	43,29	39,86	●	BPS, Sakernas Agustus 2012
3.3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	DPRD DIY : 21,82 DPRD Kab/Kota : 15,64	DPRD DIY : 30 DPRD Kab/Kota : 30	▶	KPUD dan BPPM DIY
TUJUAN 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK					
Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015					

No	Indikator	Capaian 2014	Target MDGs 2015	Status	Sumber
4.1	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	420 kasus kematian balita dari 40.138 kelahiran hidup	16	●	BPS, SDKI 2012 -Profil kesehatan DIY, 2010 -Data Program Seksi Kesga Dinkes DIY 2013
4.2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	377 kasus kematian bayi dari 40.138 kelahiran hidup	16	●	BPS, SDKI 2012 -SDKI, 2007 -Data Program di Seksi Kesga Dinkes DIY 2013
4.2a	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	293 kasus kematian neonatal dari 40.138 kelahiran hidup	16	●	BPS, SDKI 2012 -Data Program di Seksi Kesga Dinkes DIY 2013
4.3	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	98,6%	100	▶	BPS, Susenas Triwulan III Tahun 2012 -Risksedas 2010) -Data Program di Seksi Imunisasi Dinkes DIY 2013
TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU					
Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015					
5.1	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	92,18 (37 kasus kematian ibud ari 40.138 kelahiran	100	▶	-Susenas 2005 -Data program di Seksi Kesga Dinkes DIY 2013

No	Indikator	Capaian 2014	Target MDGs 2015	Status	Sumber
		hidup)			Laporan PWS KIA tahun 2013 Semester I dan Laporan Hasil Audit Maternal Perinatal Kab/Kota Tahun 2013 Semester I
5.2	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	99,92%	99%	▶	BPS, Susenas Triwulan III Tahun 2012 Laporan PWS KIA tahun 2013 Semester I dan Laporan Hasil Audit Maternal Perinatal Kab/Kota
5.3	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara	80,22%	80%	●	SDKI, 2012 Laporan BKKBN Info : dalam RAD digabung semua cara dan cara modern
5.3a	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun, cara modern	80,22%	80%	●	SDKI, 2012 Laporan BKKBN
5.4	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun)	685 kasus (SDKI 2012 40 per	24 per 1000 (mempertahankan TFR 1,8)	▼	-SDKI, 2007 -Data program di Seksi Kesga

No	Indikator	Capaian 2014	Target MDGs 2015	Status	Sumber
	per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	1000)			Dinkes DIY 2013
5.5	Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan)				-Riskasdas, 2010 -Data program di Seksi Kesga Dinkes DIY 2013
	1 kunjungan:	100%	100%	●	
	4 kunjungan:	92,02%	95%	▶	
5.6	Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)	7,67%	5%	▼	-BKKBN, 2010 -SDKI 2012
Tujuan: MEMERANGI HIV dan AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA					
Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS hingga tahun 2015					
6.1	Prevalensi HIV dan AIDS (persen) dari total populasi	0,07%	<0,5%	●	Dinkes Prov DIY, 2010, 2013

No	Indikator	Capaian 2014	Target MDGs 2015	Status	Sumber
6.2	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	189.925 buah	50% lakilaki; 50% perempuan		-Dinkes Prov DIY, 2011 - KPA, 2013 (Data jumlah kondom yang didistribusi)
6.3	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS	25,69%	80%	▼	-Riskesmas, 2010 -Dinkes DIY 2013 (Survey Pengetahuan Sederhana)
6.5	Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral	92%	90%	●	Sistem Informasi HIV dan AIDS Dinas Kesehatan DIY -Capaian belum mencapai target disebabkan banyak ODHA masih menolak untuk segera akses
Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015					
6.6	Angka kejadian dan tingkat kematian akibat Malaria				
66.a	Angka kejadian Malaria (per 1,000 penduduk):	0,02 0,038 (revisi 0,05)	0,0017 (revisi 0,05)	●	-Dinkes DIY, 2011,2013
6.7	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu	100%	100%	●	Dinkes DIY, 2010,2013

No	Indikator	Capaian 2014	Target MDGs 2015	Status	Sumber
	berinsektisida				
6.8	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	100%	100%	●	Dinkes DIY, 2010,2013
6.9	Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat Tuberkulosis				
6.9a	Angka kejadian Tuberkulosis (semua kasus/100,000 penduduk/tahun)	79,74	83,5	●	Dinkes DIY, 2010,2013
6.9b	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100,000 penduduk)	36,96	44,8	●	Dinkes DIY, 2013
6.9c	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100,000 penduduk)	1,94	4	●	Dinkes DIY, 2013
6.10	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS				Dinkes DIY, 2013
6.10 a	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	57,8%	70%	▶	Dinkes DIY, 2013
6.10 b	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	84,92%	85%	▶	Dinkes DIY, 2013
TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP					
Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan					

No	Indikator	Capaian 2014	Target MDGs 2015	Status	Sumber
kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang					
7.1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	40.25%	50	▶	BLH DIY
7.2	Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)	5.667.672	5.052.162	▶	BLH DIY/Bappeda Ket : secara alami tetap naik namun kecepatan naik telah berkurang
7.3	Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton	23.16	24,5 metrik ton CFCs	●	BLH DIY
7.4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	1.46 %	24.26 2.36 %	▶	Masih dlm batasan tangkap max yg diperbolehkan (dicari maxnya) Diskanla DIY
7.5	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	18,80	17,80	●	Dishutbun
7.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	3.388,46 Ha	5 ha 0.011 ha	▶	Diskanla DIY
7.8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum	74,25% (Des 2013)	78,36	▶	PUESDM

No	Indikator	Capaian 2014	Target MDGs 2015	Status	Sumber
	layak, perkotaan dan perdesaan				
7.8a	Perkotaan	71,82% (Des 2013)	81,01	▶	PUESDM
7.8b	Perdesaan	79,49% (Des 2013)	81,01	▶	PUESDM
7.9	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	86,28% (Des 2013)	88,46	▶	BPS, Susenas Triwulan III Tahun 2012
7.9a	Perkotaan	93,41% (Des 2013)	96,81	▶	BPS, Susenas Triwulan III Tahun 2012
7.9b	Perdesaan	82,67% (Des 2013)	68,09	●	BPS, Susenas Triwulan III Tahun 2012
7.10	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	3,76% (Juni 2013)	3,01	●	BPS, Susenas 2012

Status : ● Sudah Tercapai ▶ Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus

Sumber : Bappeda DIY, 2014

Permasalahan:

1. Koordinasi program-program bagi pengurangan kemiskinan yang masih perlu ditingkatkan efektivitasnya, termasuk untuk perlindungan dan pemberdayaan orang miskin dan perbaikan pelayanan publik
2. Kesempatan kerja terutama kesempatan kerja formal masih perlu diperluas untuk meningkatkan kesejahteraan. Begitu juga upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan hak pekerja masih belum optimal, termasuk dalam upaya mempersempit kesenjangan upah antarpekerja pada tingkatan yang sama

3. Upaya penegakan hukum dan sosialisasi yang efektif terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan, termasuk kaitannya dengan pencemaran udara dan
4. Persoalan kesehatan reproduksi khususnya kesehatan reproduksi remaja dan HIV/AIDS perlu menjadi perhatian semua pihak. Persoalan kesehatan reproduksi remaja dan HIV/AIDS merupakan isu yang bukan hanya terkait dengan aspek kesehatan medis saja, namun juga berbagai faktor sosial yang lain.

Solusi:

1. Memperbaiki lingkungan usaha untuk meningkatkan pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin. Juga dukungan pendanaan untuk memperbaiki infrastruktur yang akan mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat
2. Perlunya kebijakan prioritas pendidikan dan pelayanan kesehatan serta perlindungan sosial bagi warga miskin, dan mendorong inklusi sosial bagi warga miskin dan kelompok marjinal dalam pembangunan dan kehidupan sosial.
3. Persoalan kespro remaja menjadi tantangan untuk mengedukasi publik bahwa remaja berhak mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi secara memadai. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalkan akses yang tidak aman dan bisa berujung pada persoalan kehamilan yang tidak dikehendaki atau bentuk lain kekerasan berbasis gender.
4. Edukasi tentang HIV/AIDS, yang penting memasukkan aspek pencegahan serta rehabilitasi medik maupun sosial untuk mengurangi pengucilan bagi para penderitanya.
5. Peningkatan angkutan publik dan sarana jalan yang aman dan nyaman, untuk pengurangan polusi udara. Juga perlu edukasi publik dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus perusakan dan pencemaran lingkungan
6. Koordinasi dan sinergi dengan upaya-upaya pencapaian target MDGs yang dilakukan oleh pihak non pemerintah.

3.4 Status Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender

3.4.1 Indek Pembangunan Manusia

IPM merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial yang diukur dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Angka harapan hidup DIY cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik.

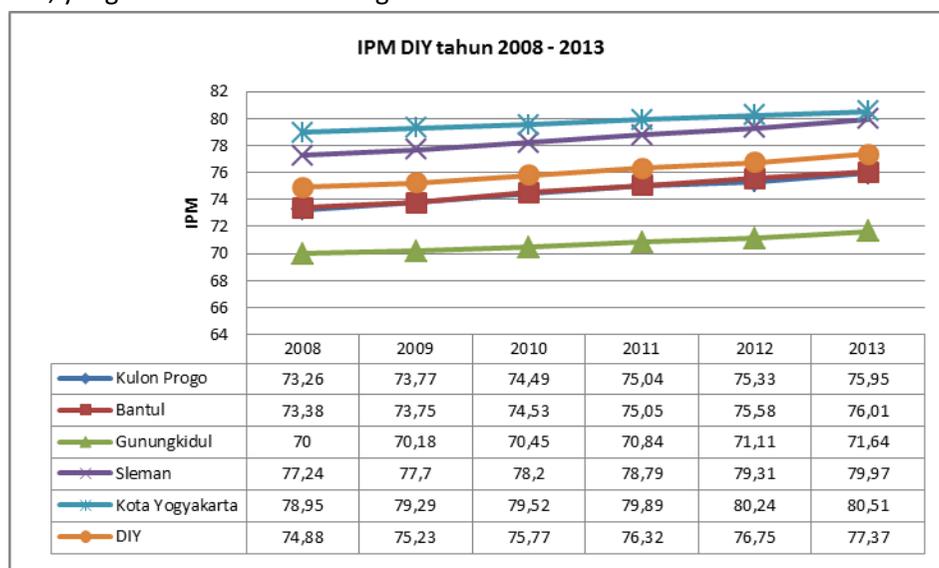
Tabel 3.51 IPM DIY Menurut Komponen, Tahun 2009-2013

Tahun	Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-Rata lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil per kapita (ribu rupiah)	IPM
2009	73,16	90,18	8,78	644,67	75,23
2010	73,22	90,84	9,07	646,56	75,77
2011	73,27	91,49	9,20	650,16	76,32
2012	73,27	92,02	9,21	653,78	76,75
2013	73,62	92,86	9,33	656,19	77,37

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2009-2013

Angka IPM DIY selama kurun waktu 2009 hingga 2013 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, IPM DIY tercatat sebesar 77,37 naik dari angka IPM tahun 2012 yang sebesar 76,75. Nilai IPM DIY tahun 2012 menduduki peringkat 2 dari seluruh provinsi di Indonesia. Tingginya nilai IPM DIY ini didukung oleh tingginya angka harapan hidup, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah serta relatif rendahnya pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

Di lihat dari sebaran wilayahnya, data *time series* yang ada mengkonfirmasi Kota Yogyakarta yang memiliki IPM tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di DIY, yang kemudian diikuti dengan Sleman.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2008-2013

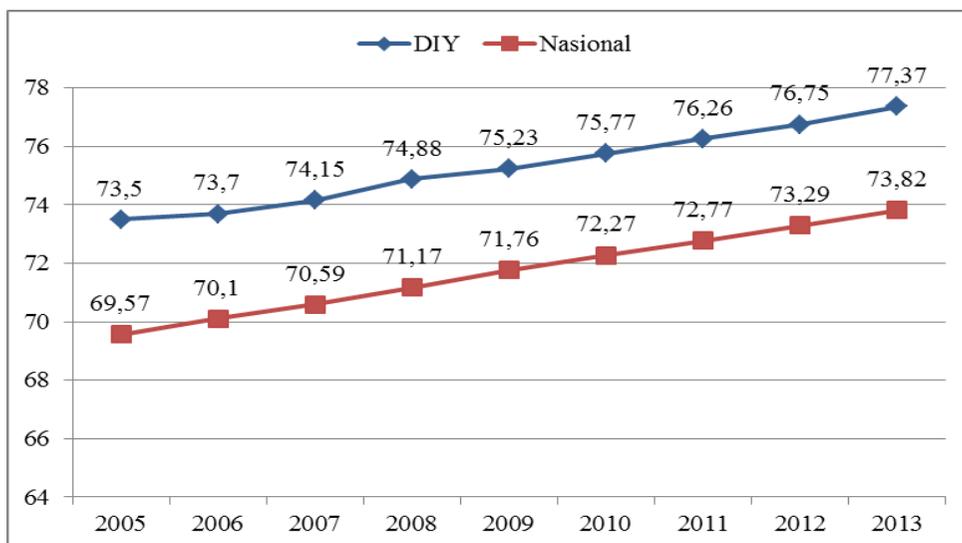
Gambar 3.39 Tren IPM DIY berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2008-2013

Sedangkan apabila diuraikan per komponen, maka pencapaian IPM untuk kabupaten/ kota di wilayah DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 3.52 IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di DIY, 2013

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan (000 Rp)	IPM	Peringkat IPM
Kulon Progo	75,03	93,13	8,37	635,96	75,95	4
Bantul	71,62	92,81	9,02	656,07	76,01	3
Gunungkidul	71,36	85,22	7,79	634,88	71,64	5
Sleman	75,79	95,11	10,55	656,00	79,97	2
Kota Yogyakarta	73,71	98,43	11,56	658,76	80,51	1
DIY	73,62	92,86	9,33	656,19	77,37	2

Sumber: BAPPEDA DIY 2013



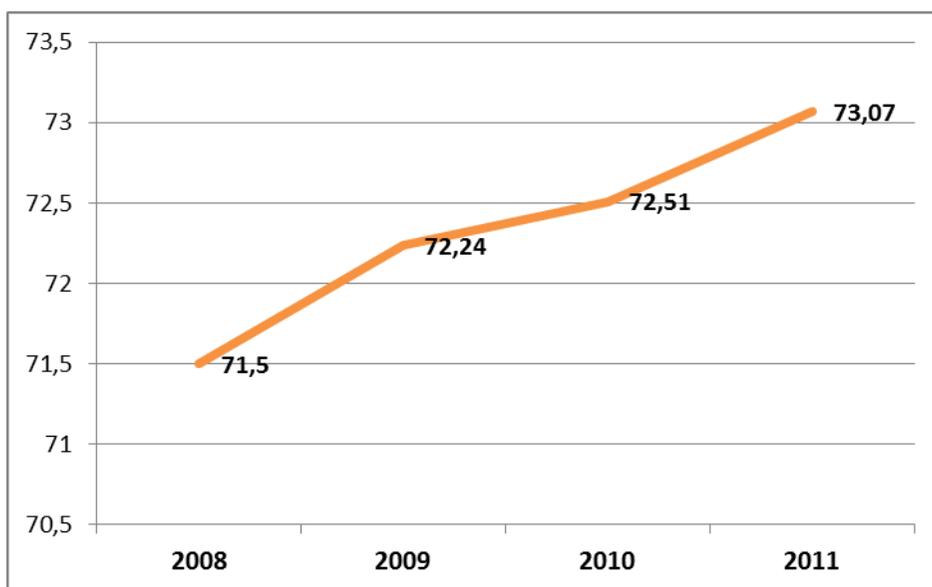
Gambar 3.40 Perbandingan IPM DIY dengan IPM Nasional Tahun 2005-2013

IPM menurut Kabupaten/Kota di DIY tahun 201 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menduduki peringkat ke-1 dengan angka 80,51. Kabupaten dengan angka IPM yang relatif tinggi yaitu Kabupaten Sleman, dengan angka 79,97. Sementara itu, tiga kabupaten lain dengan angka IPM yang relatif masih rendah

adalah Kabupaten Bantul (76,01), Kulon Progo(75,95) dan Kabupaten Gunungkidul (71,64).

3.4.2 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama dengan IPM, dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan.



Sumber : BPS, Kementerian PP dan PA

Gambar 3.41 Perkembangan IPG DIY, Tahun 2008-2011

Pada tahun 2012, IPG telah mengalami peningkatan menjadi sebesar 74,11. Pencapaian ini menempatkan DIY dalam posisi kedua setelah DKI.

Capaian IPG dari tahun ke tahun di DIY telah mengalami peningkatan. Tahun 2011, capaian IPG DIY sebesar 73,07. Berdasarkan sebaran kabupaten/kota di DIY capaian IPG tahun 2011 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 77,92 dan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul. Tabel berikut menunjukkan pergerakan

dari tahun ke tahun di semua kabupaten/kota. Kesenjangan antar wilayah juga menjadi isu yang muncul dari data IPG tahunan ini.

Tabel 3.53 Capaian IPG Menurut Kabupaten/Kota DIY, Tahun 2008-2011

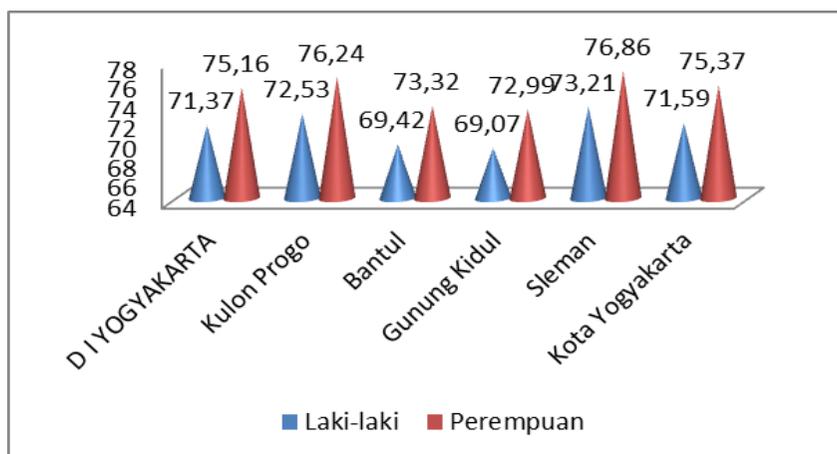
Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011
DIY	71,50	72,24	72,51	73,07
Kota Yogyakarta	77,05	77,10	77,56	77,92
Kab. Bantul	71,20	71,20	71,33	71,71
Kab. Kulon Progo	66,13	66,56	67,04	67,85
Kab. Gunungkidul	64,69	64,77	65,42	66,04
Kab. Sleman	73,73	73,94	74,17	74,75

Sumber : BPS, Kementerian PP &PA

Apabila di rinci per komponen dan per wilayah, data nya adalah sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup

Dari kelima kabupaten/kota, polanya adalah sama. Angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kecenderungan ini juga menjadi pola yang terjadi di tingkat nasional maupun global.

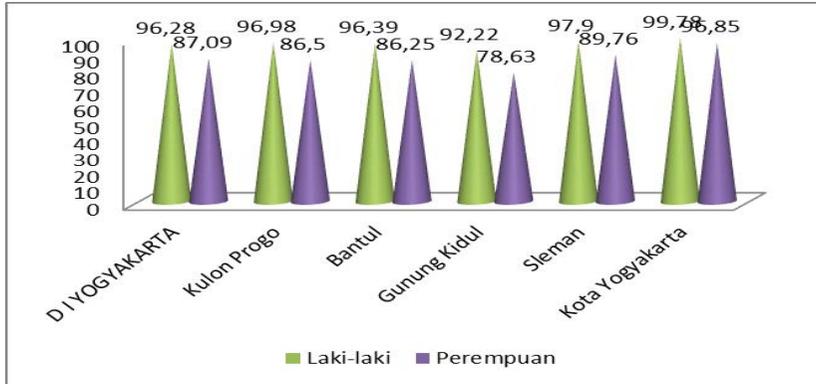


Sumber : BPS, Kementerian PP &PA

Gambar 3.42 Angka Harapan Hidup Per Jenis Kelamin dan Wilayah

2. Angka Melek Huruf

Berbeda dengan usia harapan hidup, angka melek huruf perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini terjadi di semua kabupaten/kota di DIY.

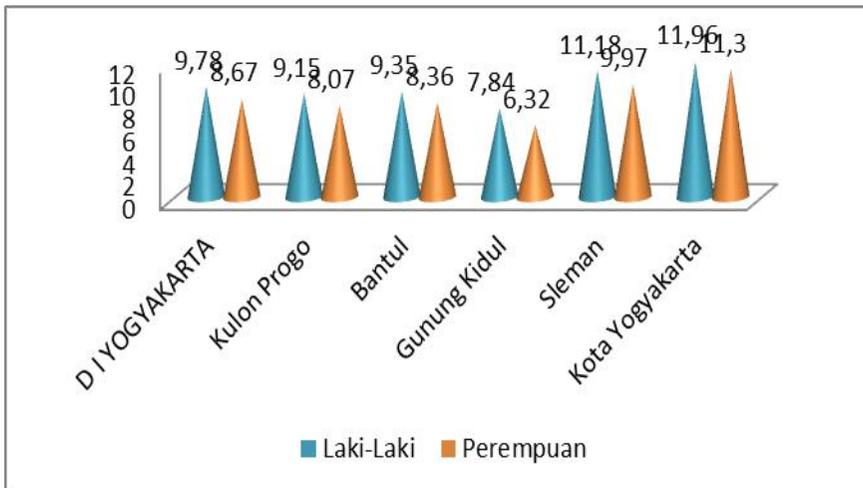


Sumber : BPS, Kementerian PP &PA

Gambar 3.43 Angka Melek Huruf Per Jenis Kelamin dan Wilayah

3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah juga memiliki pola yang sama dengan angka melek huruf. Akses perempuan yang lebih rendah ditunjukkan dengan angka rata-rata lama sekolah perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki, yang terjadi di semua kabupaten/kota.

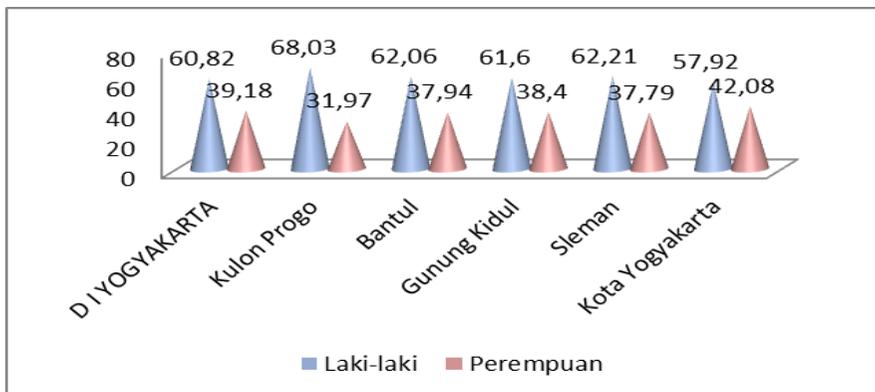


Sumber : BPS, Kementerian PP &PA

Gambar 3.44 Rata-rata Lama Sekolah per Wilayah dan Jenis Kelamin

4. Pendapatan

Kesenjangan gender juga terlihat dari aspek sumbangan pendapatan. Gambar berikut menunjukkan pola yang seragam di semua wilayah, dimana kontribusi laki-laki dalam pendapatan masih dominan. Namun demikian, kesenjangan ini bervariasi. Kota Yogyakarta adalah wilayah dengan kesenjangan terendah, dimana laki-laki menyumbang 57.92% sementara perempuan menyumbang 42.08%. Di DIY, laki-laki menyumbang 60.82% sementara perempuan berkontribusi terhadap 39.18% pendapatan keluarga.



Sumber : BPS, Kementerian PP &PA

Gambar 3.45 Sumbangan Pendapatan Per Jenis Kelamin dan Wilayah

Selain itu, juga penting untuk melihat rasio perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Semakin besar rasionya, maka ini menunjukkan bahwa level kesenjangan gender semakin sempit, dan sebaliknya.

Pencapaian DIY menunjukkan pencapaian yang positif, karena masuk dalam jajaran provinsi dengan rasio yang tinggi. Pada tahun 2012, pencapaian rasio DIY menduduki peringkat kedua setelah NTT. Rasio ini lebih tinggi daripada rasio nasional, yaitu 93,55. Ini nampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.54 Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2013

Provinsi	IPM	IPG	Rasio (%)
Tertinggi:			
Nusa Tenggara Timur	65.99	68.28	96.66
DI Yogyakarta	74.11	76.75	96.56
Papua	63.06	65.86	95.75

Provinsi	IPM	IPG	Rasio (%)
DKI Jakarta	74.66	78.33	95.32
Maluku	68.54	72.42	94.64
Terendah:			
Nusa Tenggara Barat	57.58	66.89	86.08
Papua Barat	60.02	70.22	85.47
Kep Bangka Belitung	61.38	73.78	83.19
Gorontalo	58.32	71.31	81.79
Kalimantan Timur	61.68	76.71	80.64

Sumber: BPS, dikutip dari Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2013

Permasalahan:

1. Kesenjangan berbasis gender menjadi salah satu tantangan yang harus dijadikan fokus bagi agenda pembangunan di berbagai bidang. Hal ini karena tanpa upaya serius untuk menjawab persoalan ini, pencapaian tujuan dan target pembangunan bisa jadi akan terganggu atau menjadi lebih lambat karena ada kelompok yang lebih tidak punya akses dan manfaat terhadap pembangunan
2. Isu-isu gender juga tidak cukup hanya menjadi perhatian pemerintah saja, karena kontribusi dari berbagai pihak juga sangat penting

Solusi:

1. Pemerintah perlu membangun sinergi yang kontinu dan efektif dengan berbagai pihak non negara untuk memastikan upaya-upaya pengurangan kesenjangan gender dalam pembangunan.
2. Pengembangan strategi-strategi yang tepat untuk menjawab persoalan gender dengan mengembangkan model dan mendokumentasikan best practices upaya-upaya mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang

3.5 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 78,82% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran aksesibilitas pendidikan meningkat (94,93%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran harapan hidup masyarakat meningkat (68,10%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya,

semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2014 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang **sangat tinggi**. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya, seperti sasaran indeks ketimpangan pendapatan, yang realisasi anggarannya mencapai 93,5% namun realisasi kinerjanya baru mencapai 52,54%. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder telah terbangun untuk menjawab persoalan ketimpangan pendapatan. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.55 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2014

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	4		6	7	8	9
1	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	74.57	65.73	88.15	24,627,783,900	19,427,692,160	78.89
2	Melek huruf masyarakat meningkat	92,6	93,68	101.17	27,658,905,075	26,200,212,230	94.73
3	Aksesibilitas pendidikan meningkat	10	9,46	94.6	74,311,656,000	70,544,189,073	94.93
4	Daya saing pendidikan meningkat	5	5	100	41,830,612,400	37,536,073,964	89.73
5	Harapan hidup masyarakat	74,41	73,74	99.1	96,403,548,896	65,652,846,290	68.10

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	4		6	7	8	9
	meningkat						
6	Pendapatan masyarakat meningkat	7,4	7,1	95.95	63,175,625,350	58,404,212,339	92.45
7	Ketimpangan antar wilayah menurun	0,4515	0,4479	100.8	276,832,453,551	259,939,434,800	93.90
8	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun	0,295	0,435	52.54	20,169,346,665	18,867,019,935	93.54
9	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	2.754.981	3.091.967	112.23	227,758,867,920	126,778,351,861	78.66
		249.854	254.213	101.74			
10	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	2,15	1,58	73.49	157,717,451,900	80,772,831,466	79.26
		2,25	1,95	86.67			
11	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	3	2	133.33	609,675,458,825	487,804,181,988	80.01
12	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	1	1	100	27,982,038,775	26,447,255,790	94.52
13	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	36,57	37,82	103.42	55,880,404,835	51,948,714,955	92.96
14	Kualitas lingkungan hidup meningkat	6,29	6,29	100	81,402,219,650	74,822,795,042	91.92
15	Pemanfaatan ruang terkendali	63,42	64,21	101.25	17,368,535,805	15,764,152,665	90.76
TOTAL BELANJA LANGSUNG					1,802,794,909,546.67	1,420,909,964,557.94	78.82

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 15 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 9 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat, telah mencapai kinerja sebanyak 133,33% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 75.48% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Kunjungan wisatawan , nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat, dengan pencapaian kinerja sebanyak 112,23%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 78,66%.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.56 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	2	3	6	7	8
1	Melek huruf masyarakat meningkat	Angka Melek huruf.	101,17	94,73	5,27
2	Daya saing pendidikan meningkat	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.	100	89,73	10,27
3	Ketimpangan antar wilayah menurun	Indek Ketimpangan Antar Wilayah.	100,8	93,90	6,10
4	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara	112,23	78,66	21,34

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	2	3	6	7	8
5	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.(1=AA; 2=A; 3=B; 4=CC; 5=C; 6=D)	133,33	75,48	21,86
6	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Opini pemeriksaan BPK. (WTP=1; WDP=2; Disclaimer=3)	100	94,52	5,48
7	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Load factor angkutan perkotaan meningkat.	103,42	92,96	7,04
8	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	100	91,92	8,08
9	Pemanfaatan ruang terkendali	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.	101,25	90,76	9,24

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

*Kesimpulan dari Hasil
Penyusunan Laporan Kinerja
(LKj) Pemda Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2014*

LKj menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong

akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Pemda DIY juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi pemda DIY, dalam masa-masa awal implementasi keistimewaan DIY pasca keluarnya UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dalam kaitannya dengan kedudukan Pemda DIY sebagai provinsi, LKj juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi baik sebagai daerah otonom maupun sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2014), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD. Secara umum, nampak bahwa kinerja

Pemda DIY pada tahun 2014 adalah sangat baik, karena 15 indikator memenuhi kriteria sangat baik dan 2 indikator memenuhi kriteria tinggi.

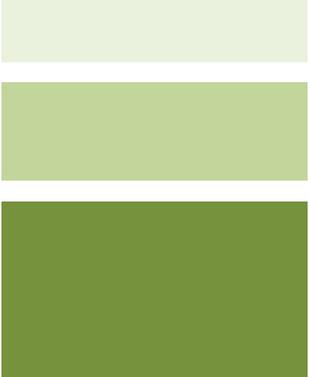
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemda DIY untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2014, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk perencanaan yang dikenal sebagai Jogja Plan adalah bagian dari membuat perencanaan sebagai bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan melalui intervensi program/ kegiatan yang berbasis data dan terfokus. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi melalui link webmonev untuk pelaporan kinerja triwulanan yang bisa diakses publik adalah bagian dari menjadikan penilaian kinerja dan transparansi serta akuntabilitas publik sebagai satu paket kebijakan daerah.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemda DIY ke depan. *Pertama*, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan penurunan ketimpangan (baik antar wilayah maupun pendapatan), kualitas lingkungan dan penegakan tata ruang, hingga mendorong peningkatan lama tinggal wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Peran Pemda DIY diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Ini juga mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.

Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemda DIY dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah DIY, daerah yang berbatasan dengan DIY maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Beberapa sasaran seperti peningkatan pendapatan, pengurangan ketimpangan dan peningkatan jumlah dan lama tinggal wisatawan menunjukkan

pentingnya kontribusi dan koordinasi dengan dunia usaha dan juga masyarakat. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemda DIY sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemda DIY untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



Lampiran Berisi :

Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Pemda DIY selama kurun waktu Tahun

Lampiran

Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah DIY selama tahun 2014:

- Penghargaan atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dengan predikat nilai “A” (Sangat Baik) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- Penghargaan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas keberhasilannya dalam mensukseskan program Millenium Development Goals (MDGs) Target 5B Tahun 2013 diberikan di Jakarta, 30 September 2014.
- Anugerah Pangripta Nusantara Utama dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Tingkat Provinsi Kategori A diberikan kepada Terbaik I: Provinsi DI Yogyakarta di Jakarta, 25 April 2014.
- Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun 2014 dari Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2014 diberikan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Penghargaan Terbaik Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja pada tanggal 27 November 2014.
- Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun 2014 dari Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2014 diberikan

- kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Penghargaan Terbaik Harapan I pada tanggal 27 November 2014.
- Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun 2014 dari Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2014 diberikan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Penghargaan Terbaik Indikator Utama Pelatihan dan Kompetensi Kerja pada tanggal 27 November 2014.
 - Penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia kepada Provinsi DI Yogyakarta sebagai Terbaik III Kategori Provinsi, Sub Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang Penghargaan Pekerjaan Umum Tahun 2014 di Jakarta, 3 Desember 2014.
 - Penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia kepada Provinsi DI Yogyakarta sebagai Terbaik I Kategori Provinsi, Sub Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi Penghargaan Pekerjaan Umum Tahun 2014 di Jakarta, 3 Desember 2014.
 - Transmigration Award 2014 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Kategori Makarti Nayotama yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas Kinerja Yang Sangat Baik Dalam Memberikan Peluang Kepada Masyarakat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Transmigrasi di Jakarta, 15 Desember 2014.
 - Penghargaan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diberikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas Kedisiplinan dan Ketaatannya dalam Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2013 di Denpasar, 23 April 2014.
 - Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2014 Kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang diberikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Provinsi yang Memiliki Komitmen dalam Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta, 18 Desember 2014.
 - Penghargaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium/ Millennium Development Goals (MDGs) Tahun 2014 kepada Provinsi DI Yogyakarta sebagai Provinsi Terbaik I Tingkat Pencapaian MDGs Terbaik Tahun 2013.

- Penghargaan yang diberikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Provinsi Terbaik Pengelolaan Program MDGs Target 5B Tahun 2013.
- Piala sebagai Penata Tari Terbaik Festival Nasional Seni Pertunjukan Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Jakarta, 24-26 September 2014.
- Piala dari Presiden Republik Indonesia sebagai 10 Penampilan Terbaik Tanpa Jenjang Pawai Seni dan Budaya Kreatif.
- Piala Penyaji Unggulan Parade Lagu Daerah TMII.

HASIL REVIU INSPEKTORAT DIY



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA INSPEKTORAT

Jl. Cendana Nomor 40 TELP. 512567. 562009 Fax (0274) 512567
E-mail : inspektorat@logiaprovo.go.id
YOGYAKARTA

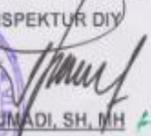
PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA (LKj) PEMERINTAH DAERAH DIY TAHUN ANGGARAN 2014

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2014 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah DIY.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu Kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini

Yogyakarta, 16 Maret 2015

INSPEKTUR DIY

SUMADI, SH, MH
NIP. 19630826 198903 1 007

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2014

No	Sasaran/ Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	4		6	7	8	9
1	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	74.57	65.73	88.15	24,627,783,900	19,427,692,160	78.89
	Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya*)	7%	7%	100	18,208,125,000	13,770,977,610	75.63
	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	9%	9%	100	167,992,900	151,130,300	89.96
	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	25 kasus	25 kasus	100	971,775,500	969,176,050	99.73
	Pengembangan Kehidupan beragama	100	100	100	4,781,586,250	4,079,819,350	85.32
	Pembinaan pelestarian nilai kepahlawanan keperintisan dan kesetiakawanan sosial	45%	44.10%	97.99	498,304,250	456,588,850	91.63
2	Melek huruf masyarakat meningkat	92,6	93,68	101.17	27,658,905,075	26,200,212,230	94.73
	Pengembangan dan Pembinaan perpustakaan	25%	25%	100	2,249,440,825	2,078,361,445	92.39
	Pendidikan non formal dan informal	7000 orang	7000 orang	100	5,563,522,000	5,190,723,835	93.30
	Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan	45%	45%	100	17,401,997,500	16,772,139,490	96.38
	Pengembangan budaya baca	18%	18%	100	2,443,944,750	2,158,987,460	88.34

No	Sasaran/ Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	4		6	7	8	9
3	Aksesibilitas pendidikan meningkat	10	9,46	94.6	74,311,656,000	70,544,189,073	94.93
	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	2100 orang	2100 orang	100	175,000,000	171,675,000	98.10
	Peningkatan peranserta kepemudaan	12 sentra	12 sentra	100	2,978,535,000	2,716,496,550	91.20
	Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	5 unit	5 unit	92.08	15,254,498,000	14,366,380,941	94.18
	Pemberdayaan dan pengembangan pemuda	39 organisasi	39 organisasi	100	1,646,210,000	1,573,641,800	95.59
	Wajib belajar pendidikan sembilan tahun	82.55%	82.55%	100	15,254,498,000	14,366,380,941	94.18
	Pendidikan menengah	81.35%	81.35%	100	29,334,640,000	28,216,679,858	96.19
	Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus	70.78%	70.78%	100	9,668,275,000	9,132,933,983	94.46
4	Daya saing pendidikan meningkat	5	5	100	41,830,612,400	37,536,073,964	89.73
	Pendidikan usia dini	82%	82%	100	1,846,452,500	1,747,935,580	94.66
	Peningkatan prestasi olahraga	23 medali	22	95.38	6,127,850,000	5,771,770,310	94.19
	Sinergitas pendidikan terhadap pembangunan	5%	5%	100	5,008,648,000	4,291,611,280	85.68
	Pendidikan tinggi	274000 orang	274000 orang	100	4,243,600,000	4,042,919,000	95.27
	Manajemen pelayanan pendidikan	74.47%	74.47%	100	13,873,996,000	12,447,099,059	89.72
	Pendidikan karakter berbasis budaya	5%	5%	100	1,508,414,000	1,352,278,580	89.65
	Pengembangan unggulan mutu pendidikan	5%	5%	100	3,952,985,000	3,625,194,000	91.71
	Akselerasi pengembangan pendidikan	45%	40.67%	90.37	5,268,666,900	4,257,266,155	80.80

No	Sasaran/ Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	4		6	7	8	9
	terkemuka						
5	Harapan hidup masyarakat meningkat	74,41	73,74	99.1	96,403,548,896	65,652,846,290	68.10
	Pembinaan kesehatan lansia	75 unit	75 unit	100	143,364,000	142,477,470	99.38
	Pengembangan pengelolaan air limbah	15000 SR	15000 SR	100	6,001,395,000	5,604,215,050	93.38
	Pengurangan kawasan kumuh	19.60%	19.60%	100	3,600,000,000	3,225,775,700	89.60
	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat *	62%	62.00%	100	1,765,092,600	1,705,775,250	96.64
	Pembiayaan kesehatan	40.25%	40.25%	100	599,193,000	583,908,400	97.45
	Peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD Bapel Jamkesos	65.23%	36.89%	56.47	65,406,801,000	36,787,737,979	56.24
	Pembinaan kesehatan bayi dan balita	98.25%	98.25%	100	118,650,000	116,991,000	98.60
	Pembinaan kesehatan anak dan remaja	98%	98.00%	100	68,200,000	61,790,000	90.60
	Pembinaan kesehatan ibu	98%	98.00%	100	220,000,000	217,514,240	98.87
	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	71.60%	71.60%	100	350,000,000	348,563,125	99.59
	Kesehatan reproduksi remaja	31.12%	31.12%	100	295,000,000	293,759,275	99.58
	Pengembangan lingkungan sehat	80%	80.00%	100	1,036,611,000	1,025,514,100	98.93
	Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	56.16%	56.16%	100	2,699,893,046	2,475,218,520	91.68
	Pembinaan panti asuan/panti jompo	2.07%	2.07%	100	738,050,000	733,232,095	99.35
	Pencegahan dan penanggulangan penyakit	60.90%	60.90%	100	2,347,635,100	2,178,141,720	92.78
	Pengembangan pengelolaan air	76.08%	76.08%	100	3,600,000,000	3,225,775,700	89.60

No	Sasaran/ Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	4		6	7	8	9
	minum						
	Pengelolaan persampahan	55%	55.00%	100	1,710,000,000	1,462,512,000	85.53
	Pembinaan para penyandang disabilitas dan trauma	4.90%	4.90%	100	564,956,750	561,082,150	99.31
	Pelayanan dan perlindungan anak bermasalah sosial	7.55%	7.55%	100	1,807,442,400	1,673,006,416	92.56
	Pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan	22%	22.00%	100	732,845,000	720,131,000	98.27
	Perbaikan gizi masyarakat	9.30%	9.30%	100	928,920,000	881,390,200	94.88
	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak	23.00%	23.00%	100	445,000,000	423,869,900	95.25
	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	4.00%	4.00%	100	1,224,500,000	1,204,465,000	98.36
6	Pendapatan masyarakat meningkat	7,4	7,1	95.95	63,175,625,350	58,404,212,339	92.45
	Pengembangan IKM	80655 IKM	75372 IKM	93.45	1,365,577,270	1,227,799,245	89.91
	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	44666	44666	100	2,176,094,060	2,086,728,100	95.89
	Pembinaan dan pengembangan industri kreatif	33964 IKM	33964 IKM	100	850,043,500	848,341,000	99.80
	Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	228769 unit	223621 unit	97.75	265,053,900	229,154,400	86.46
	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	130 UMKM	130 UMKM	100	123,896,900	120,545,100	97.29
	Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan	290	290	100	609,500,000	603,973,750	99.09

No	Sasaran/ Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	4		6	7	8	9
	Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan	3 komoditas	3 komoditas	97.72	1,315,157,360	1,220,027,137	92.77
	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	konsumsi 14,91 kg/kapita/th ketersediaan 27,17 kg/kapita/th	konsumsi 14,91 kg/kapita/th ketersediaan 27,17 kg/kapita	100	1,484,752,300	1,412,773,675	95.15
	Peningkatan dan pengembangan ekspor	151.72 US\$	151.72 US\$	100	2,742,382,850	2,528,287,265	92.19
	Peningkatan kemampuan teknologi industri	Rp3,187,398,897	3187398897	100	523,603,785	512,305,025	97.84
	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan perikanan dan kelautan	115,84 sektor	115,84 sektor	100	525,797,450	520,322,725	98.96
	Pengembangan agribisnis perkebunan	125,86 NTP	125,86 NTP	100	1,134,144,875	1,043,912,935	92.04
	Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	300 dokumen	300 dokumen	100	274,060,000	272,530,000	99.44
	Pemberdayaan penyuluh pertanian	61%	0.61	100	1,173,863,700	1,021,756,300	87.04
	Peningkatan produksi hasil peternakan	16223400 ekor	16223400 ekor	100	3,310,868,100	2,933,969,470	88.62
	Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	4.70%	0.047	100	315,550,000	296,572,305	93.99
	Pengembangan budidaya perikanan *	59280 ton	59280 ton	100	6,266,795,440	6,006,168,900	95.84
	Pengembangan perikanan tangkap	6130 ton	5639.6 ton	92	3,190,000,000	2,395,970,600	75.11
	Peningkatan produksi hortikultura	216831,8 ton	216831,8 ton	100	2,042,554,900	1,737,096,370	85.05

No	Sasaran/ Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	4		6	7	8	9
	Peningkatan produksi tanaman pangan	1200000 ton	1200000 ton	100	5,435,624,950	4,691,470,600	86.31
	Peningkatan penanganan daerah rawan pangan	48 desa	48 desa	100	513,380,000	503,751,685	98.12
	Rehabilitasi hutan dan lahan	27000 ha	27000 ha	100	7,060,418,250	6,508,623,890	92.18
	Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	46%	46%	100	787,178,500	785,900,000	99.84
	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	40%	40%	100	2,131,829,000	2,103,029,000	98.65
	Peningkatan mutu pelayanan lembaga ketenagakerjaan	46%	46%	100	732,845,000	720,131,000	98.27
	Distribusi dan akses pangan	99.15%	99%	100	535,000,000	524,126,850	97.97
	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	33.08%	33%	100	193,200,000	182,139,000	94.27
	Peningkatan partisipasi ekonomi perempuan	95.40%	95%	100	312,645,000	311,242,125	99.55
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender	46%	45.41%	98.71%	966,500,000	880,322,400	91.08
	Peningkatan kesempatan kerja	46%	46%	100	11,192,131,500	10,736,354,600	95.93
	Pengankaragaman konsumsi dan keamanan pangan	78%	78%	100	877,148,050	849,087,985	96.80
	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan petani	1.70%	1.70%	100	1,237,871,350	1,174,773,640	94.90
	Peningkatan produksi perkebunan	98200 ton	95961.04	97.72	1,315,157,360	1,220,027,137	92.77
	Peningkatan	54%	95961 ton	100	195,000,000	194,998,125	100.00

No	Sasaran/ Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	4		6	7	8	9
	peranserta dan kesetaraan gender						
7	Ketimpangan antar wilayah menurun	0,4515	0,4479	100.8	276,832,453,551	259,939,434,800	93.90
	Pengembangan perumahan	7.50%	7.50%	100	10,326,000,000	10,018,343,031	97.02
	Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi	40%	40%	100	4,300,000,000	3,343,280,700	77.75
	Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber air lainnya	1500 l/detik	1500 l/detik	100	17,819,130,000	15,699,796,455	88.11
	Penyediaan dan pengelolaan air baku	1500 l/detik	1500 l/detik	100	1,800,000,000	1,646,947,480	91.50
	Pembinaan pengawasan dan pengembangan ketenagalistrikan	78%	78%	100	4,178,100,000	3,861,032,000	92.41
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	74.35%	74.35%	100	56,890,946,429	54,871,185,891	96.45
	Peningkatan jalan dan jembatan	74.35%	74.35%	100	95,198,524,000	93,460,664,600	98.17
	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya	81.50%	81.50%	100	23,476,204,527	21,309,946,975	90.77
	Pengadaan tanah untuk infrastruktur	30%	25.05%	83.51	27,646,308,595	23,087,156,828	83.51
	Pengembangan kawasan perkotaan	54%	54%	100	19,497,240,000	18,420,357,990	94.48
	Pengembangan kawasan perdesaan	54%	54%	100	15,700,000,000	14,220,722,850	90.58

No	Sasaran/ Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	4		6	7	8	9
8	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun	0,295	0,435	52.54	20,169,346,665	18,867,019,935	93.54
	Pengembangan wilayah transmigrasi	150 kk	129 kk	86.39	2,140,596,000	1,792,245,500	83.73
	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	2207 unit	2207 unit	100	195,090,250	193,380,250	99.12
	Peningkatan promosi kerjasama dan pemerataan pertumbuhan investasi	347 bh	347	93.48	2,817,712,740	2,619,455,265	92.96
	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Rp7839 milyar	Rp7839 milyar	100	1,898,583,900	1,774,742,075	93.48
	Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	345 klp	345 klp	100	786,430,000	758,942,500	96.50
	Pengembangan kawasan budidaya laut air payau dan air tawar	13 ha	13 ha	100	876,717,000	858,156,050	97.88
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	34%	34%	100	675,000,000	600,569,150	88.97
		38.94%	38.94%	100	1,429,923,000	1,342,013,195	93.85
	Peningkatan kualitas informasi kesejahteraan sosial	38%	38%	100	2,785,593,600	2,651,384,250	95.18
	Peningkatan kesejahteraan keluarga	44.60%	44.60%	100	437,000,000	436,750,000	99.94
	Perlindungan dan pemberdayaan bagi korban tindak	5.95%	5.95%	100	60,702,600	59,002,600	97.20

No	Sasaran/ Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	4		6	7	8	9
	kekerasan pekerja migran bermasalah sosial						
	Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)	3.77%	3.61%	95.69	1,380,052,800	1,305,108,625	94.57
	Pengembangan bina keluarga	31.20%	31.20%	100	75,000,000	74,299,000	99.07
	Pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan	9.33%	9.08%	97.32	1,825,351,175	1,749,587,225	95.85
	Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	66.40%	66.40%	100	2,785,593,600	2,651,384,250	95.18
9	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	2.754.981	3.091.967	112.23	227,758,867,920	126,778,351,861	78.66
		249.854	254.213	101.74			
	Pengembangan pemasaran pariwisata	14595763 orang	14083451 orang	96.49	2,461,164,280	2,166,006,559	88.01
	Pengembangan kemitraan pariwisata *	81 klp	81 klp	100	12,564,012,940	12,370,969,140	98.46
	Pengembangan nilai budaya	14%	13.89%	99.18	18,832,359,700	14,570,252,400	77.37
	Pengelolaan keragaman budaya	13%	12.81%	98.53	33,564,084,000	29,090,540,479	86.67
	Pengelolaan kekayaan budaya *	20%	18.55%	92.74	160,337,247,000	68,580,583,283	42.77
10	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat	2,15	1,58	73.49	157,717,451,900	80,772,831,466	79.26
		2,25	1,95	86.67			

No	Sasaran/ Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	4		6	7	8	9
	Pengembangan destinasi pariwisata *	87 dtw	87 dtw	99.7	3,200,437,950	2,996,308,075	93.62
	Pengembangan desa wisata	75 desa	75 desa	100	674,876,950	615,902,750	91.26
	Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan *	25%	25%	100	30,222,137,000	25,169,288,075	83.28
	Pengembangan transportasi berbasis keistimewaan*	23%	21.02%	91.38	9,121,000,000	7,765,828,150	85.14
	Penataan kawasan budaya pendukung keistimewaan DIY *	49.50%	34.89%	69.89	109,099,000,000	39,584,197,586	36.28
	Penataan ruang keistimewaan DIY*	40%	40%	100	5,400,000,000	4,641,306,830	85.95
11	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	3	2	133.33	609,675,458,825	487,804,181,988	80.01
	Pengembangan sistem informasi pertanahan dan sistem informasi pendaftaran pertanahan*	9229 bidang	8792 bidang	95.27	22,445,173,500	7,033,233,128	31.34
	Peningkatan kewasdaan dini dan pembinaan masyarakat	20%	18.46%	92.28	453,657,500	407,646,940	89.86
	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	228000UTTP	228000UTP	100	306,068,350	282,393,390	92.26
	Pengembangan sarana prasarana teknologi informasi	60%	60%	100	9,170,428,100	8,966,657,000	97.78
	Perbaikan sistem administrasi kearsipan	8 dokumen	8 dokumen	100	2,296,728,800	1,823,594,150	79.40
	Pengembangan komunikasi informasi dan media massa *	11 urusan/bid	11 urusan/bid	100	6,623,658,200	6,192,489,550	93.49

No	Sasaran/ Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	4		6	7	8	9
	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	315 kasus	315 kasus	100	191,642,680	175,729,800	91.70
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	360 kasus	360 kasus	100	4,951,521,360	4,799,318,280	96.93
	Pemeliharaan kantramtibnas dan pencegahan tindak kriminal	964 kasus	945 kasus	98.01	478,165,560	363,791,348	76.08
	Fasilitasi pembinaan pengendalian frekuensi dan informasi publik	65%	65%	100	607,412,225	570,684,530	93.95
	Pengendalian pembangunan daerah	94%	94%	100	3,244,822,900	2,873,522,585	88.56
	Pengembangan data informasi	70%	70%	100	321,944,110	319,976,810	99.39
	Analisis kebijakan pembangunan	31.77%	31.77%	100	1,090,798,300	1,075,104,300	98.56
	Pendidikan politik bagi perempuan	10%	10%	100	511,500,000	473,983,850	92.67
	Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	90%	90%	100	53,790,000	52,679,860	97.94
	Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah	80%	79.44%	99.3	4,457,761,700	3,942,121,482	88.43
	Pengembangan statistik daerah	96%	96%	100	2,179,133,400	2,165,743,400	99.39
	Perencanaan pembangunan pemerintahan	23.85%	21.46%	90	2,874,329,950	2,109,821,000	73.40
	Perencanaan pembangunan perekonomian	24%	24%	100	1,084,225,500	1,006,323,650	92.81
	Perencanaan pembangunan wilayah dan sarana prasarana	23.85%	23.85%	100	1,830,776,500	1,728,189,828	94.40
	Perencanaan pembangunan	24%	24%	100	1,425,702,700	1,357,731,602	95.23

No	Sasaran/ Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	4		6	7	8	9
	sosial budaya						
	Perencanaan pembangunan daerah	13%	13%	100	1,702,443,200	1,661,278,399	97.58
	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan*	13%	13%	100	3,244,822,900	2,873,522,585	88.56
	Peningkatan kerjasama antar daerah	60%	60%	100	647,178,500	581,948,895	89.92
	Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	100	296,549,875	264,127,455	89.07
	Pendidikan politik masyarakat	70%	68%	97.67	366,427,500	366,092,475	99.91
	Pembinaan dan pengembangan aparatur	82%	78%	94.91	4,492,355,855	4,314,218,610	96.03
	Penelitian dan pengembangan	100%	100%	100	2,096,628,070	2,040,886,310	97.34
	Penataan administrasi kependudukan	87%	87%	100	1,330,476,500	1,259,263,403	94.65
	Penataan daerah otonomi baru	100%	100%	100	482,442,500	472,055,800	97.85
	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%			8,291,893,274	7,858,639,637	94.77
	Peningkatan pendidikan kedinasan	22.50%	22.50%	100	5,457,408,160	5,153,207,085	94.43
	Peningkatan pemberdayaan pemerintah desa	55%	55%	100	32,974,900	32,974,900	100.00
	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	93%	80.90%	86.99	35,859,729,912	24,280,910,846	67.71
	Penataan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100	2,490,425,425	2,309,441,464	92.73
	Pengawasan produk hukum	100%	100%	100	11,644,500	11,644,500	100.00

No	Sasaran/ Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	4		6	7	8	9
	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	35%	35%	100	559,799,500	553,356,580	98.85
	Penataan pengawasan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	35%	35%	100	308,263,500	298,178,817	96.73
	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	20%	13.00%	65%	56,398,500	47,819,875	84.79
	Peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	100	505,583,050	495,497,060	98.01
	Fasilitasi pindah/purna tugas PNS	100%	100%	100	175,465,500	157,401,035	89.70
	Pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100	86,416,060,831	40,711,175,002	47.11
	Fasilitasi bantuan dan layanan hukum	100%	100%	100	2,761,490,750	2,680,111,176	97.05
	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	15%	15%	100	1,113,973,000	911,027,800	81.78
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100	181,253,996,815	125,845,643,906	69.43
	Peningkatan kerjasama kediklatan antar daerah	100 jenis, 3 jenis	100 jenis, 3 jenis	100	396,416,400	382,474,700	96.48
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100	71,042,991,936	69,627,123,369	98.01
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100	126,469,931,851	124,753,383,512	98.64
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%	100%	100	7,585,414,075	6,878,429,649	90.68
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100	4,936,592,815	4,666,189,655	94.52

No	Sasaran/ Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	4		6	7	8	9
12	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	1	1	100	27,982,038,775	26,447,255,790	94.52
	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota	100%	100%	100	525,917,000	459,024,748	87.28
	Pengembangan investasi dan aset daerah	10%	10%	100	12,138,015,000	12,030,321,500	99.11
	Pengembangan dan pembinaan BUMD serta lembaga keuangan mikro	22%	22%	100	534,468,000	475,866,150	89.04
	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	10.04%	10.04%	100	10,309,787,175	9,251,969,196	89.74
	Peningkatan sistem pengamanan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah	45%	44.64%	99.21	3,581,520,500	3,422,780,881	95.57
	Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah	100%	100%	100	812,776,100	743,346,700	91.46
	Peningkatan profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	100%	100%	100	79,555,000	63,946,615	80.38
13	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	36,57	37,82	103.42	55,880,404,835	51,948,714,955	92.96
	Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana LLAJ	100%	100%	100	1,850,960,980	1,821,037,420	98.38

No	Sasaran/ Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	4		6	7	8	9
	Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	100%	100%	100	486,854,000	861,780,500	177.01
	Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	100%	100%	100	77,374,600	52,055,900	67.28
	Pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	100%	100%	100	1,575,150,800	1,449,170,400	92.00
	Peningkatan pelayanan angkutan	32.50%		98.96	1,001,794,600	945,891,600	94.42
	Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas	16.80%	16.80%	100	547,255,300	503,186,500	91.95
	Pembangunan sarana prasarana perhubungan	40%	40%	100	349,441,000	345,572,000	98.89
	Pengaturan sistem simpang bersinyal	40%	40%	100	5,169,438,700	5,021,149,700	97.13
	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	82%	82%	100	12,704,534,637	12,203,947,137	96.06
	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	35%	35%	100	202,392,300	201,126,500	99.37
	Sediaan farmasi perbekalan kesehatan dan pengawasan makanan	57%	57%	100	269,692,000	263,040,080	97.53
	Peningkatan pelayanan kesehatan pada BULD RSJ Grhasia	70.88%	66.88%	94.36	16,730,180,768	14,899,537,114	89.06
	Pelatihan kesehatan dan peningkatan mutu diklat kesehatan	70%	70%	100	499,328,150	450,212,600	90.16
	Pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS Paru-	100%	100%	100	470,568,700	445,120,706	94.59

No	Sasaran/ Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	4		6	7	8	9
	paru/RS Mata						
	Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata	100%	99.98%	99.98	13,945,438,300	12,485,886,798	89.53
14	Kualitas lingkungan hidup meningkat	6,29	6,29	100	81,402,219,650	74,822,795,042	91.92
	Pengendalian banjir	74%	74%	100	600,000,000	519,277,000	86.55
	Pembinaan Pengembangan dan pengawasan usaha pertambangan	44%	44%	100	1,039,600,000	1,017,377,500	97.86
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	39.90%	39.90%	100	4,705,552,000	4,360,821,500	92.67
	Pencegahan dini bencana	25 desa	25 desa	100	4,768,467,175	4,509,068,305	94.56
	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	3.89%	3.89%	100	7,156,505,700	6,381,421,418	89.17
	Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	1350 orang, 51 desa	1350 orang, 51 desa	100	100,000,000	97,998,000	98.00
	Peningkatan pengendalian polusi	5%	5%	100	243,237,500	223,669,500	91.96
	Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	75%	75%	100	119,648,500	113,800,008	95.11
	Penataan kawasan hutan	27.50%	26.69%	97.09	713,081,000	667,585,870	93.62
	Penanganan dan penanggulangan bencana	8.54	3.44	40.24	566,289,450	226,830,450	40.06
	Pengelolaan lingkungan berbasis budaya	6.25	5.81	93	2,000,000,000	1,311,762,260	65.59
	Perlindungan dan konservasi sumberdaya	31.84%	31.84%	100	1,925,968,500	1,832,764,260	95.16

No	Sasaran/ Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	4		6	7	8	9
	alam						
	Pemberdayaan komunitas perumahan	40%	40%	100	11,706,500,000	11,278,145,500	96.34
	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	20%	20%	100	906,455,000	843,550,400	93.06
	Pembinaan pengawasan pengendalian pengelolaan pendayagunaan air tanah	<20%	<20%	100	3,700,000,000	3,587,710,550	96.97
	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	380 unit usaha	380 unit usaha	100	449,805,000	439,615,000	97.73
	Penanggulangan korban bencana				40,701,109,825	37,411,397,521	91.92
15	Pemanfaatan ruang terkendali	63,42	64,21	101.25	17,368,535,805	15,764,152,665	90.76
	Perencanaan tata ruang	16 kawasan strategis	16 kawasan strategis	100	1,450,000,000	1,286,852,000	88.75
	Perlindungan dan konservasi sumberdaya air	10%	10%	100	1,925,968,500	1,832,764,260	95.16
	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi	13%	13%	100	600,000,000	595,153,930	99.19
	Pembinaan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan	37.61%	37.61%	100	2,982,000,000	2,749,063,150	92.19
	Pelayanan jasa pengujian	81.25%	81.25%	100	3,146,249,850	2,610,265,375	82.96
	Pembinaan pengawasan dan pengembangan naham bakar	50%	50%	100	607,500,000	563,546,200	92.76
	Pemanfaatan ruang	60%	60%	100	1,419,282,000	1,138,776,000	80.24
	Pembangunan dan pengelolaan bangunan	82%	82%	100	501,062,500	485,876,100	96.97

No	Sasaran/ Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	4		6	7	8	9
	ngedung dan lingkungan						
	Pengkajian dan penerapan teknologi bidang PU	77.50%	77.50%	100	879,994,925	874,696,950	99.40
	Pembinaan jasa konstruksi	80%	80%	100	1,037,707,000	1,017,394,475	98.04
	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	15%	15%	100	769,000,000	755,799,200	98.28
	Pengendalian pemanfaatan ruang	40%	40%	100	1,829,309,500	1,635,254,500	89.39
	Rehabilitasi ekosistem dan cadangan sumberdaya alam	0.008	0.008	100	220,461,530	218,710,525	99.21
TOTAL BELANJA LANGSUNG					1,802,794,909,546.67	1,420,909,964,557.94	78.82



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) DIY**

Kepatihan Danurejan Telp. 0274 - 562811
IPsw. 1208-1220, 1243-1248, 1253l, 511185 Fax. 0274 - 586712
website <http://www.bappeda.jogjakprov.go.id>
YOGYAKARTA Kode Pos 55213